

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU
NOMOR : HK.02.02.8B.12.25.150 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan

Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
763);

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Mamuju, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Balai POM di Mamuju Tahun 2025–2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di Mamuju untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Renstra Balai POM di Mamuju sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:

- a. Acuan bagi Balai POM di Mamuju dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
- b. Dasar penyelenggaraan Sisrem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai POM di Mamuju.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju

pada tanggal 5 Desember 2025

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI MAMUJU,



BURHAM SIDOBEJO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI MAMUJU
NOMOR: HK.02.02.8B.12.25.150 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI MAMUJU TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Mamuju merupakan merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan khususnya di Provinsi Sulawesi Barat (Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023). Oleh karena itu, Balai POM di Mamuju bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di Provinsi Sulawesi Barat telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM. Peraturan ini telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai POM di Mamuju dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi I dan secara

administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Balai POM di Mamuju yang berlokasi di Kabupaten Mamuju memiliki cakupan wilayah pengawasan sebanyak 6 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat meliputi Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Polewali Mandar.

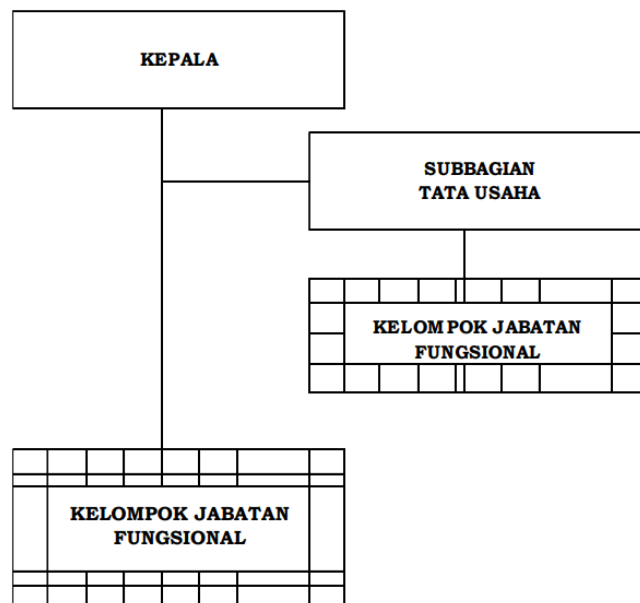
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 19 Tahun 2023. Balai POM di Mamuju menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan

- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Selain, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana Peraturan Kepala BPOM Nomor 19 Tahun 2023, seluruh Kementerian/Lembaga termasuk BPOM diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Balai POM di Mamuju sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender BPOM turut mendukung implementasi PUG di seluruh kegiatannya.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Mamuju disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023. Adapun struktur organisasi Balai POM di Mamuju tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Mamuju
Sumber: Perka BPOM No 19 Tahun 2023

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai POM di Mamuju didukung Struktur Organisasi, yang terdiri dari 1 Subbagian Tata Usaha dan Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional, yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai POM di Mamuju didukung Struktur Organisasi, yang terdiri dari 1 Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

1) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

2) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Tim kerja yang dimaksud terdiri dari ketua tim dan anggota tim.
Ketua tim

berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Mamuju untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra

Balai POM di Mamuju dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan Balai POM di Mamuju untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Renstra Balai POM di Mamuju 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, Balai POM di Mamuju bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

1.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis Balai POM di Mamuju Tahun 2020 – 2024

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Mamuju. Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK).

Tabel 1.1 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Balai POM di Mamuju Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju																
IKSK1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	80,80	79,90	98,89	83,60	94,58	113,14	86,60	88,32	101,98	90,00	98,29	109,22	98,30	98,06	99,75
IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	78,00	84,31	108,09	84,00	97,14	115,65	86,00	86,75	100,87	88,00	85,54	97,21	90,00	91,57	101,74
IKSK1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	80,00	85,00	106,25	85,00	90,29	106,23	87,00	83,49	95,96	88,00	99,09	112,60	99,10	98,25	99,14
IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	78,00	74,07	94,96	80,00	90,24	112,80	82,00	95,92	116,97	84,00	81,08	96,53	86,00	87,76	102,04
IKSK1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	N/A	N/A	N/A	88,00	78,00	88,64	89,00	96,15	108,04	90,00	84,31	93,68	90,00	94,44	104,94
SK2 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju																
IKSK2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	69,00	64,86	94,00	68,00	67,81	99,72	71,00	75,00	105,63	75,00	76,91	102,55	78,00	80,67	103,42

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju																
IKSK3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	83,00	95,08	114,55	91,10	93,40	102,52	92,30	96,10	104,12	93,40	98,20	105,14	98,30	99,18	100,90
IKSK3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	71,00	72,00	101,41	74,00	61,50	83,11	76,01	66,03	86,87	78,01	67,06	85,96	80,01	81,98	102,46
IKSK3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	85,00	82,92	97,55	86,75	65,69	75,72	88,50	94,61	106,90	91,00	97,51	107,15	98,00	98,42	100,43
SK4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju																
IKSK4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	78,00	96,43	123,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKSK4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	52,60	66,23	125,91	64,00	58,95	92,11	71,00	71,84	101,19	78,00	85,38	109,47	85,40	91,84	107,54
IKSK4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80,00	20,00	25,00	82,00	100,00	121,95	84,00	100,00	119,05	86,00	100,00	116,28	100,00	100,00	100,00

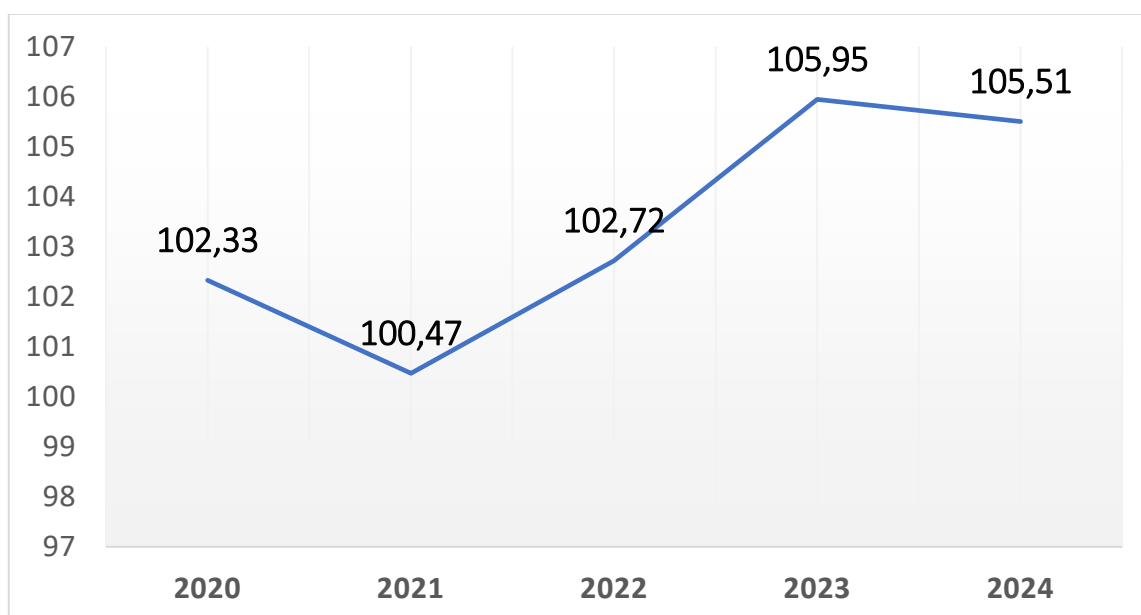
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
	di wilayah kerja Balai POM di Mamuju															
IKSK4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50,00	85,00	170,00	60,00	57,69	96,15	65,00	65,71	101,10	70,00	73,53	105,04	75,00	70,59	94,12
IKSK4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	51,00	86,87	170,33	60,00	58,14	96,90	65,00	65,19	100,29	70,00	75,16	107,38	75,20	76,51	101,74
IKSK4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	3,11	3,49	112,22	3,75	4,35	116,00	4,01	4,54	113,22	4,40	4,64	105,45	4,70	4,78	101,70
IKSK4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	53,33	50,00	93,76	55,56	62,75	112,93	83,00	83,33	100,40
IKSK4.8	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95,00	99,86	105,12
SK5 Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju																
IKSK5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	77,63	96,10	123,79	89,50	95,93	107,18	91,30	93,28	102,17	93,10	93,29	100,20	94,10	95,42	101,40
IKSK5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di	16,00	13,69	85,56	40,00	40,00	100,00	54,00	54,00	100,00	68,00	68,00	100,00	82,00	83,00	101,22

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
	wilayah kerja Balai POM di Mamuju															
IKSK5.3	Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	5,00	5,00	100,00	12,00	12,00	100,00	18,00	18,00	100,00	25,00	25,00	100,00	31,00	31,00	100,00
IKSK5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	1,00	1,00	100,00	2,00	2,00	100,00	3,00	3,00	100,00	4,00	4,00	100,00	5,00	5,00	100,00
SK6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju																
IKSK6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	82,00	100,00	121,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKSK6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	75,00	100,00	133,33	100,00	100,00	100,00	100,00	91,30	91,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SK7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju																
IKSK7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	44,00	150,00	340,91	97,00	125,00	128,87	98,00	100,00	102,04	99,00	100,00	101,01	100,00	100,00	100,00
SK8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal																
IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	85,00	61,05	71,82	64,00	64,02	100,03	65,00	81,75	125,77	66,00	83,22	126,09	85,55	85,92	100,43
IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	80,00	73,37	91,71	75,40	78,71	104,39	77,40	79,11	102,21	79,40	79,66	100,33	83,12	80,83	97,24
IKSK8.3	Nilai Pengelolaan Kearsipan*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	88,89	95,87	107,85

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK9 Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal																
IKSK9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	75,00	82,94	110,59	82,00	82,36	100,44	82,50	84,32	102,21	83,00	89,80	108,19	88,66	87,09	98,23
SK10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju																
IKSK10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	70,00	45,00	64,29	53,00	51,94	98,00	58,00	55,72	96,07	63,00	61,69	97,92	63,96	71,34	111,54
IKSK10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	1,51	1,70	112,58	2,00	1,42	71,00	2,25	2,88	128,00	2,50	3,00	120,00	3,00	3,00	100,00
SK11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel																
IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	93,00	86,66	93,18	92,50	89,40	96,65	93,10	89,46	96,09	94,30	93,17	98,80	90,06	92,45	102,65
IKSK11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju	90,00	100,00	111,11	95,00	100,00	105,26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
IKSK11.3	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	98,36	95,00	96,58
IKSK11.4	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	89,00	98,13	110,26
IKSK11.5	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60,00	75,10	125,17

Sumber: Laporan Kinerja Balai POM di Mamuju 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Jika dilihat perkembangannya selama lima tahun terakhir, Nilai Kinerja Balai POM di Mamuju periode 2020 hingga 2024 bergerak secara fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis. Meskipun tahun 2024 mengalami penurunan namun masih masuk kedalam predikat Istimewa (Nilai diatas 100). Setiap tahunnya Balai POM di Mamuju selalu berupaya untuk memperbaiki capaian kinerjanya sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 1.2 Nilai Kinerja BPOM Tahun 2020 - 2024

Pengukuran kinerja Balai POM di Mamuju mengacu pada Sasaran Kegiatan yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Mamuju dengan mempertimbangkan tantangan mas depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Mamuju. Dalam penyusunan sasaran kegiatan, Balai POM di Mamuju menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard (BSC)* yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Kegiatan prioritas BPOM selama periode 2020 - 2024 sebagai berikut:

1. Perizinan merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada

konsumen. Jumlah permohonan izin edar produk obat dan makanan yang diselesaikan selama periode tahun 2020-2024 sebanyak 77 permohonan. Jumlah permohonan registrasi ini merupakan dampak dari berbagai inovasi yang dilakukan Balai POM di Mamuju diantaranya KASIPI (Konsultasi dan Informasi Seputar Proses Registrasi).

2. Pengawasan produk setelah beredar bertujuan untuk memastikan konsistensi produk terhadap data yang disampaikan dan disetujui saat perizinan melalui inspeksi di sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian produk, farmakovigilans, serta pengawasan penandaan dan iklan produk. Dari tahun 2020 hingga 2024, jumlah sarana produksi dan distribusi yang diperiksa dan diawasi menunjukkan tren yang meningkat dengan total sebanyak 853 sarana.
3. Penguatan pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP. Implementasi Green Laboratory melalui penyusunan kajian sumber dan siklus material, kajian kesehatan dan kenyamanan dalam ruangan, kajian efisiensi pemeliharaan hewan percobaan. BPOM menyelenggarakan pertemuan nasional pembahasan konsep baru Regionalisasi Laboratorium. Kegiatan monitoring dan evaluasi Implementasi Regionalisasi Laboratorium dilakukan rutin setiap triwulan dan Penyusunan serta sosialisasi Standar Kemampuan Laboratorium BB/Balai POM sesuai konsep baru Regionalisasi Laboratorium sebagai upaya pemenuhan Grand Design melalui konsep Regionalisasi Laboratorium.
4. Patroli Siber Obat dan Makanan merupakan kegiatan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring. Pada pelaksanaannya, Balai POM di Mamuju berkolaborasi dengan BPOM, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta asosiasi e-commerce, dalam hal ini idEA (Indonesian E-commerce Association). Dalam kurun waktu 2020 s.d. 2024, Balai POM di Mamuju menemukan 955 tautan daring yang

- mengedarkan Obat dan Makanan ilegal. Terhadap temuan tersebut, telah dilakukan penurunan konten secara kolaboratif dengan BPOM, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan idEA.
5. Balai POM di Mamuju melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman terhadap persyaratan, asistensi dalam proses registrasi baik dalam hal pemenuhan persyaratan teknis maupun akses teknologi online yang diterapkan dalam proses registrasi produk. selama tahun 2022-2024 telah dilakukan pendampingan terhadap 43 UMKM.
 6. Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku serta mendorong Masyarakat agar dapat melindungi dirinya sendiri dari produk Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan, Balai POM di Mamuju melaksanakan program strategis pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Selama periode 2020 s.d. 2024 kegiatan KIE selalu meningkat dengan jumlah sekitar 31.952 orang telah menerima KIE. Hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Mamuju memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.
 7. Revitalisasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial pada bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan sebagai berikut.

SK1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Mamuju merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari, Pengawasan selama beredar (post-market control), Pengujian Laboratorium dan Penegakan Hukum. Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut (1) Persentase Obat yang

memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju; (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju; (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju; (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju dan (5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK1 yaitu: a) Meningkatkan kesadaran masyarakat terdapat Obat dan Makanan yang berkualitas melalui kampanye Cek KLIK pada kegiatan KIE untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan; b) Meningkatkan pemberian pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha; c) Meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian dan Pengadilan serta Kejaksaan agar dapat memberikan penuntutan maksimal terhadap perkara Obat dan Makanan;

SK2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju diukur melalui peningkatan indeks kesadaran. Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran

masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu. Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju yaitu Pada tahun 2024 diperoleh hasil pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Analisis dan Kajian Obat dan Makanan BPOM yaitu sebesar 80,67. Pencapaian realisasi dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan kinerja dengan kategori meningkat. Harus ada upaya terus menerus untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat. Hal ini harus menjadi bahan pertimbangan Balai POM di Mamuju dalam melakukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat. Metode yang dipilih dan waktu pelaksanaan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat. Penggunaan media sosial meskipun dirasa paling efektif untuk beberapa segmen masyarakat ternyata tidak mampu menyentuh semua segmen masyarakat. Masyarakat Sulawesi Barat yang sebagian besar tinggal di pedesaan ternyata tidak banyak memanfaatkan dan menggunakan media sosial. Pertemuan dan tatap muka secara langsung apalagi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama tetap mempunyai manfaat yang tidak dapat digantikan oleh media sosial. Karena itu Balai

POM di Mamuju tetap melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang ada di Sulawesi Barat sebagai juru tutur atau penyambung lidah Balai POM di Mamuju dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan yang aman dan bermutu. Balai POM di Mamuju memanfaatkan semua komunitas yang telah dibentuk untuk menyebarkan infografis tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Balai POM di Mamuju telah menyebarkan infografis melalui berbagai komunitas misalnya Pramuka, Masyarakat di Daerah Pelosok, Komunitas Anak Sekolah, Masyarakat Desa yang memiliki prevelensi stunting yang tinggi dan Masyarakat kepulauan. Infografis yang disebarluaskan oleh Balai POM di Mamuju diharapkan menjadi viral dan bergulir layaknya bola salju yang semakin besar dan menjadi counter informasi yang efektif untuk menangkal informasi yang menyesatkan (HOAX) yang banyak beredar di masyarakat. Masyarakat mempunyai pilihan sumber informasi dan hanya mempercayai informasi yang disampaikan oleh Balai POM di Mamuju. Dan juga melakukan kerja sama dengan lintas sektor seperti media radio untuk dapat menyebarkan informasi terkait obat dan makanan yang dapat diakses Masyarakat hingga ke daerah pelosok.

Kegiatan terobosan Balai POM di Mamuju untuk mendukung pencapaian program ini yaitu BIYANKA (Mobil Layanan Informasi dan Edukasi Keliling) hingga ke pelosok negeri, kegiatan ini menjangkau daerah daerah yang sulit untuk di jangkau yang dimana masyarakat di daerah tersebut jarang atau bahkan belum pernah diberikan pengetahuan terkait keamanan obat dan makanan. Dengan bekerja sama dengan lintas sektor terkait melalui BIYANKA ini dapat menjangkau daerah daerah pelosok negeri dengan tujuan akhir yaitu meningkatkan kesadaran dari masyarakat yang menjangkau semua daerah dan lapisan masyarakat.

SK3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Sebagai salah satu lembaga non kementrian, Balai POM di Mamuju yang merupakan salah satu UPT dari Badan POM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai POM di Mamuju mencakup berbagai hal yang terkait dengan pengawasan dan fungsi dalam perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik Balai POM di Mamuju bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Sasaran strategis ini diukur dengan 3 Indikator Kinerja sebagai berikut: 1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju; 2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju; dan 3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK 3 yaitu 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti memberikan layanan yang mudah diakses, cepat, transparan, dan ramah bagi pelaku usaha maupun masyarakat, menyediakan jalur konsultasi langsung maupun daring untuk menjawab pertanyaan teknis terkait pengawasan, sertifikasi, dan pengaduan masyarakat, serta menerapkan sistem pelayanan berbasis digital untuk mempermudah proses perizinan dan sertifikasi; 2) Optimalisasi inovasi pelayanan: KASIP, dengan mengembangkan dan menyosialisasikan inovasi tersebut agar pelaku usaha lebih memahami proses perizinan/ sertifikasi serta melakukan pendampingan pelaku usaha untuk meminimalkan dan mempermudah proses pengajuan izin; 3) Responsif terhadap pengaduan dan masukan dari masyarakat maupun pelaku usaha; 4) Melakukan pengawasan dengan pendekatan edukatif dan pembinaan, bukan semata-mata penindakan, serta membangun kemitraan dan komunikasi yang baik dengan pelaku usaha dan masyarakat; 5) Menyediakan informasi publik

yang jelas dan akurat tentang produk legal, bahaya produk ilegal, serta prosedur pengawasan, dan meningkatkan edukasi masyarakat melalui sosialisasi, media cetak/digital, dan keterlibatan dalam forum masyarakat; 6) Melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan masyarakat, pelaku usaha, dan stakeholder terkait; dan 7) Kolaborasi Lintas Sektor untuk mendukung pelaku usaha dalam pemenuhan standar mutu dengan menggunakan pendekatan dan bahasa yang mudah dipahami saat melakukan pembinaan atau sosialisasi.

Kegiatan terobosan Balai POM di Mamuju untuk mendukung SK 3 yaitu Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Balai POM di Mamuju telah melaksanakan inovasi KASIPI (Konsultasi dan Informasi Seputar Proses Registrasi) yang merupakan terobosan untuk menjawab berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM, dalam memahami dan memenuhi persyaratan registrasi dan sertifikasi produk pangan olahan, obat tradisional, dan kosmetik. Inovasi ini dikembangkan untuk memperkuat fungsi pelayanan publik Balai POM kepada pelaku usaha melalui layanan konsultasi teknis dan informasi praktis yang mudah diakses, sehingga proses registrasi produk dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai ketentuan. Sehingga Inovasi KASIPI merupakan wujud nyata dari transformasi pelayanan publik di Balai POM di Mamuju. Melalui pendekatan konsultatif, edukatif, dan solutif, KASIPI telah menjadi alat strategis dalam meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan dan pelayanan sertifikasi. Inovasi ini mendukung pencapaian sasaran kegiatan secara berkelanjutan dan memperkuat posisi Balai POM di Mamuju sebagai lembaga pengawas yang profesional, humanis, dan proaktif.

SK4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Peningkatan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik oleh Balai POM di Mamuju dilakukan secara terencana, terpadu, dan berbasis risiko terhadap sarana produksi, distribusi, maupun pelayanan kefarmasian guna memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Efektivitas pemeriksaan diukur melalui ketepatan sasaran, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan yang cepat dan tepat. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan dengan pendekatan pembinaan, sehingga pelaku usaha tidak hanya diperiksa, tetapi juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan cara produksi dan distribusi yang baik. Di sisi lain, pelayanan publik, termasuk layanan sertifikasi, konsultasi teknis, edukasi, serta penanganan pengaduan masyarakat, terus ditingkatkan kualitasnya dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses. Penggunaan sistem digital, kepastian waktu layanan, serta sikap responsif petugas menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK 4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju yaitu 1) Penguatan Perencanaan dan Targeting Pemeriksaan, yaitu dengan menyusun dengan memprioritaskan pemeriksaan dengan berbasis risiko serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk efektivitas pengawasan terpadu; 2) Peningkatan kompetensi dan kapasitas petugas dengan melaksanakan pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas secara berkala bagi petugas; 3) Pembinaan dan edukasi selama pemeriksaan; 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik; 5) Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan 6) Memanfaatkan sistem digitalisasi terhadap pengawasan.

Kegiatan terobosan Balai POM di Mamuju untuk mendukung SK 4 yaitu dengan adanya inovasi KASIPI. KASIPI (Konsultasi dan Informasi

Seputar Proses Registrasi) merupakan inovasi layanan yang dikembangkan oleh Balai POM di Mamuju sebagai wujud peningkatan mutu pelayanan publik, khususnya dalam bidang sertifikasi dan perizinan produk pangan olahan, Kosmetik, serta Obat Bahan Alam. Inovasi ini hadir untuk menjawab tantangan yang sering dihadapi pelaku usaha, terutama UMKM, terkait kurangnya pemahaman dan keterbatasan akses informasi mengenai prosedur registrasi dan sertifikasi produk. Tujuan dari inovasi KASIPPI yaitu memberikan layanan konsultasi teknis yang mudah diakses, cepat, dan ramah, meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang persyaratan registrasi produk, termasuk SPP-IRT, Sertifikat CPPOB, izin edar MD, dan lainnya, memfasilitasi pelaku usaha dalam proses pemenuhan persyaratan teknis sebelum dilakukan pemeriksaan sarana atau pengajuan sertifikasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pendekatan edukatif dan proaktif. Sehingga melalui KASIPPI, Balai POM di Mamuju tidak hanya memperkuat peran pengawasan terhadap sarana Obat dan Makanan, tetapi juga mentransformasi layanan publik menjadi lebih inklusif, efisien, dan partisipatif. Inovasi ini menjadi bukti bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh pemeriksaan dan penindakan, tetapi juga oleh kualitas pelayanan dan pembinaan yang diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

SK5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: (a) KIE melalui media cetak dan elektronik; (b) KIE langsung ke masyarakat; dan (c) KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kategori yaitu (1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; (2) Tingkat

pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; (3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; (4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju yaitu (a) Balai POM di Mamuju aktif melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui KIE baik secara langsung ataupun melalui media. Balai POM di Mamuju telah melakukan KIE secara langsung bekerjasama dengan tokoh masyarakat serta pelaksanaan KIE secara mandiri; (b) KIE yang dilaksanakan melalui media terdiri atas media cetak, elektronik dan media sosial. KIE melalui media cetak yang telah dilaksanakan yakni berupa penyebaran informasi melalui Brosur/ Leaflet/ Stiker KIE yang diberikan langsung kepada masyarakat dan pemasangan billboard serta publikasi layanan melalui surat kabar. Telah dilaksanakan pula penyebaran informasi melalui media elektronik berupa penyebaran berita melalui media online; (c) Balai POM di Mamuju aktif melakukan pengelolaan media sosial sebagai media KIE baik berupa video maupun infografis telah dipublikasikan melalui media sosial tersebut.

Kegiatan terobosan Balai POM di Mamuju untuk mendukung pencapaian SK 5 yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait informasi obat dan makanan Balai POM menyediakan layanan Biyanka yaitu mobil layanan informasi dan edukasi keliling Balai POM di Mamuju dan tersedia pula Layanan WALI (WhatsApp Lincah) untuk mempermudah pelayanan secara online.

SK6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Balai POM di Mamuju merupakan UPT yang melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel obat dan makanan di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam melakukan pengujian tentu harus menggunakan parameter yang sesuai agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan

kebenarannya. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah: (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju dan (2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK6 yaitu (1) Pengujian sampel dilakukan sesuai dengan parameter dalam pedoman sampling dan dilakukan sesuai dengan timeline pengujian (2) Pemenuhan alat laboratorium secara bertahap agar seluruh parameter uji bisa dilakukan secara mandiri oleh Balai POM di Mamuju, (3) Mempertahankan koordinasi aktif antar fungsi terutama tim sampling, tim penerima sampel dan pengujian dalam pemenuhan timeline.

SK7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di Mamuju melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Balai POM di Mamuju.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK7 yaitu: a) Pelaksanaan Operasi Intelijen mulai dari proses perencanaan dan evaluasi kegiatan Intelijen; b) Pelaksanaan Penindakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan termasuk gelar kasus dan evaluasi; c)

Pelaksanaan Pemberkasan seperti Koordinasi dengan Korwas PPNS dan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penyidikan hingga penyerahan Tersangka dan Barang Bukti; d) Pelaksanaan Wasmatlitrik (Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan) untuk menemukan unsur pidana dalam suatu Peristiwa.

SK8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal

Dalam melaksanakan tugas Balai POM di Mamuju, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Mamuju. Sasaran kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator: (1) Indeks RB Balai POM di Mamuju; (2) Nilai AKIP Balai POM di Mamuju; dan (3) Nilai Pengelolaan Kearsipan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK9 yaitu: a) Memastikan rencana aksi RB relevan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama; b) menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagaimana tercantum pada LHE SAKIP dari Inspektorat 1 BPOM, c) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan arsip secara berkala melalui rapat internal, d) Pemenuhan Sarana Prasarana Arsip yang belum lengkap.

SK9 Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Untuk mengukur sasaran kegiatan ini digunakan dua indikator yaitu: (1) Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK9 yaitu:

a) Peningkatan Kompetensi Pegawai yang memiliki nilai IP ASN dibawah standar khususnya Diklat Fungsional bagi pegawai yang belum terpenuhi; b) Monitoring secara berkala terhadap pemenuhan kompetensi minimal 20 JP untuk seluruh pegawai Balai POM di Mamuju.; c) Menetapkan jadwal rapat evaluasi secara berkala setiap bulan dengan agenda pembahasan komponen penilaian indeks seperti kompetensi, capaian JP, kinerja Individu atau SKP, disiplin pegawai, capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti; d) Memotivasi pegawai untuk ikut Tubel dalam rangka pemenuhan nilai kualifikasi jenjang pendidikan S2 bagi pegawai dengan jenjang jabatan fungsional yang belum memenuhi nilai kualifikasi maksimal; e) peningkatan kesadaran setiap pegawai terkait core value berakhlak perlu ditanamkan sebagai budaya kerja dalam melaksanakan tugas; f) melanjutkan inovasi yang telah dikembangkan oleh Balai POM di Mamuju untuk mencapai kinerja seperti SAMBUSA (Sistem Akuntabilitas Mamuju Berkelanjutan, Unggul, Solutif dan Andal).

SK10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi dan informasi yang memadai. Sasaran Strategis ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator yaitu (1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP dan (2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK10 yaitu: a) Peningkatan pemenuhan Ruang Lingkup di laboratorium kimia dan mikrobiologi; b)Peningkatan kompetensi SDM dilakukan melalui pelatihan baik secara luring maupun daring; c) Peningkatan pemenuhan peralatan Laboratorium Kimia dan Mikrobiologi; d) koordinasi dengan

penanggung data berkala; e) tinjau ulang timeline penyelesaian sampel pengujian; f) Koordinasi dengan fungsi pemeriksaan dan TPS terkait timeline sampel.

SK11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan. Balai POM di Mamuju dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran kegiatan ke-11, dengan ukuran keberhasilannya adalah: a) Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju; b) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju; c) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa; d) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara; e) Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK 11 yaitu; a) Melakukan cascading kinerja dalam dialogal kinerja sampai level individu; b) Menyusun Laporan Keuangan; c) Secara berkala melaksanakan pemantauan terhadap capaian komponen pembentuk IKPA dan EKA; d) Melakukan koordinasi dengan berkomunikasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM dan Kementerian Keuangan seperti KPPN di Mamuju dan Kanwil DJPb di Sulawesi Barat yang bertanggung jawab terhadap nilai IKPA dan EKA; e) Melakukan Bimtek Teknis Internal yang melibatkan KPPN di Mamuju / Biro Perencanaan Keuangan / Kanwil DJPb di Sulawesi Barat; f) Peningkatan kompetensi berkala untuk SDM Penanggungjawab terkait; g) Meningkatkan koordinasi antara PPK, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan; h) Meningkatkan koordinasi antar semua fungsi terkait pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan mulai dari perencanaan, pencatatan sampai pelaporan; i) Komitmen bersama semua pegawai Balai POM di Mamuju

untuk melakukan kegiatan pengadaan untuk prioritas penggunaan barang PDN ataupun TKDN.

1.1.2 Aspirasi Stakeholder

Dalam menghadapi tantangan masa depan, Balai POM di Mamuju menyadari pentingnya memperkuat sistem pengawasan terhadap obat dan makanan guna melindungi kesehatan masyarakat di wilayah Sulawesi Barat. Lingkungan strategis yang dihadapi tidak hanya bersifat nasional, namun juga dipengaruhi oleh dinamika global, kemajuan teknologi, serta perubahan sosial ekonomi yang cepat—termasuk di wilayah kepulauan dan perbatasan seperti Mamuju.

Aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi komponen vital dalam merancang arah kebijakan pengawasan yang lebih adaptif dan responsif. Melalui berbagai kanal komunikasi dan forum partisipatif, Balai POM di Mamuju aktif menjaring harapan masyarakat yang tercermin dari respon positif terhadap layanan publik, seperti yang tergambarkan dalam *word cloud* aspirasi masyarakat. Kata-kata seperti "*terima kasih*", "*baik*", "*puas*", serta "*pertahankan*" menunjukkan adanya apresiasi masyarakat atas kinerja yang sudah berjalan.

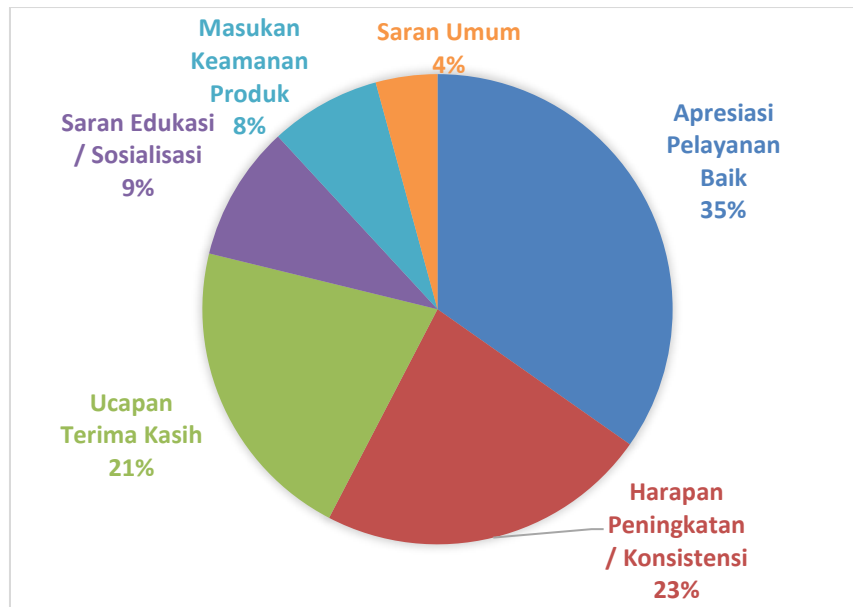
Sebagai wilayah dengan keragaman geografis dan aksesibilitas yang berbeda-beda, Balai POM di Mamuju perlu terus berinovasi dalam memperluas jangkauan pengawasan, termasuk melalui digitalisasi layanan, edukasi publik, dan peningkatan koordinasi lintas sektor. Hal ini akan memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil dan pesisir, memperoleh akses terhadap produk obat dan makanan yang aman dan berkualitas.

Aspirasi masyarakat Mamuju juga memberi wawasan tentang pentingnya menyesuaikan kebijakan pengawasan dengan realitas lokal, seperti pola konsumsi masyarakat yang mulai bergeser, meningkatnya penggunaan kosmetik dan suplemen, serta tantangan distribusi produk di wilayah dengan infrastruktur terbatas.

Sebagai bagian dari penyusunan Rencana Strategis Balai POM di Mamuju 2025–2029, masukan dari masyarakat akan menjadi dasar pengembangan strategi yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pengawasan obat dan makanan yang tidak hanya patuh regulasi, namun juga relevan dengan kebutuhan lokal.

Balai POM di Mamuju mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus aktif memberikan masukan dan pengawasan sosial terhadap peredaran obat dan makanan. Partisipasi ini akan menjadi kekuatan bersama dalam memastikan masyarakat Sulawesi Barat hidup sehat dan terlindungi dari risiko konsumsi produk yang tidak aman. Terkait hal ini aspirasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Balai POM di Mamuju dalam menyusun perencanaan program pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM di Mamuju menjaring *feedback* dan aspirasi masyarakat salah satunya melalui Survei Kesadaran Masyarakat (SKM) terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu serta Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan BPOM Tahun 2024. Survei ini dilakukan langsung kepada responden masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil survei tersebut, telah dilakukan analisis data kualitatif atas *feedback* yang diberikan oleh masyarakat. Berikut di bawah ini adalah hasil analisis *wordcloud* dari *feedback* dan saran masukan dari masyarakat.

Beberapa frasa yang sering muncul antara lain “Terima Kasih”, “Baik”, dan “Pertahankan”, serta lainnya seperti terlihat pada gambar di atas. Seluruh saran dan masukan masyarakat juga telah diklusterisasi dan diperoleh data bahwa responden mayoritas memberikan masukan kualitas pelayanan dipertahankan atau ditingkatkan, edukasi masyarakat lebih diperluas dan pengawasan produk tetap ditingkatkan.



Gambar 1.4 Hasil Klasterisasi Saran dan Masukan
Sumber : Aplikasi SAPA APIP BPOM Diolah Penyusun, 2025

Berdasarkan hasil klasterisasi saran dan analisis *word cloud* diatas dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut.

- Balai POM di Mamuju agar mempertahankan kualitas pelayanan
- Balai POM di Mamuju dapat memperluas jangkauan layanan edukasi dan pengawasan hingga ke daerah pelosok / yang belum pernah dijangkau
- Balai POM di Mamuju secara intensif melakukan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat
- Balai POM di Mamuju secara intensif memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Balai POM di Mamuju Tahun 2025–2029, pemahaman terhadap potensi dan permasalahan menjadi dasar penting bagi Balai POM di Mamuju dalam merumuskan strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan

global dan nasional. Sebagai satuan kerja mandiri di bawah Badan POM RI, Balai POM di Mamuju sebagai UPT yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Indonesia, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan public khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatanyang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi.

Masa depan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, BPOM dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi Balai POM di Mamuju dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Mengintegrasikan potensi dan menanggulangi permasalahan dalam konteks agenda pembangunan nasional menjadi prioritas dalam Rencana Strategis Balai POM di Mamuju 2025-2029. Strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman kesehatan yang akan muncul, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, BPOM diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan produk obat dan makanan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu Balai POM di Mamuju tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan

masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Balai POM di Mamuju menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Balai POM di Mamuju periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal Balai POM di Mamuju, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

1.2.1 Kekuatan (*Strength*)

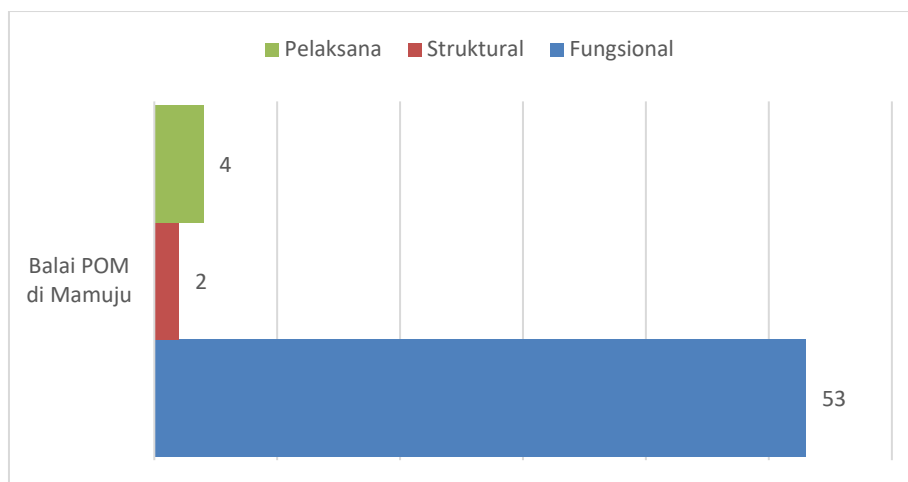
Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki

BPOM, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan BPOM keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi BPOM di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh BPOM, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

- 1) Pengalaman dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia (SDM)
Balai POM di Mamuju

Balai POM di Mamuju didukung oleh para profesional yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga keamanan obat dan makanan bagi masyarakat. Dengan pengetahuan teknis mendalam dan keterampilan analitis yang modern, kualitas sumber daya manusia di Balai POM di Mamuju mencerminkan standar tinggi di bidangnya.

Pengalaman dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh SDM Balai POM di Mamuju merupakan aset penting dalam evaluasi dan pengawasan produk. SDM Balai POM di Mamuju terdiri dari ahli-ahli diberbagai bidang, yang mampu melakukan analisis ilmiah dan teknis yang komprehensif terhadap obat dan makanan. Untuk dapat melakukan pengawasan obat dan makanan, dibutuhkan kompetensi teknis dengan kriteria spesifik sesuai dengan tugas, spesialisasi, dan fungsi pada setiap jabatannya. Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi teknis spesifik tersebut, Balai POM di Mamuju memiliki 11 (Sebelas) Jabatan Fungsional dengan kompetensi teknis maupun spesialisasi jabatan yang spesifik. Sampai dengan 30 Juni 2025, sebanyak 53 pegawai merupakan Pejabat Fungsional yang memiliki kompetensi teknis dan keahlian spesifik tertentu dalam bidang keilmuan atau keterampilan teknis. 67,80% dari pegawai tersebut merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi Makanan, terdiri dari 21 pegawai dengan spesialisasi pada fungsi pengujian, 10 pegawai dengan spesialisasi fungsi pemeriksaan, 6 pegawai dengan spesialisasi fungsi penyuluhan, 4 pegawai dengan spesialisasi fungsi penindakan. Kompetensi teknis maupun spesialisasi tersebut sangat penting dalam mengidentifikasi risiko, menilai keamanan produk, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berbasis bukti ilmiah. Tidak hanya Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Balai POM di Mamuju juga didukung dengan 24,53% Jabatan Fungsional lainnya seperti dibawah ini:



Gambar 1.5 Pegawai Berdasarkan Tipe Pegawai
Sumber: SIASN BPOM Per 30 Juni 2025 Diolah Penyusun, 2025

Tabel 1.2 Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai
1	Pengawas Farmasi dan Makanan	40
2	Pranata SDM Aparatur Terampil	1
3	Arsiparis Ahli Pertama	1
4	Penata Laksana Barang Terampil	2
5	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
6	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2
7	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
8	Perencana Ahli Pertama	2
9	Arsiparis Terampil	1
10	Analisis Anggaran Ahli Pertama	1
11	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1
Jumlah		53

Sumber: SIASN BPOM Per 30 Juni 2025 Diolah Penyusun, 2025

Penguatan kompetensi teknis dan spesialisasi jabatan Sumber Daya Manusia (SDM) Balai POM di Mamuju merupakan strategi utama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta pengembangan regulasi yang adaptif terhadap dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan seperti munculnya produk inovatif, bahan dan kontaminan baru, serta kebutuhan akan metodologi pengujian

terkini, menuntut penguatan kapabilitas SDM secara berkelanjutan. Untuk memastikan kemampuan tersebut tetap terjaga dan berkembang, Balai POM di Mamuju secara rutin mengikuti pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi seluruh SDM-nya. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek pengawasan hingga pemahaman tentang inovasi teknologi yang dapat mempengaruhi regulasi pengawasan.

Seluruh pencapaian ini mencerminkan komitmen Balai POM di Mamuju dalam membangun SDM yang adaptif, profesional, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan kompetensi dan pengalaman teknis yang solid, Balai POM di Mamuju mampu merancang strategi pengawasan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan inovatif, demi menjamin perlindungan kesehatan masyarakat secara optimal. Hal ini memperkuat posisi Balai POM di Mamuju sebagai institusi yang terus bertransformasi mengikuti kemajuan teknologi dan kebutuhan zaman.

Balai POM di Mamuju memiliki sumber daya manusia dengan pengalaman dan kompetensi teknis yang kuat di bidang pengawasan obat dan makanan. SDM fungsional yang terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pengawas Farmasi dan Makanan dari beberapa fungsi tentunya memiliki kemampuan yang saling melengkapi dalam menjalankan fungsi pengawasan produk beredar sampai dengan penegakan hukum.

Kompetensi tersebut secara nyata berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan, melalui pelaksanaan oleh kelompok kerja fungsi jabatan pemeriksaan melalui pemeriksaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan seperti adanya *WhatsApp Group* lintas tim kerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi sampling berbasis risiko agar tidak terjadi duplikasi sampel. Selain itu, pada fungsi pengujian telah dilaksanakan inovasi pengujian cepat untuk kasus obat, yaitu

penyelesaian dalam 3 Hari Kerja (HK) dari maksimal waktu 15 HK. Pada saat yang bersamaan, fungsi penindakan juga melakukan pengumpulan seluruh bukti terkait suatu perkara pelanggaran di bidang obat dan makanan. Kedua fungsi tersebut merupakan bentuk kolaborasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju.

2) Laboratorium Terakreditasi ISO/IEC 17025 : 2027

Laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat. Dalam hal pelaksanaan fungsi Pengujian produk sediaan farmasi dan pangan olahan secara laboratoris, Balai POM di Mamuju Memiliki 3 Gedung Laboratorium yaitu Gedung Laboratorium Teranakoko, Gedung Laboratorium Pangan dan Gedung Laboratorium Mikrobiologi. Proses pengujian produk dilakukan di masing-masing laboratorium tergantung pada jenis produk yang diuji. Penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017 pada laboratorium dapat menjadi bukti nyata atas kompetensi dan keandalan. Akreditasi ini menunjukkan bahwa laboratorium telah menjalani evaluasi menyeluruh oleh badan akreditasi yang independen, memastikan bahwa semua proses pengujian telah memenuhi standar. SNI ISO/IEC 17025:2017 menetapkan sistem manajemen mutu yang terstandarisasi, memastikan bahwa laboratorium dapat menghasilkan hasil pengujian yang konsisten dan andal.

Sertifikasi SNI ISO/IEC 17025:2017 juga meningkatkan kredibilitas laboratorium serta meningkatkan kepercayaan dalam hasil pengujian yang dilakukan. Dengan demikian kepercayaan masyarakat dan efektifitas pengawasan melalui tindak lanjut hasil pengujian semakin meningkat. Adanya akreditasi ini juga membuka peluang untuk peningkatan kolaborasi lintas sektor, antarlain dengan pemerintah daerah (UPTD Labkesmas dan OPD terkait)

dalam pengawasan obat dan makanan di daerah, dengan Universitas dalam kegiatan penelitian serta dengan kepolisian dalam mendukung kegiatan penegakan hukum melalui pengujian sampel kasus.

Penerapan ISO/IEC 17025 pada laboratorium sejalan dengan ISO 9001: 2015 dan ISO 37001;2016, yang secara bersama-sama memastikan bahwa hasil pengujian diperoleh secara valid dan akurat oleh tim yang kompeten, melalui pelaksanaan proses pengujian sesuai standar, serta pelaporan hasil yang dilakukan secara objektif tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Laboratorium pengujian Balai POM di Mamuju telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025 : 2017 pada tahun 2023 dan berhasil mempertahankan status akreditasi pada tahun 2024. Laboratorium pengujian Balai POM di Mamuju telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025 : 2017 pada bidang pengujian Kimia dengan ruang lingkup pengujian Obat, Kosmetik, dan Pangan. Akreditasi ini menandakan bahwa laboratorium Balai POM di Mamuju memiliki sistem manajemen mutu laboratorium yang diakui secara global, metode uji terstandar dan tervalidasi sehingga menjamin hasil uji yang akurat, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam konteks pengawasan obat dan makanan, hal ini bukan hanya simbol mutu, tetapi menjadi pondasi kredibilitas ilmiah dalam proses penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.

3) Kolaborasi dengan Lintas Sektor Pusat dan Daerah Yang Aktif

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan POM di daerah, Balai POM di Mamuju memiliki kekuatan strategis dalam menjalin kerja sama lintas sektor yang aktif dan terintegrasi ditingkat pusat maupun daerah. Kolaborasi ini menjadi pilar penting dalam meningkatkan efektivitas penyidikan dan memperluas jangkauan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja yang luas dan menantang secara geografis.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Balai POM di Mamuju rutin berkoordinasi dan membangun sinergi dengan berbagai instansi pusat seperti BPOM RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Dalam Negeri, serta dengan instansi daerah seperti seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal penindakan kejahatan obat dan makanan, kolaborasi ini tidak hanya mencakup pelaksanaan operasi penindakan, tetapi juga koordinasi intelijen pengawasan, pertukaran informasi, serta fasilitasi penyelesaian perkara hukum terkait pelanggaran pidana di bidang obat dan makanan.

Balai POM di Mamuju memiliki struktur organisasi dan sistem kerja yang memungkinkan fleksibilitas dalam menjalin kemitraan dengan berbagai instansi baik di tingkat pusat maupun daerah. Adanya fungsi koordinatif dalam pelaksanaan pengawasan serta dukungan dari pimpinan menjadikan kolaborasi sebagai bagian dari budaya kerja.

Pegawai Balai POM di Mamuju memiliki pengalaman dan kapasitas teknis yang cukup untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan. Kemampuan ini sangat mendukung dalam menjelaskan kebijakan, menyampaikan hasil pengawasan, serta mengadvokasi tindak lanjut secara lintas sektor.

Kolaborasi dengan lintas sektor telah menunjukkan hasil konkret, seperti terlaksananya KIE dan program prioritas nasional Badan POM, pengawasan terpadu jelang hari besar keagamaan, penertiban produk ilegal, operasi terkait penindakan kejahatan obat dan makanan, serta kegiatan pembinaan terpadu terhadap pelaku usaha pangan olahan dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P) . Keberhasilan ini memperkuat kepercayaan mitra dan memudahkan kolaborasi berikutnya. Dengan demikian, kolaborasi lintas sektor yang aktif bukan hanya mendukung pelaksanaan tugas teknis

pengawasan, tetapi juga menjadi kekuatan fundamental dalam membangun sistem pengawasan yang adaptif, kredibel, dan berkelanjutan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju.

Kolaborasi yang aktif ini ditunjukkan dengan terbentuknya Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di tingkat Pemerintah Provinsi serta mencangkup seluruh Kabupaten yang berada di wilayah Sulawesi Barat. Tim Koordinasi ini bergerak aktif dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan secara terpadu sehingga pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dapat berjalan sinergi dan tidak tumpang tindih. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan makanan dengan nilai 81,98 pada tahun 2024 yang meningkat signifikan dari nilai 72 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan perkembangan kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Sulawesi Barat sebesar 123,44%.

Balai POM di Mamuju telah menginisiasi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pihak, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Kepolisian, BNN, dan perangkat daerah lain yang relevan. Kolaborasi ini tidak sebatas pada kegiatan koordinatif, tetapi telah menghasilkan sinergi nyata dalam pengawasan dan pembinaan pelaku usaha di lapangan.

Arah strategis kolaborasi ini difokuskan pada penerapan pendekatan *multi-agency* dan *whole-of-government*, di mana data dan sumber daya lintas instansi seperti data dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop), BPS (Badan Pusat Statistik) dan Dinas Kesehatan dapat dimanfaatkan secara efisien melalui *data sharing* dan sistem pelaporan terpadu. Kolaborasi tersebut juga menjadi landasan dalam memperkuat respon cepat terhadap isu keamanan pangan dan penyalahgunaan obat di daerah. Dengan demikian, kolaborasi lintas sektor bukan sekadar kegiatan kemitraan, tetapi telah menjadi bagian

dari tata kelola pengawasan modern yang berbasis kolaborasi antar instansi pemerintah dan berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

4) Komunikasi Internal yang Solid

Balai POM di Mamuju memiliki fondasi komunikasi internal yang kuat dan efektif. Setiap fungsi jabatan mampu membangun sinergi melalui koordinasi yang terbuka, responsif, dan kolaboratif. Ini ditandai dengan kelancaran pertukaran informasi dari pimpinan hingga staf, serta adanya forum-forum internal seperti grup komunikasi, diskusi lintas fungsi, rapat evaluasi/ diskusi rutin dengan umpan balik dua arah, dan pelibatan seluruh lapisan pegawai dalam proses evaluasi dan perencanaan.

Komunikasi internal yang solid berdampak langsung pada kecepatan pengambilan keputusan, kelancaran pelaksanaan tugas, serta pemahaman bersama atas arah kebijakan dan prioritas kerja. Hal ini juga mendukung terbentuknya lingkungan kerja yang produktif.

Komunikasi internal yang solid menjadi landasan penting dalam menjalankan tugas dan fungsi Balai POM di Mamuju sebagai lembaga pengawas yang responsif. Komunikasi internal yang efektif berperan penting dalam meningkatkan efisiensi serta kualitas pengambilan keputusan di Balai POM di Mamuju.

Dengan adanya saluran komunikasi terbuka seperti rapat koordinasi, apel pagi dan *WhatsApp Group* (WAG) internal, arus informasi di Balai POM di Mamuju berjalan lancar dan transparan di antara seluruh fungsi terkait, proses koordinasi menjadi lebih cepat, risiko miskomunikasi berkurang, dan keputusan dapat diambil berdasarkan data serta masukan yang akurat. Dengan demikian, organisasi mampu merespon perubahan lebih sigap dan mengalokasikan sumber daya secara optimal.

Untuk memperkuat sistem komunikasi internal, organisasi akan dilakukan beberapa hal berikut.

- Mengoptimalkan penggunaan *collaborative digital tools*, seperti *Microsoft Teams*, dan *Google Workspace*, guna memfasilitasi pertukaran informasi real-time dan kolaborasi lintas fungsi
- Menerapkan kanal komunikasi dua arah, agar setiap pegawai dapat memberikan umpan balik dan ide tanpa hambatan
- Membangun budaya komunikasi terbuka, dengan pelatihan rutin, forum diskusi internal, dan *leadership briefing* melalui apel pagi untuk memastikan keselarasan visi antar fungsi

Dengan komunikasi yang efektif menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan selaras dengan tujuan strategis organisasi seperti:

- Produktivitas meningkat, karena pekerjaan diselesaikan lebih cepat dengan kesalahan minimal
- Motivasi dan kepuasan kerja pegawai naik, berkat rasa keterlibatan dan kejelasan peran
- Kinerja organisasi secara keseluruhan meningkat, karena keputusan yang diambil lebih tepat, efisien, dan berorientasi hasil dan selaras dengan tujuan strategis organisasi

5) Komitmen Kepemimpinan yang Kuat

Konsistensi perolehan penghargaan selama periode 2020–2025 mencerminkan komitmen kepemimpinan dalam membangun tata kelola berbasis kinerja, budaya organisasi yang adaptif, serta implementasi Reformasi Birokrasi (RB) yang berkelanjutan. Pencapaian keberhasilan organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dibuktikan dengan Pelayanan Publik dengan Kategori Pelayanan Prima sejak tahun 2021. Selain itu pimpinan juga memiliki komitmen kuat dalam memperkuat kapabilitas SDM, memastikan akuntabilitas anggaran, dan mendorong kolaborasi lintas sektor. Hal ini sejalan dengan tercapainya indikator RB dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang merupakan bukti nyata transformasi organisasi menuju birokrasi yang profesional, efektif, dan berdampak bagi masyarakat.

Konsistensi perolehan penghargaan menunjukkan tata kelola berbasis kinerja dan budaya organisasi yang kompetitif. Adapun beberapa penghargaannya sebagai berikut:

- a) Penghargaan IP ASN Peringkat Ke-2 Badan POM (Kategori Balai) Tahun 2022
 - b) Penghargaan sebagai Juara 1 dalam Lomba Sekolah dengan PJAS Aman di masing-masing tingkat SMP/MTS dan SMA/MA untuk regional timur Tahun 2023
 - c) Peringkat ke-1 Nilai IKPA Terbaik Semester I TA 2023 oleh KPPN di Mamuju
 - d) Penghargaan The Best HR manager Terbaik III 10 Oktober 2024
 - e) Penghargaan Balai Terbaik 1 Kategori Penggalangan Pemangku Kepentingan dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2025
- 6) Komitmen Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Inovasi

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan strategi nasional yang menjadikan TIK sebagai kekuatan penggerak utama reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Program nasional ini menjadi kewajiban bagi instansi Kementerian dan Lembaga yang akan mewujudkan percepatan transformasi digital layanan publik instansi termasuk Balai POM di Mamuju sebagai UPT dari BPOM. Dalam implementasi SPBE, Balai POM di Mamuju berkomitmen penuh dalam pemanfaatan TIK untuk mendukung layanan pemerintah yang diselenggarakan di BPOM, hal ini dibuktikan dengan pencapaian nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Mamuju yang optimal mencapai nilai 3 dengan kriteria Sangat Optimal.

Di sisi lain, Balai POM di Mamuju mendukung penuh digitalisasi proses kerja BPOM merevolusi cara lembaga ini beroperasi dan

berinteraksi dengan stakeholder. Implementasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi, penggunaan aplikasi mobile untuk pemantauan dan pelaporan, serta pengembangan platform online untuk registrasi dan sertifikasi produk, semua memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh publik. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses pengawasan dan pengujian, tetapi juga mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara BPOM, industri, dan masyarakat.

Balai POM di Mamuju telah menginisiasi pemanfaatan berbagai platform digital seperti aplikasi e-Sertifikasi, e-Pengaduan seperti Sang Integritas BPOM, SP4N Lapor BPOM, Inovasi WALI (WA Lincih) dan Media Sosial Balai POM di Mamuju, SIPT, serta *dashboard* pelaporan hasil pengawasan. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelaksanaan pengawasan lapangan, tetapi juga memperkuat sistem *traceability* produk — mulai dari produsen hingga ke konsumen.

Dalam konteks daerah yang memiliki karakteristik geografis tersebar seperti Sulawesi Barat, digitalisasi ini menjadi instrumen penting untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan logistik. Penggunaan *real-time monitoring* misalnya, memungkinkan tindak lanjut cepat terhadap produk yang terindikasi berisiko atau melanggar ketentuan. Inovasi tersebut memperluas jangkauan pengawasan dan meningkatkan *situational awareness* terhadap peredaran obat dan makanan.

7) Komitmen Kelembagaan yang Kuat (Penerapan ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016)

Komitmen kelembagaan yang kuat berarti adanya kesadaran bersama, tanggung jawab kolektif, dan keberpihakan organisasi secara menyeluruh terhadap penerapan dan penguatan sistem manajemen mutu. Komitmen kelembagaan mengacu pada tekad,

konsistensi, dan kesinambungan organisasi secara menyeluruh mulai dari pimpinan hingga seluruh pegawai dalam mengadopsi dan menjalankan prinsip-prinsip sistem manajemen mutu dan sistem manajemen anti penyuapan. Di Balai POM di Mamuju, komitmen kelembagaan ini menjadi pondasi utama keberhasilan implementasi ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016.

Komitmen kelembagaan Balai POM di Mamuju dalam menjamin mutu, integritas, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan tercermin dari keberhasilan penerapan tiga standar manajemen internasional, yaitu ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan), dan ISO/IEC 17025:2017 (Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian). Ketiganya membentuk fondasi kelembagaan yang kokoh dalam memastikan pengawasan yang kredibel, transparan, dan berintegritas tinggi.

Melalui penerapan ISO 9001:2015, Balai POM di Mamuju telah membangun sistem kerja yang sistematis dan terdokumentasi di seluruh lini proses pengawasan — mulai dari pelayanan publik, inspeksi sarana, hingga tindak lanjut hasil pengujian. Penerapan standar mutu ini memastikan bahwa setiap pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan konsistensi, efisiensi, dan berorientasi pada peningkatan kepuasan publik. Prinsip *continuous improvement* yang melekat pada ISO 9001 menjadikan organisasi senantiasa adaptif terhadap perubahan regulasi dan tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat dan transparan.

Di sisi lain, penerapan ISO 37001:2016 memperkuat komitmen Balai POM di Mamuju terhadap integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Sistem ini memberikan kerangka kerja yang jelas dalam mencegah, mendeteksi, dan menindak potensi praktik penyuapan atau benturan kepentingan di seluruh proses pengawasan. Melalui fungsi kepatuhan anti penyuapan (FKAP), penilaian risiko integritas, serta kebijakan deklarasi benturan kepentingan, Balai POM di

Mamuju memastikan bahwa seluruh kegiatan pengawasan berjalan dengan prinsip *zero tolerance terhadap korupsi*. Hal ini menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap hasil pengawasan dan mendukung penguatan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Kombinasi antara mutu proses, integritas kelembagaan, dan kredibilitas teknis menjadi pilar utama dalam membangun Balai POM di Mamuju sebagai lembaga pengawasan yang profesional dan terpercaya. Dengan landasan ini, Balai POM di Mamuju mampu mengoptimalkan peran strategisnya dalam melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan, sekaligus mendukung terwujudnya misi reformasi birokrasi tematik menuju pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani.

Komitmen kelembagaan yang kuat merupakan kekuatan strategis Balai POM di Mamuju dalam penerapan ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016. Komitmen ini tidak hanya ditunjukkan melalui kebijakan, tetapi juga melalui praktik kerja, struktur pendukung, dan budaya organisasi. Dengan komitmen tersebut, Balai POM di Mamuju telah membangun sistem mutu yang stabil dan responsif, menumbuhkan budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan terstandar serta memperkuat akuntabilitas pelayanan publik yang profesional dan bersih sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan negara.

Dengan penerapan 2 (Dua) ISO yang konsisten, layanan pengujian sampel kasus obat dapat dipercepat dari 15 HK (Hari Kerja) menjadi 3 HK, selain itu temuan audit internal *NC (Non-Conformity/ Ketidaksesuaian)* juga mengalami perunanan dari 8 (delapan) di tahun 2022 hingga 2 (dua) di tahun 2024. Balai POM di Mamuju terus berkomitmen konsisten dalam penerapan ISO untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik.

8) Ekosistem Edukasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha yang Kuat

Balai POM di Mamuju memiliki kekuatan internal yang menonjol dalam hal pengembangan ekosistem edukasi dan pemberdayaan masyarakat serta pelaku usaha yang kuat dan berkelanjutan. Kekuatan ini tercermin dari upaya konsisten dalam melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang tidak hanya bersifat sosialisasi semata, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pentingnya keamanan obat dan makanan. Berbagai program strategis seperti Desa Pangan Aman, PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah), pendampingan UMKM, serta kegiatan penyuluhan langsung di tengah masyarakat menunjukkan bahwa edukasi telah menjadi bagian penting dari budaya kerja organisasi.

Selain itu, pendekatan pemberdayaan yang diterapkan bersifat inklusif dan mendorong partisipasi lintas sektor, termasuk dunia pendidikan, organisasi masyarakat, serta pelaku usaha mikro dan kecil. Balai POM di Mamuju tidak hanya hadir sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra pembina yang memberikan pendampingan teknis dan solusi praktis kepada masyarakat dan pelaku usaha agar mampu memenuhi standar keamanan dan mutu produk. Keberhasilan pendekatan ini juga didukung oleh citra positif lembaga di tengah masyarakat, yang melihat Balai POM sebagai institusi yang terbuka, edukatif, dan berpihak pada perlindungan konsumen.

Pemanfaatan media digital, sosial media, dan bentuk komunikasi kreatif lainnya turut memperluas jangkauan edukasi kepada kelompok masyarakat yang lebih luas, khususnya generasi muda dan pelaku usaha berbasis digital. Komitmen dalam membangun kemitraan dengan pemerintah daerah, dinas terkait, dan komunitas lokal juga memperkuat daya jangkau dan efektivitas dari program pemberdayaan yang dijalankan. Dengan seluruh elemen tersebut, Balai POM di Mamuju mampu membangun ekosistem edukasi yang

kuat, terintegrasi, dan menjadi salah satu keunggulan organisasi dalam mencapai tujuan pengawasan yang berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Wilayah Sulawesi Barat dalam program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA) sampai dengan tahun 2025 telah mencapai jangkauan intervensi yang cukup luas di wilayah Desa, Pasar, dan Sekolah. Jumlah Desa, Pasar, dan Sekolah yang telah diintervensi sampai dengan tahun 2025 yaitu sebanyak 33 Desa, 6 Pasar, dan 90 Sekolah. Dari hasil intervensi Germas SAPA ini diperoleh adanya peningkatan pengetahuan dan turunnya Penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan. Jumlah laporan kasus keracunan juga terjadi penurunan dari 92 kasus keracunan pada tahun 2020 menjadi 36 kasus keracunan ini menandakan dengan adanya perubahan sikap dan perilaku dari masyarakat yang diberdayakan hingga kekomunitas terkecil dapat berdampak pada menurunannya kasus keracunan yang terjadi.

Permberdayaan masyarakat selama tahun 2020-2024 secara aktif melibatkan tokoh masyarakat yang berdampak pada luasnya cakupan masyarakat yang diberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) sehingga dapat meningkatkan indeks kesadaran masyarakat yang meningkat menjadi 80,67 pada tahun 2024 dari nilai yang pada tahun 2020 hanya 64,86.

Komitemen pemberdayaan masyarakat ini juga senantiasa melibatkan pemerintah daerah sehingga pelaksanaan program dapat terus konsisten terlaksana dan berkelanjutan. Wujud komitmen ini tertuang dari terbentuknya jejering Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makan di seluruh kabupaten diwilayah Sulawesi Barat dalam bentuk Surat Keputusan Bupati masing masing Kabupaten tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan.

- 9) Kemampuan Adaptif Dalam Mengikuti Dinamika Regulasi dan Inovasi Teknologi Untuk Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk

Balai POM di Mamuju menunjukkan kekuatan internal yang signifikan melalui kemampuannya yang adaptif dalam mengikuti dinamika regulasi dan perkembangan inovasi teknologi, khususnya dalam mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap keamanan dan mutu produk. Dalam lingkungan regulasi yang terus berubah dan semakin kompleks, organisasi ini mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap kebijakan dan peraturan baru yang ditetapkan oleh BPOM pusat maupun oleh pemerintah secara nasional. Adaptasi ini tercermin dalam kemampuan pegawai, khususnya pada fungsi jabatan pemeriksaan, dalam memahami dan mengimplementasikan ketentuan teknis maupun administratif terbaru yang berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan.

Kemampuan adaptif ini juga diperkuat oleh kesiapan organisasi dalam mengadopsi berbagai teknologi digital dan sistem informasi yang dikembangkan untuk menunjang efektivitas kerja. Balai POM di Mamuju secara aktif menggunakan berbagai aplikasi berbasis teknologi informasi seperti sistem pelaporan elektronik, dashboard pengawasan (e-was BPOM dan Cek BPOM), dan sistem informasi pengelolaan data sarana (e-was BPOM), yang tidak hanya mempercepat proses kerja, tetapi juga meningkatkan akurasi data dan transparansi pelaksanaan tugas. Kesiapan dalam pemanfaatan teknologi ini didukung oleh peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, pendampingan, serta adanya komitmen pimpinan dalam membangun budaya kerja yang responsif terhadap perubahan.

Selain itu, organisasi ini juga mendorong inovasi dalam praktik kerja sehari-hari sebagai bagian dari upaya penyesuaian terhadap kebutuhan lapangan dan tantangan yang dihadapi, termasuk dalam merespons isu-isu keamanan produk, distribusi ilegal, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Fleksibilitas dalam menyusun strategi pengawasan, kemampuan merespon cepat terhadap temuan lapangan, serta keterbukaan terhadap pembaruan sistem menjadi

bagian dari kekuatan yang memungkinkan Balai POM di Mamuju tetap relevan dan efektif dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Dengan kemampuan adaptif tersebut, Balai POM di Mamuju tidak hanya mampu mempertahankan kinerja pengawasan di tengah dinamika kebijakan dan kemajuan teknologi, tetapi juga terus meningkatkan kualitas layanannya kepada masyarakat dan pelaku usaha, menjadikannya sebagai salah satu keunggulan strategis dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Balai POM di Mamuju menunjukkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebijakan nasional seperti penerapan *Risk-Based Supervision*, integrasi OSS-RBA, serta harmonisasi standar pengawasan obat dan makanan dalam konteks *ASEAN Regulatory Framework*. Adaptivitas ini tercermin dalam kemampuan merespons perubahan regulasi teknis, seperti standar keamanan pangan olahan, pengawasan obat tradisional berbasis bahan alam, dan kosmetik dengan klaim kesehatan.

Di tingkat operasional, kemampuan adaptif tersebut juga terlihat dalam penerapan pendekatan kolaboratif bersama Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, hingga ke Perangkat Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Kepolisian, dan Satpol PP, untuk mengatasi munculnya produk ilegal di pasar lokal. Hal ini mencerminkan keunggulan kelembagaan yang tangguh terhadap perubahan lingkungan regulatif maupun teknologi.

10) Memiliki Strategi dan Saluran Komunikasi Publik Eksternal dan Internal Yang Dikelola dengan Baik

Salah satu kekuatan utama yang dimiliki oleh Balai POM di Mamuju dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah adanya strategi serta saluran komunikasi publik, baik internal maupun eksternal, yang dikelola dengan baik. Strategi komunikasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat strategis dalam mendukung kelancaran koordinasi internal serta peningkatan efektivitas penyampaian

informasi kepada masyarakat luas. Keberadaan strategi komunikasi ini berperan penting sebagai penghubung antara Balai POM di Mamuju dengan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pelaku usaha, media massa, instansi pemerintah dan mitra pengawasan lainnya. Balai POM di Mamuju menyadari bahwa komunikasi yang efektif merupakan fondasi dalam membangun organisasi yang transparan, responsif, dan akuntabel. Oleh karena itu, seluruh unit kerja di Balai POM di Mamuju terlibat aktif dalam pelaksanaan strategi komunikasi ini. Komunikasi internal dijalankan melalui mekanisme formal seperti rapat koordinasi, diskusi lintas bidang, serta penggunaan media digital seperti grup komunikasi dan platform berbagi dokumen, yang memungkinkan arus informasi berjalan dua arah dan. Hal ini turut mendorong efisiensi kerja tim serta meningkatkan rasa memiliki terhadap tujuan dan target organisasi.

Sementara itu, komunikasi eksternal dikembangkan melalui pemanfaatan berbagai saluran yang relevan dan menjangkau sasaran secara luas. Balai POM di Mamuju menggunakan website resmi, media sosial, media cetak dan elektronik, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan tatap muka seperti sosialisasi, edukasi publik, dan pengawasan bersama dengan lintas sektor. Strategi ini tidak hanya menyampaikan informasi satu arah, melainkan juga membuka ruang interaksi dengan masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, ataupun pengaduan. Hal ini dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan, isu strategis yang sedang berkembang, serta target audiens yang hendak dicapai.

Penerapan komunikasi yang terstruktur ini juga dilakukan secara berkala dalam setiap momentum penting, seperti penguatan pengawasan pangan selama hari besar keagamaan, edukasi keamanan sediaan farmasi dan makanan, dan respon terhadap isu-isu viral yang membutuhkan klarifikasi resmi dari BPOM. Informasi

disampaikan dalam format yang mudah dipahami, komunikatif, dan menarik agar mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Keberhasilan Balai POM di Mamuju dalam mengelola strategi komunikasi yang terintegrasi ini tidak terlepas dari adanya komitmen manajerial, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, serta keterbukaan terhadap inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Secara tidak langsung, hal ini telah memperkuat citra positif BPOM di mata masyarakat dan mitra kerja, sekaligus meningkatkan partisipasi aktif publik dalam mengawasi peredaran obat dan makanan. Dengan kata lain, keberadaan strategi dan saluran komunikasi yang baik ini menjadi modal penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi BPOM, serta dalam menjawab tuntutan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang semakin tinggi dari waktu ke waktu.

Balai POM di Mamuju melalui berbagai inovasi yang berbasis digital telah melakukan respon yang cepat terhadap permintaan informasi dan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat. Balai POM di Mamuju mengembangkan aplikasi WALI (Whatsapp lincah) yang dilengkapi dengan autoresponder sehingga dapat menjawab pertanyaan dengan lebih cepat dan tanpa batasan waktu yaitu 24 jam. Dan melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan yang diberikan oleh masyarakat lebih cepat dari batu muti yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Balai POM di Mamuju juga berkomitmen menyajikan informasi publik yang seluas luasnya kepada masyarakat melalui pengembangan subsite BPOM yang berisi informasi setiap saat, serta mmerta dan berkala yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan informasi terkait pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Mamuju. Hal ini berdampak pada peningkatan nilai indeks pelayanan publik Balai POM di Mamuju yang pada tahun 2020 hanya memperoleh nilai 3,49 dengan kategori baik meingkat menjadi 4,78 pada tahun 2024 dengan kategori pelayanan prima.

1.2.2 Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan obat dan makanan yang terus meningkat, Balai POM di Mamuju tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Balai POM di Mamuju menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja Balai POM di Mamuju dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan yang dimiliki oleh Balai POM di Mamuju, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1) Kebijakan Rotasi Internal Sumber Daya Manusia (SDM) Belum Dilaksanakan Secara Berkala

Rotasi SDM adalah kebijakan organisasi atau manajemen dengan melakukan mutasi atau memindahkan pegawai dari satu fungsi ke fungsi yang lain dalam periode waktu tertentu, kebijakan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai . Kebijakan Rotasi Internal di Balai POM di Mamuju telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai yang rencana akan dilakukan dalam periode waktu 2 tahun sekali namun sampai saat ini kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara berkala sehingga potensi munculnya berbagai dampak negatif yang memengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan seperti:

- **Stagnasi Kompetensi dan Keterbatasan Wawasan**

Jika kebijakan rotasi internal tidak dilaksanakan secara berkala , pegawai cenderung terpaku pada satu bidang atau tugas saja. Hal ini dapat menghambat pengembangan kompetensi lintas bidang, seperti dari pengujian ke pengawasan lapangan, Akibatnya, wawasan dan keterampilan pegawai menjadi terbatas, menyulitkan mereka untuk beradaptasi dengan tugas baru atau tantangan yang kompleks.

- **Potensi Titik Korupsi dan Konflik Kepentingan**

Jika kebijakan rotasi internal tidak dilaksanakan secara berkala maka menempatkan pegawai terlalu lama di satu posisi, terutama yang memiliki wewenang besar (seperti inspeksi atau penindakan), dapat meningkatkan risiko terjadinya praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Ketiadaan rotasi membuat pegawai tersebut memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan pihak-pihak yang diawasi, membuka celah untuk terjadinya kolusi dan konflik kepentingan.

- **Ketergantungan Organisasi pada Individu**

Jika kebijakan rotasi internal tidak dilaksanakan secara berkala akan terjadi ketergantungan organisasi kepada pegawai yang menguasai suatu pekerjaan. Ketika pegawai tersebut pindah atau berhalangan hadir, maka pekerjaan untuk fungsi tersebut bisa terganggu. Rotasi akan menciptakan pengetahuan yang lebih luas, jika banyak pegawai menguasai berbagai tugas, maka roda operasional organisasi bisa berjalan terus menerus tanpa ketergantungan dengan salah satu individu atau pegawai.

- **Minimnya Inovasi dan Kehilangan Objektivitas**

Pegawai yang bekerja di posisi yang sama dalam waktu lama cenderung melakukan pekerjaan secara rutin tanpa inovasi. Mereka mungkin kurang termotivasi untuk mencari metode kerja baru atau memperbaiki proses yang sudah ada. Rotasi dapat membawa perspektif baru dan semangat kerja yang segar ke dalam sebuah unit. Menerapkan rotasi internal secara berkala sangat penting untuk membangun SDM yang fleksibel, profesional, dan berintegritas tinggi. Dengan demikian, Balai POM di Mamuju dapat menghadapi tantangan pengawasan yang semakin dinamis.

Kebijakan rotasi internal Sumber Daya Manusia (SDM) pada dasarnya telah menjadi bagian dari sistem pengelolaan pegawai di lingkungan Balai POM di Mamuju. Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan rotasi belum dilakukan secara berkala

sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai POM di Mamuju.. Berdasarkan data yang tersedia, rotasi terakhir tercatat dilakukan pada awal tahun 2023 namun sampai akhir tahun 2025 belum dilakukan rotasi, sehingga belum mencerminkan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan sesuai prinsip *good governance*. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme rotasi masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi dalam sistem pengembangan karier pegawai. Selain itu, belum terdapat sistem monitoring dan evaluasi yang mengukur efektivitas kebijakan rotasi terhadap peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai. Akibatnya, potensi terjadinya stagnasi jabatan serta risiko rendahnya pembelajaran lintas fungsi masih cukup tinggi.

Untuk memperkuat tata kelola SDM, perlu dilakukan penerapan kebijakan rotasi yang berbasis pada analisis risiko jabatan dan kebutuhan kompetensi pegawai. Dengan pendekatan ini, rotasi tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk memperluas wawasan pegawai, meningkatkan fleksibilitas organisasi, serta memastikan terjadinya transfer pengetahuan antar fungsi.

Ke depan, organisasi perlu membangun mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan kebijakan rotasi dan mengukur dampaknya terhadap peningkatan kinerja individu maupun unit kerja. Langkah ini diharapkan dapat memastikan kebijakan rotasi berjalan konsisten, terarah, dan memberikan nilai tambah bagi efektivitas organisasi secara keseluruhan.

2) Transformasi Digital Belum Optimal

Salah satu kelemahan yang masih dihadapi Balai POM di Mamuju dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan publik adalah transformasi digital yang belum berjalan secara optimal. Hal ini menjadi tantangan tersendiri di tengah tuntutan era digitalisasi yang semakin berkembang dan ekspektasi publik terhadap pelayanan yang cepat,

transparan, serta mudah diakses. Transformasi digital yang dimaksud bukan hanya terkait dengan ketersediaan perangkat teknologi, melainkan juga mencakup perubahan budaya kerja, peningkatan literasi digital, pemanfaatan data secara real-time, serta integrasi sistem informasi antarunit dan antarinstansi.

Permasalahan ini muncul karena berbagai faktor. Pertama, dari segi transformasi digital, Balai POM di Mamuju telah memiliki beberapa infrastruktur dasar seperti aplikasi layanan informasi, media sosial resmi, serta dukungan dari sistem pusat BPOM. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut belum sepenuhnya maksimal. Banyak proses kerja yang masih bersifat manual atau semi-digital, sehingga belum memberikan efisiensi dan efektivitas yang diharapkan. Misalnya Pengelolaan data pengawasan, pelaporan kegiatan, serta respons terhadap aduan masyarakat belum terintegrasi dalam satu platform digital yang ringkas dan responsif.

Beberapa penyebab transformasi digital belum berjalan optimal utamanya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam hal literasi digital, belum meratanya pelatihan penggunaan sistem informasi, serta keterbatasan infrastruktur pendukung seperti konektivitas internet yang stabil, khususnya saat melaksanakan kegiatan di daerah terpencil. Selain itu, adaptasi terhadap perubahan digital membutuhkan waktu dan pendekatan yang menyeluruh, termasuk perubahan mindset seluruh pegawai, dari level pimpinan hingga pelaksana teknis.

Di satu sisi, pegawai internal Balai POM di Mamuju menjadi kelompok yang paling terdampak karena harus beradaptasi dengan sistem baru dan menjalankan tugas secara efisien. Di sisi lain, masyarakat sebagai penerima layanan juga mengalami dampaknya, terutama ketika akses terhadap informasi publik, pengaduan online, atau layanan edukasi tidak tersedia secara cepat dan user-friendly.

Untuk menjawab tantangan ini, Balai POM di Mamuju telah menyiapkan langkah bagaimana transformasi digital dapat dipercepat dan

dioptimalkan. Salah satunya yakni penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan intensif yang menysasar peningkatan keterampilan digital. Selain itu, perlu dikembangkan sistem informasi lokal yang dapat melengkapi atau mengisi celah dari sistem pusat yang belum mencakup kebutuhan spesifik wilayah. Evaluasi berkala atas penggunaan teknologi yang ada, serta keberanian untuk mereformasi proses kerja secara menyeluruh, menjadi bagian penting dalam memastikan transformasi digital bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar mendukung tercapainya pelayanan publik yang lebih baik dan pengawasan yang lebih efektif.

Meskipun pemanfaatan teknologi sudah berjalan, transformasi digital di Balai POM di Mamuju masih parsial dan belum terintegrasi ke seluruh proses bisnis pengawasan. Tantangan terbesar berada pada perubahan budaya kerja, literasi digital, dan kepemimpinan digital (*digital leadership*).

Sebagian proses pelaporan, pengarsipan, dan validasi data masih dilakukan secara manual sehingga memperlambat kecepatan respons pengawasan. Selain itu, belum tersusunnya *roadmap transformasi digital internal* menyebabkan upaya modernisasi sistem tidak memiliki arah strategis yang terukur. Padahal, pengawasan obat dan makanan memerlukan sistem informasi yang cepat, akurat, dan berkeamanan tinggi untuk mendukung analisis risiko, pengambilan keputusan, serta koordinasi lintas instansi.

3) Belum Tersedianya Gedung Administrasi dan Layanan Publik

Balai POM di Mamuju menjadi Satker Mandiri sejak Tahun 2017, namun sampai saat ini Balai POM di Mamuju belum memiliki gedung administrasi dan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan. Salah satu prasarana kantor adalah bangunan gedung kantor. Idealnya sebuah kantor pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan dan kepuasan terhadap masyarakat harusnya memiliki satu

gedung khusus untuk melakukan administrasi perkantoran dan pelayanan publik. Saat ini, Balai POM di Mamuju hanya memiliki bangunan laboratorium sebanyak 3 gedung dan belum memiliki gedung khusus administrasi dan pelayanan publik. Tahun 2020 telah melakukan pengajuan pembangunan gedung telah melalui RKBMN (Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara) dan disetujui namun tidak memiliki alokasi anggaran dan diajukan ulang Tahun 2021 jadi telah diajukan sebanyak 2 kali. Oleh karena itu untuk menjadi sebuah kantor yang ideal dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal, maka sangat diperlukan pembangunan gedung kantor dan pelayanan publik diatas tanah milik Balai POM di Mamuju. Pembangunan ini juga sangat penting karena Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah penunjang pembangunan Ibu Kota Negara Baru.

Gedung layanan publik dan administrasi menjadi kelemahan karena Ketiadaan gedung tersebut berdampak pada efektivitas koordinasi, keamanan dokumen, dan kenyamanan pelayanan publik. Dari sisi pelayanan publik masih terdapat ketidaksesuaian pemenuhan aspek layanan inklusif sehingga terjadi kesan diskriminatif terhadap kelompok rentan seperti pemenuhan ruang bermain anak, ruang laktasi dan meja layanan disabilitas yang belum memenuhi kriteria layanan inklusif menimbulkan kesan diskriminatif kepada masyarakat rentan yang berkunjung ke area layanan publik Balai POM di Mamuju sehingga gedung pelayanan publik menjadi penting untuk mendukung kinerja Balai POM di Mamuju.

Untuk mewujudkan layanan inklusif selain koordinasi intensif dengan BPOM RI, diperlukan juga kegiatan advokasi lintas sektor dengan Kementerian Keuangan/PUPR/Bappenas untuk percepatan dukungan anggaran. Sehingga gedung layanan publik dapat menjadi prioritas penganggaran di tahun tahun kedepan.

4) Sarana dan Prasarana Laboratorium Masih Terbatas

Laboratorium BPOM harus terus dikembangkan kapasitas dan kapabilitasnya agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini perlu didukung oleh dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Instrumen laboratorium merupakan peralatan utama yang diperlukan untuk memberikan hasil uji yang valid dan reliable. Laboratorium BPOM harus memiliki peralatan yang memadai dan sesuai standar sehingga pengujian dapat dilaksanakan sesuai lingkupnya.

Hasil monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium untuk 34 laboratorium Balai Besar POM/Balai POM pada tahun 2024 terpantau Balai POM di Mamuju memiliki kapasitas laboratorium yang masih rendah pada komponen pemenuhan standar peralatan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor ketersediaan sarana dan prasarana pengujian yang masih terbatas.

Kapasitas laboratorium Balai POM di Mamuju yang masih rendah pada komponen pemenuhan standar peralatan dapat mempengaruhi kecepatan layanan pengujian. Jumlah peralatan yang terbatas dapat mempengaruhi waktu tunggu pengujian sehingga waktu penyelesaian laporan hasil uji melampaui target layanan. Hal ini disebabkan oleh volume sampel yang harus diuji meningkat setiap tahun terutama sampel pihak ketiga yang tidak dapat diprediksi jumlahnya, frekuensi penggunaan peralatan yang meningkat serta proses antrean pengujian. Penggunaan peralatan yang meningkat juga dapat memperbesar risiko kerusakan atau gangguan operasional alat. Kerusakan pada peralatan yang tidak segera ditindaklanjuti menyebabkan laboratorium tidak dapat menjalankan pengujian untuk berbagai parameter dan mempengaruhi validitas hasil pengujian. Secara keseluruhan, keterbatasan sarana dan prasarana laboratorium menyebabkan keterlambatan analisis sampel dan berpotensi menurunkan daya tanggap terhadap isu keamanan pangan dan obat.

Untuk mewujudkan penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium dapat dilakukan pengadaan atau peningkatan peralatan pada

laboratorium berbasis hasil analisis risiko dan prioritas, optimalisasi pemanfaatan peralatan dan kompetensi antar laboratorium melalui mekanisme berbagi sumber daya atau kolaborasi uji silang antar laboratorium BPOM, serta meningkatkan kompetensi SDM teknis (penguji) dalam pengoperasian dan pemeliharaan peralatan utama agar pemanfaatan sarana lebih optimal.

5) Sistem TI Belum Terintegrasi Optimal

Keterbatasan sumber daya dan koordinasi menyebabkan integrasi data dan aplikasi di BPOM belum optimal. Sistem TI yang masih terpisah antar fungsi menghambat aliran informasi, memperlambat proses, dan menurunkan efisiensi operasional. Ketidadaan berbagi data yang lancar antar unit tidak hanya melemahkan koordinasi internal, tetapi juga memengaruhi kualitas layanan publik. Kondisi ini menimbulkan duplikasi pekerjaan, meningkatkan potensi kesalahan, serta mengancam integritas dan keamanan data yang menjadi dasar kepercayaan masyarakat.

Fragmentasi sistem TI juga melemahkan daya tanggap BPOM dalam menghadapi kebutuhan tindakan cepat, seperti penarikan produk atau situasi kedaruratan kesehatan. Keterlambatan komunikasi dalam kondisi demikian dapat menimbulkan konsekuensi serius. Karena itu, infrastruktur TI yang terintegrasi dan diperbarui secara berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi internal sekaligus memperkuat kemampuan BPOM dalam merespons dinamika industri obat dan makanan.

Data merupakan aset strategis bagi BPOM, namun pemanfaatannya masih belum optimal. Minimnya integrasi dan kemampuan analitik membatasi penggunaan data untuk memahami pola risiko dan mengembangkan analitik prediktif yang diperlukan untuk pengawasan yang proaktif. Tanpa dukungan teknologi big data dan analitik yang memadai, BPOM sulit berperan sebagai lembaga pengawas yang adaptif terhadap perubahan pasar dan ekspektasi publik.

Di sisi lain, keberhasilan transformasi digital BPOM sangat bergantung pada kecukupan dan kompetensi SDM TIK. Saat ini jumlah dan kompetensi SDM TIK belum memenuhi kebutuhan organisasi, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi.

Sebagian aplikasi BPOM juga masih menggunakan bahasa pemrograman lama, yang membatasi interoperabilitas, ketersediaan framework terkini, serta meningkatkan risiko keamanan. Dalam Rencana Strategis BPOM, tantangan ini menjadi prioritas untuk ditangani melalui pembangunan arsitektur TI terpadu. Langkah strategis meliputi standardisasi data, penyusunan protokol komunikasi antar sistem, pemutakhiran perangkat lunak, dan penerapan solusi interoperabilitas yang modern dan aman.

Salah satu kelemahan mendasar pelaksanaan pengawasan obat dan makanan adalah belum optimalnya integrasi sistem TI yang menghubungkan fungsi pengawasan pra-edar, post-edar, layanan laboratorium, dan penindakan—termasuk di Balai POM di Mamuju. Sistem informasi yang tersedia masih parsial, belum terhubung real-time, dan berjalan sektoral, misalnya pada pelaporan sampling, data pengujian laboratorium, tindak lanjut pengawasan, dan pelaporan kinerja. Akibatnya, terjadi fragmentasi data, redundansi pencatatan, serta keterlambatan analisis dan pengambilan keputusan.

6) Belum Tersedianya Sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Laboratorium dapat menjadi salah satu sumber penghasil limbah cair, yang berbahaya bila tidak ditangani secara benar. Karena itu pengolahan limbah harus dilakukan dengan semestinya agar tidak menimbulkan dampak negatif. Pengelolaan Limbah dari kegiatan di laboratorium merupakan aspek penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan manusia. limbah cair dari kegiatan di laboratorium memiliki sifat yang dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan jika tidak ditangani dengan benar. Prosedur pengelolaan Limbah dari

kegiatan di laboratorium yang tepat harus diterapkan untuk meminimalkan dampak negatifnya.

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah sistem yang dirancang untuk mengolah air Limbah dari kegiatan di laboratorium sebelum dibuang ke lingkungan agar tidak mencemari dan dapat digunakan kembali. IPAL berfungsi untuk menghilangkan kontaminan seperti zat organik, bahan kimia, dan mikroorganisme patogen, sehingga air tersebut bisa digunakan kembali dengan aman.

Laboratorium Balai POM di Mamuju saat ini belum memiliki fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Pada saat ini Laboratorium Balai POM di Mamuju bekerja sama dengan pihak eksternal dalam hal pemusnahan limbah cair dari kegiatan di laboratorium. Namun, limbah hasil pencucian alat gelas laboratorium masih dialirkan ke selokan pembuangan. Tidak adanya fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dikhawatirkan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan akibat hasil pencucian alat gelas laboratorium tersebut serta kondisi potensi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta perlindungan lingkungan hidup. Ketiadaan IPAL juga berpotensi bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, yang mengatur kewajiban setiap instansi atau fasilitas yang menghasilkan limbah cair untuk memastikan buangnya memenuhi standar baku mutu.

Dari sisi tata kelola, belum tersedianya IPAL menunjukkan perlunya adanya perencanaan dan pengawasan dalam aspek pengelolaan sarana prasarana pendukung operasional, termasuk integrasi kebijakan lingkungan dalam sistem manajemen kinerja instansi. Sehingga kedepannya dipandang perlu adanya :

- Kepatuhan hukum dan lingkungan dalam evaluasi, dengan menegaskan bahwa ketiadaan IPAL berpotensi melanggar Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah dan menimbulkan risiko pencemaran lingkungan.

- Menetapkan prioritas penyediaan dan pembangunan IPAL sebagai salah satu program utama dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
- Koordinasi dengan BPOM Pusat untuk dapat mengusulkan anggaran melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Lingkungan Hidup, sebagai langkah percepatan pemenuhan sarana pengelolaan limbah yang sesuai standar.
- Menjalin kerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat , baik untuk pendampingan teknis maupun inspeksi awal guna memastikan rancangan IPAL sesuai dengan ketentuan baku mutu air limbah.
- Melakukan monitoring dan pelaporan berkala terhadap kondisi pengelolaan limbah dan kemajuan pembangunan IPAL, serta mengintegrasikan hasilnya ke dalam laporan kinerja tahunan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

7) Pengawasan Yang Belum Menjangkau Daerah Terpencil

Dalam analisis kondisi internal Balai POM di Mamuju, salah satu aspek yang menjadi kelemahan dan memerlukan perhatian serta peningkatan adalah masih terbatasnya jangkauan pengawasan terhadap daerah-daerah terpencil. Wilayah kerja Balai POM di Mamuju yang mencakup sejumlah kabupaten dengan karakteristik geografis yang cukup menantang, seperti wilayah pegunungan, perbukitan, serta daerah kepulauan, menyebabkan akses transportasi ke lokasi-lokasi tertentu menjadi sulit dijangkau, terutama pada musim hujan atau saat terjadi gangguan infrastruktur. Sarana dan prasarana jalan yang belum sepenuhnya memadai turut memperpanjang waktu tempuh dan meningkatkan biaya operasional dalam pelaksanaan tugas pengawasan lapangan.

Selain itu, keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah terpencil juga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan yang berbasis digital. Beberapa sistem pelaporan, pendataan, hingga komunikasi internal maupun eksternal Balai POM sangat bergantung pada konektivitas jaringan yang stabil. Namun, di wilayah yang tidak memiliki akses internet yang memadai, penggunaan aplikasi pengawasan maupun pengumpulan data secara daring menjadi tidak optimal. Hal ini berdampak pada lambatnya pelaporan kondisi sarana, minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan mandiri, serta kurangnya keterlibatan pelaku usaha lokal dalam pembinaan berbasis digital.

Akibat dari kendala tersebut, beberapa daerah masih belum terjangkau secara rutin dalam kegiatan pengawasan, sehingga berpotensi menjadi celah bagi peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan keamanan dan mutu, mengingat lemahnya kontrol serta terbatasnya akses informasi bagi masyarakat setempat. Situasi ini menuntut adanya strategi khusus yang lebih adaptif dan terintegrasi, termasuk peningkatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan pendekatan berbasis komunitas lokal, serta investasi dalam infrastruktur dan teknologi alternatif yang sesuai dengan kondisi daerah.

Melalui, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Lintas Sektor terkait dan Pemerintah Daerah setempat, diharapkan ada solusi untuk ketersediaan sistem *mobile surveillance* yang bersifat *portable* dan fleksibel, menggunakan unit mandiri, sumber daya sendiri seperti baterai, generator yang dapat diusahakan, yang memungkinkan operasional tanpa listrik, serta koneksi seluler atau nirkabel seperti jaringan Wi-Fi untuk dapat berkomunikasi dan mengirimkan data secara *real-time*.

- 8) Belum maksimalnya KIE ke masyarakat terkait Penyalahgunaan OOT (Obat-Obat Tertentu)

Salah satu kelemahan yang masih dihadapi Balai POM di Mamuju dalam pelaksanaan fungsi penindakan adalah belum optimalnya pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat, khususnya dalam hal penyalahgunaan Obat-obat Tertentu (OOT) seperti Triheksifenidil, Tramadol, dextromethorphan, yang berpotensi disalahgunakan oleh kelompok rentan seperti remaja dan pelajar.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan OOT menyebabkan masih tingginya permintaan dan peredaran produk-produk tersebut di lingkungan masyarakat. Hal ini berdampak langsung pada beban kerja penindakan yang meningkat, karena kasus-kasus penyalahgunaan obat ini terus muncul secara berulang, terutama di wilayah dengan akses pengawasan terbatas seperti daerah pesisir dan pedalaman.

KIE yang belum masif juga mengakibatkan minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan atau deteksi dini terhadap peredaran obat ilegal, padahal keterlibatan publik sangat penting dalam membangun sistem pengawasan berbasis komunitas. Ketidaktahuan masyarakat terhadap bentuk penyalahgunaan obat, jalur distribusi ilegal, serta saluran pengaduan resmi, membuat intervensi penindakan lebih banyak bersifat reaktif dibandingkan preventif.

Dalam konteks ini, kelemahan KIE juga berdampak pada rendahnya efek jera secara sosial, karena masih terdapat anggapan bahwa penyalahgunaan OOT bukanlah pelanggaran serius, terutama jika pelaku adalah pengguna dan bukan produsen. Padahal, penyalahgunaan ini memiliki potensi merusak kesehatan, memicu kriminalitas, dan mengganggu ketertiban masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi penindakan Balai POM di Mamuju belum sepenuhnya ditopang oleh strategi edukatif yang kuat. Tanpa pemahaman publik yang memadai, upaya hukum akan terus berulang tanpa disertai perubahan perilaku di tingkat akar rumput.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kelembagaan dan sumber daya untuk mendukung kegiatan KIE yang lebih sistematis, terencana,

dan berbasis target audiens yang tepat (remaja, orang tua, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dll) agar fungsi penindakan dapat berjalan seimbang dengan upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan KIE terkait bahaya penyalahgunaan obat ini perlu kolaborasi antara BPOM, BNN, Dinas Pendidikan, dan komunitas lokal untuk memperkuat KIE melalui kampanye digital, sekolah sadar obat, dan pelibatan tokoh masyarakat. Digitalisasi dan KIE berbasis komunitas sekolah menjadi sangat penting karena dapat membangun jejering informasi yang dapat menyebarkan informasi terkait bahaya laten dari penyalahgunaan obat. Arah kedepan dari KIE Bahaya penyalahgunaan obat ini ialah melalui inovasi TOP GO (Tolak Penyalahgunaan Obat) yang menyasar langsung ke komunitas sekolah dan pengembangan digitalisasi pelaporan yang dapat dilakukan langsung oleh siswa jika menemukan pengedar yang menjual obat obat tertentu untuk penyalahgunaan.

1.2.3 Peluang (*Opportunity*)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi Balai POM di Mamuju untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan obat dan makanan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh Balai POM di Mamuju untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

- 1) Dukungan kuat dari Pemerintah Daerah dan Instansi Pusat, Media dan Akademisi

Salah satu peluang strategis yang dimiliki Balai POM di Mamuju dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi adalah adanya

dukungan yang kuat dari pemerintah daerah, instansi pusat, media, dan kalangan akademisi. Dukungan ini menjadi kekuatan eksternal yang sangat potensial untuk memperkuat efektivitas pengawasan obat dan makanan, memperluas jangkauan edukasi publik, serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program prioritas BPOM. Dalam konteks ini, peluang dimaknai sebagai sumber daya dan momentum eksternal yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat posisi kelembagaan dan meningkatkan capaian kinerja.

Apa yang menjadi inti dari peluang ini adalah kemitraan dan kolaborasi yang sudah mulai terbentuk dan terbukti mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan Balai POM di Mamuju di lapangan. Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan data lintas sektor, pelibatan dalam forum pembangunan daerah, fasilitasi kegiatan sosialisasi bersama hingga penyediaan anggaran melalui skema DAK non-fisik atau hibah. Sementara itu, instansi pusat seperti BPOM RI dan kementerian terkait turut berkontribusi melalui bimbingan teknis, penguatan regulasi, serta penyediaan platform sistem informasi yang dapat digunakan oleh satuan kerja di daerah. Media massa juga memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat dan membentuk opini publik yang mendukung tugas pengawasan dan perlindungan konsumen. Tak kalah penting, perguruan tinggi dan akademisi memberikan peluang sinergi dalam bentuk pelibatan mahasiswa dalam kegiatan edukatif. Peluang ini penting untuk dimanfaatkan karena tantangan pengawasan obat dan makanan semakin kompleks dan tidak bisa diselesaikan oleh BPOM secara sendiri. Dukungan lintas sektor memungkinkan terciptanya pendekatan kolaboratif yang lebih kuat, efisien, dan berkelanjutan. Ketika Balai POM di Mamuju memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah, maka intervensi pengawasan bisa menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah.

Hal ini secara langsung mendorong integrasi pengawasan ke dalam kebijakan lokal. Media pun berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan publik melalui publikasi kegiatan pengawasan serta penyebaran informasi yang kredibel tentang isu keamanan sediaan farmasi dan pangan.

Peluang ini sering dimanfaatkan ketika Balai POM di Mamuju menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lintas sektor. Selain itu, momentum penyusunan dokumen perencanaan bersama pemerintah daerah, seperti Rencana Aksi Daerah atau Musrenbang, juga menjadi kesempatan penting untuk memperkuat sinergi tersebut.

Agar peluang ini dapat dimanfaatkan secara maksimal maka Balai POM di Mamuju perlu secara aktif menginisiasi forum komunikasi dengan pemerintah daerah dan mitra lintas sektor, melibatkan media sejak awal dalam kegiatan, serta menjalin nota kesepahaman dengan akademisi untuk pengembangan riset dan inovasi. Selain itu, penting pula untuk melakukan pemetaan stakeholder, membangun jejaring komunikasi berbasis digital, serta mendokumentasikan seluruh bentuk dukungan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan lanjutan. Dengan cara ini, Balai POM di Mamuju tidak hanya mampu menjaga keberlanjutan dukungan, tetapi juga meningkatkan kredibilitas lembaga sebagai mitra strategis dalam mewujudkan perlindungan masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak aman.

Sampai tahun 2025 Jumlah perjanjian kerja sama yang berlaku di Balai POM di Mamuju ialah sebanyak 10 Perjanjian Kerja Sama. Dari kerja sama yang dilakukan Balai POM di Mamuju mendapat dukungan berupa pertukaran data informasi yang dapat meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah Sulawesi Barat serta mendapatkan dukungan fasilitas Sarana dan Prasarana selama membuka Pelayanan Publik di Mall Layanan Publik di masing-masing kabupaten. Dukungan anggaran dan SDM juga terlihat dari kegiatan-kegiatan pengawasan dan penyuluhan yang dilakukan oleh jejaring Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Obat dan Makanan (TKPPOM) secara mandiri menggunakan SDM dan Anggaran yang bersumber dari APBD masing masing daerah.

2) Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas BPOM untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Dalam konteks global, kecepatan dan akurasi pengawasan obat dan makanan menjadi kunci kompetitif yang penting, dan dengan teknologi yang tepat, BPOM dapat menegakkan standar yang lebih tinggi, memberikan respons yang lebih cepat terhadap masalah keamanan obat dan makanan, dan bahkan mengantisipasi masalah sebelum terjadi.

Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik dan keandalan lembaga, tetapi juga menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kuat dalam dialog dan kerjasama internasional mengenai standar pengawasan obat dan makanan. Dalam digitalisasi proses bisnis, Balai POM di Mamuju mengadopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen BPOM untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat.

Peluang Balai POM di Mamuju dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya, BPOM dapat mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pelaporan, dan pemantauan kepatuhan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam mengawasi distribusi produk secara real-time, meningkatkan kemampuan BPOM untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum

masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan mempengaruhi masyarakat luas.

Kebijakan nasional menuju *Digital Government Ecosystem* sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029 dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital menjadi peluang besar bagi BPOM, termasuk Balai POM di Mamuju. Pemerintah pusat menargetkan seluruh instansi pemerintah untuk melaksanakan digitalisasi proses bisnis secara menyeluruh—mulai dari layanan publik, pengelolaan data, hingga pengambilan keputusan berbasis analisis digital.

Bagi Balai POM di Mamuju, arah kebijakan ini sejalan dengan upaya transformasi pengawasan obat dan makanan berbasis risiko dan teknologi. Digitalisasi tidak hanya menyentuh sisi administratif, tetapi juga mempengaruhi seluruh siklus pengawasan: dari registrasi produk, pengawasan *pre* dan *post market*, inspeksi lapangan, laboratorium pengujian, penindakan hukum, hingga pelaporan dan evaluasi kinerja.

Perkembangan ini menjadi peluang besar untuk memperbaiki tata kelola pengawasan yang selama ini masih manual dan tersebar, agar menjadi lebih terpadu, efisien, transparan, dan berbasis data (*data-driven supervision*).

3) Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang merupakan Upaya pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan publik yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan berkualitas. Penerapan SPBE diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah dilakukan melalui INA Digital, yang merupakan Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah Indonesia.

Percepatan transformasi digital merujuk pada proses yang semakin cepat dan mendalam dalam penerapan teknologi digital untuk mengubah cara organisasi atau bisnis beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi serta menciptakan nilai tambah

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, system pemerintahan berbasis elektronik dan satu data Indonesia yang terpadu dan menyeluruh, birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, penguatan pencegahan korupsi, dan penguatan aspek keamanan siber dan keamanan informasi, perlu melakukan percepatan transformasi digital dan untuk mewujudkan percepatan transformasi digital dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu koordinasi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan badan usaha milik negara. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Pemerintah melakukan percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas dan menugaskan Perum Peruri untuk penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas.

Aplikasi SPBE Prioritas diselenggarakan untuk mendukung 9 (sembilan) layanan pemerintah yang terintegrasi dalam bidang berikut.

- (1) Layanan pendidikan;
- (2) Layanan kesehatan;
- (3) Layanan bantuan sosial;
- (4) Layanan kependudukan;
- (5) Layanan transaksi keuangan negara;
- (6) Layanan administrasi pemerintah;
- (7) Layanan portal pelayanan publik, layanan single sign on nasional, layanan identitas digital terpadu, dan layanan Infrastruktur SPBE

terintegrasi termasuk pusat data nasional, jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah, dan komputasi awan;

(8) Layanan satu data;

(9) Layanan kepolisian

Perum Peruri selaku penyelenggara aplikasi SPBE Prioritas telah merilis terbatas Layanan Identitas Digital Terpadu (INApas), Portal Nasional yang terdiri dari Portal Pelayanan Publik (INaku), dan Portal Administrasi Pemerintahan (INAgov). Ketiga layanan tersebut merupakan layanan digital prioritas INA DIGITAL sebagai penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital Pemerintah Indonesia.

Untuk melaksanakan ketentuan dari peraturan presiden No 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Badan POM sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan menjadi salah satu bagian dalam mewujudkan percepatan transformasi digital nasional. Atas hal tersebut keterpaduan dan integrasi layanan SPBE Badan POM wajib dilakukan, salah satu kerjasama teknis yang dilakukan adalah pemanfaatan layanan identitas digital terpadu (INApas) yang sudah dikembangkan oleh Perum Peruri yang diberikan tugas oleh Pemerintah sebagai penyelenggara aplikasi SPBE Prioritas.

Transformasi digital nasional yang digerakkan oleh pemerintah melalui kebijakan *Indonesia Digital 2045* dan percepatan implementasi *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)* membuka peluang besar bagi lembaga pengawasan seperti BPOM. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, termasuk jaringan internet berkecepatan tinggi, *cloud computing*, *Internet of Things (IoT)*, *artificial intelligence (AI)*, serta *data analytics*, telah mengubah paradigma pengelolaan data dan layanan publik di sektor pemerintahan.

Di wilayah seperti Sulawesi Barat, peningkatan akses infrastruktur digital—terutama perluasan jaringan 4G dan rencana pengembangan 5G oleh pemerintah—memberikan peluang strategis bagi Balai POM di Mamuju untuk memperluas jangkauan dan efektivitas pengawasan tanpa bergantung sepenuhnya pada interaksi fisik atau manual.

Bukti empiris mendukung bahwa instansi yang mampu memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi secara efektif mengalami peningkatan signifikan dalam efisiensi kerja, transparansi data, dan respon pengawasan di lapangan.

4) Tingginya Antusiasme Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Antusiasme masyarakat Sulawesi Barat terhadap pengawasan produk farmasi dan pangan olahan menunjukkan tren yang semakin positif. Masyarakat mulai aktif melaporkan produk ilegal, memberikan edukasi kepada sesama konsumen, dan terlibat dalam kampanye keamanan produk.

Kabupaten Mamuju sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Barat, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan produk farmasi dan pangan olahan semakin terasa. Dari kegiatan interaksi dengan berbagai kalangan masyarakat, baik melalui pengawasan bersama Obat dan makanan di peredaran, pendampingan pelaku usaha, Bimtek, sosialisasi dan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, diketahui sebahagian besar masyarakat Sulawesi Barat masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan pangan. Hal ini menjadi indikasi pentingnya jaminan mutu, kualitas dan keamanan produk yang mereka konsumsi dan produksi. Kegiatan penyuluhan keamanan pangan kepada industri rumah tangga pangan (IRTP) di Mamuju telah menjangkau puluhan pelaku usaha lokal, meningkatkan pemahaman mereka terhadap standar produksi yang aman dan sesuai regulasi.

Antusiasme ini juga tercermin dalam partisipasi masyarakat dalam pelaporan efek samping obat dan produk ilegal. Melalui kanal digital

seperti aplikasi BPOM Mobile dan media sosial, masyarakat Sulawesi Barat dapat menyampaikan laporan secara cepat dan akurat. Informasi yang disampaikan ini, akan sangat membantu proses deteksi dini terhadap produk bermasalah dan meningkatkan transparansi dalam penanganan kasus.

Balai POM di Mamuju perlu terus memperkuat mekanisme pengawasan partisipatif melalui kader pangan aman yang sudah terbentuk baik di Desa, Pasar, maupun Sekolah, pemanfaatan aplikasi pelaporan publik yang dapat dikembangkan melalui Inovasi WALI (WhatsApp Lincah), dan memberikan penghargaan bagi masyarakat yang menjadi pelapor aktif dalam meningkatkan pengawasan obat dan Makanan.

5) Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan jumlah Produk Obat dan Makanan yang beredar di Sulawesi Barat

Pertumbuhan pasar dan peningkatan jumlah produk obat dan makanan yang beredar di Provinsi Sulawesi Barat memberikan peluang strategis bagi Balai POM di Mamuju dalam memperkuat peran penindakan dan penegakan hukum di bidang pengawasan obat dan makanan. Seiring meningkatnya kebutuhan dan konsumsi masyarakat terhadap produk farmasi dan pangan olahan, arus distribusi barang terus berkembang tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga menjangkau kawasan pedesaan dan kepulauan yang sebelumnya minim pengawasan.

Peluang ini mendorong Balai POM di Mamuju untuk meningkatkan intensitas pengawasan post-market dan kegiatan penyidikan terhadap produk ilegal, palsu, atau tidak memenuhi ketentuan, yang cenderung meningkat seiring dengan meluasnya pasar. Peredaran produk tanpa izin edar, mengandung bahan berbahaya, atau diproduksi secara tidak higienis menjadi target prioritas dalam pelaksanaan penindakan administratif dan proses hukum pidana. Dengan demikian,

pertumbuhan pasar menjadi entry point penting untuk memperluas cakupan intervensi hukum dan menjamin perlindungan konsumen. Di sisi lain, dinamika pasar juga meningkatkan tantangan terhadap upaya perlindungan masyarakat dari produk yang dapat membahayakan kesehatan. Hal ini membuka peluang bagi Balai POM di Mamuju untuk mengoptimalkan fungsi penyidikan, pemantauan intelijen pengawasan, serta operasi penindakan terpadu bersama aparat penegak hukum. Kolaborasi dengan Polri, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait dapat diperkuat dalam bentuk operasi gabungan, penanganan perkara lintas sektor, serta pengawasan distribusi daring yang berpotensi menjadi jalur peredaran produk ilegal.

Lebih jauh, pertumbuhan UMKM di sektor pangan olahan juga memberi peluang untuk melakukan pembinaan berbasis penegakan hukum preventif. Dengan pendekatan persuasif dan edukatif, pelaku usaha dapat diarahkan untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan konsumen dan pemberdayaan usaha.

Dengan memanfaatkan peluang ini secara optimal, Balai POM di Mamuju dapat mengembangkan model penindakan yang adaptif, proaktif, dan berbasis risiko, serta memperkuat sistem pelaporan, dokumentasi hukum, dan evaluasi penanganan perkara. Langkah ini akan menjadikan penegakan hukum di bidang obat dan makanan bukan hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai strategi perlindungan kesehatan masyarakat dan penguatan tata kelola pangan dan obat yang berkelanjutan di Sulawesi Barat.

Pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Barat yang stabil dalam lima tahun terakhir, ditopang oleh sektor perdagangan, industri pangan olahan, dan jasa kesehatan, secara langsung berdampak pada peningkatan volume dan variasi produk obat dan makanan yang beredar.

Dari Hasil pendampingan UMKM dan Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Sarana Pelayanan Kefarmasian yang selama ini menjadi tupoksi BPOM dan sarana lainnya, menunjukkan tren positif pada jumlah pelaku UMKM pangan olahan, klinik kesehatan, serta apotek dan toko obat terutama di Mamuju dan Polewali Mandar.

Selain itu, perluasan infrastruktur transportasi dan distribusi antar kabupaten membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk lokal maupun antar provinsi.

Fenomena ini memperkuat posisi Sulawesi Barat sebagai pasar berkembang (*emerging market*) bagi produk obat, kosmetik, suplemen, dan pangan olahan.

Peningkatan jumlah produk dan pelaku usaha memberikan peluang strategis bagi Balai POM di Mamuju untuk memperluas perannya, tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator pembinaan pelaku usaha lokal menuju kepatuhan regulasi dan daya saing produk nasional.

Pertumbuhan pasar yang pesat memiliki dua sisi: di satu sisi menciptakan tantangan peningkatan risiko pelanggaran, tetapi di sisi lain menjadi peluang memperkuat kapasitas dan relevansi fungsi pengawasan BPOM.

Kaitannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Peningkatan Signifikansi Fungsi Pengawasan Post-Market
Semakin banyak produk beredar berarti semakin besar kebutuhan pengawasan pasca-edar (*post-market surveillance*). Balai POM di Mamuju dapat memanfaatkan peluang ini untuk menerapkan sistem pengawasan berbasis risiko yang lebih adaptif dan data-driven, menempatkan prioritas pada produk dengan tingkat risiko tinggi atau pelaku usaha baru.
- Penguatan Sinergi Pembinaan dan Pengawasan Pertumbuhan
UMKM pangan dan kosmetik di daerah membuka peluang bagi BPOM untuk memperluas fungsi edukatif melalui program pembinaan UMKM, pendampingan sertifikasi CPPOB/CPPKB,

serta pelatihan labeling dan klaim produk. Dengan pendekatan pembinaan yang lebih masif, Balai POM di Mamuju tidak hanya bertugas menindak, tetapi juga memastikan pelaku usaha naik kelas dan berdaya saing secara legal.

- Penguatan Kolaborasi Pengawasan Rantai Pasok
Pertumbuhan pasar diikuti oleh peningkatan rantai distribusi, baik dari pemasok bahan baku hingga peritel. Balai POM di Mamuju dapat memperkuat kemitraan strategis dengan Dinas Perdagangan, Kesehatan, dan Balai Karantina untuk melakukan pengawasan bersama, terutama terhadap produk lintas daerah.
- Inovasi Mekanisme Pengawasan Digital Volume produk yang meningkat menuntut efisiensi mekanisme pengawasan. Di sinilah peluang digitalisasi sistem pelaporan, registrasi, dan pelacakan produk (*traceability system*) dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pengawasan dan pelaporan hasil pengujian.

Dengan demikian, pertumbuhan pasar tidak sekadar menambah beban pengawasan, tetapi menjadi pendorong inovasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan Balai POM di Mamuju.

6) Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah

Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah merupakan hasil dari dorongan pemerintah daerah dan pusat dalam memajukan sektor ekonomi lokal, khususnya melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang pangan olahan, obat tradisional, dan kosmetik berbasis bahan alam lokal. Di wilayah Sulawesi Barat, banyak produk unggulan daerah seperti kopi, hasil olahan laut, rempah-rempah, serta tanaman herbal yang kini mulai dikembangkan secara lebih serius untuk memasuki pasar yang lebih luas secara nasional.

Tahun 2024 -2025 beberapa produk lokal dibawah pengawasan Balai POM di Mamuju telah mulai dikenal secara nasional a.l produk Kopi Kurrak, Cokelat Macoa, Minyak Mandar. Pemasaran produk juga telah

melibatkan swalayan dan toko-toko besar di setiap Kabupaten dan menjadi oleh-oleh khas provinsi Sulawesi Barat

Peningkatan daya saing ini tidak hanya menunjukkan kemajuan dari sisi kualitas dan inovasi produk, tetapi juga mencerminkan meningkatnya kesadaran dan kebutuhan pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi, legalitas, serta pemenuhan standar keamanan dan mutu produk. Hal ini menjadi peluang strategis bagi Balai POM di Mamuju untuk memperluas perannya tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra pembina dan pendamping dalam proses peningkatan kualitas produk lokal. Dalam konteks ini, Balai POM di Mamuju dapat memperkuat layanan edukasi teknis, fasilitasi perizinan seperti MD dan P-IRT, serta pendampingan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) maupun Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Sepanjang Tahun 2024 dan 2025, Balai POM di Mamuju telah mendampingi sekitar 16 pelaku usaha UMKM baru, dan terbit izin edar 6 (enam) pelaku usaha, 4 (empat) sarana terpenuhi sertifikat CPPOB, juga ada pemenuhan CPKB industri Kosmetik Gol. B dan Obat Tradisional tahap 1.

Dengan semakin tingginya ekspektasi pasar terhadap produk yang aman, bermutu, dan legal, maka peran Balai POM menjadi semakin strategis dalam memastikan bahwa produk unggulan daerah yang akan dipasarkan telah melalui proses verifikasi dan pengawasan yang memadai. Selain itu, keterlibatan aktif Balai POM dalam rantai penguatan mutu produk lokal juga akan berdampak pada meningkatnya citra institusi di mata pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat. Peluang ini juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan layanan hingga ke daerah sentra produksi dan daerah terpencil melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor dan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan pelayanan.

Dengan demikian, peningkatan daya saing produk unggulan daerah bukan hanya menjadi faktor pendukung pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga menjadi peluang konkret bagi Balai POM di Mamuju untuk memperkuat efektivitas pengawasan dan memperluas cakupan layanannya dalam memastikan perlindungan kesehatan masyarakat melalui produk yang aman, bermutu, dan sesuai regulasi.

7) Inovasi Layanan Berkelanjutan (Inovasi Produk Dan Layanan Kesehatan)

Inovasi layanan berkelanjutan merupakan salah satu peluang dalam memperkuat kualitas dan efektivitas layanan publik, khususnya di sektor pengawasan dan pengujian yang menyangkut kesehatan dan keselamatan masyarakat. Inovasi ini merujuk pada pengembangan layanan yang terus-menerus diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, baik melalui pendekatan teknologi, sistem kerja, maupun kolaborasi lintas sektor.

Di era digital dan pasca-pandemi seperti saat ini, masyarakat telah terbiasa dengan layanan berbasis daring, karenanya Balai POM di Mamuju telah menyediakan inovasi layanan yang dapat dimanfaatkan oleh internal maupun eksternal, seperti:

- Digitalisasi dan otomatisasi layanan, misalnya melalui *platform* pengajuan izin edar daring, sistem pelaporan masyarakat berbasis aplikasi, serta *WhatsApp* pelayanan 24 jam melalui inovasi WALI (*WhatsApp* Lincah)
- Pemanfaatan layanan bergerak (*mobile service*), seperti mobil laboratorium keliling atau edukasi langsung ke masyarakat melalui Inovasi BIYANKA (Mobil Layanan Informasi dan Edukasi Keliling)
- Pelibatan masyarakat melalui program pembentukan kader pengawasan pangan dan pembentukan fasilitator yang membantu proses registrasi sediaan farmasi dan pangan
- Penerapan sistem monitoring dan evaluasi agar setiap inovasi terus ditinjau efektivitasnya dan ditingkatkan sesuai kebutuhan

Peluang ini semakin kuat karena dapat diterapkan dan dikembangkan terutama dengan dorongan reformasi birokrasi, arahan percepatan transformasi digital pemerintahan, serta meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya pengawasan produk pangan dan obat. Dengan merancang inovasi yang terencana, adaptif, dan berbasis kebutuhan masyarakat, peluang peningkatan mutu layanan publik dalam pengawasan dan pengujian akan terus terbuka luas. Inovasi berkelanjutan bukan hanya menjadi respons atas tantangan, tetapi juga menjadi strategi membangun kepercayaan publik, memperkuat ketahanan sistem pengawasan, dan menciptakan layanan yang berdaya saing. Maka, inovasi bukan lagi pilihan tambahan, tetapi kebutuhan utama dalam membentuk masa depan layanan publik yang lebih baik.

Dari inovasi yang dikembangkan oleh Balai POM di Mamuju menjadi suatu inovasi yang berkelanjutan yang mempunyai monitoring dampak dari inovasi yang telah diimplementasikan. Dalam inovasi yang berkaitan dengan digitalisasi WALI (Whatsapp Lincah) yang mengembangkan sistem respon cepat terhadap layanan dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu serta telah diintegrasikan kedalam Standard Operasional Prosedur (SOP) kelembagaan dengan mempercepat waktu baku standard layanan pelayanan permintaan informasi yang tadinya membutuhkan waktu 1 hari untuk merespon jawaban dapat dipercepat menjadi kurang dari 1 jam untuk dapat segera direspon oleh Inovasi ini yang tentunya berdampak pada Indeks Kepuasan Masyarakat Balai POM di Mamuju yang di tahun 2020 hanya memperoleh nilai 82,92 meningkat menjadi 98,42 pada tahun 2024.

Selain dari Inovasi WALI terdapat Inovasi Kasippi dan Mobil Layanan Informasi dan Edukasi keliling (BIYANKA) yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan masyarakat hingga sampai ke gengaman masing masing melalui layanan jemput bola secara langsung maupun melalui online zoom meeting. Dampak yang ditimbulkan ialah pada

Indeks Kepuasan Pelaku Usaha yang pada tahun 2020 sebesar 95.08 menjadi 98.3 pada tahun 2024 dan juga berdampak pada ekonomi pelaku usaha UMKM yang didampingi menjadi semakin meningkat.

Inovasi layanan berkelanjutan sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPOM, karena menyentuh seluruh rantai proses pengawasan, mulai dari pelayanan publik hingga penindakan perkara.

Beberapa keterkaitan strategisnya sebagai berikut:

- Inovasi Layanan Perizinan dan Informasi Publik Balai POM di Mamuju dapat mengembangkan sistem layanan daring seperti *Inovasi KASIP* untuk inovasi percepatan pendampingan sertifikasi dan registrasi di Balai POM di Mamuju. Inovasi ini berdampak pada penurunan waktu tanggap layanan dan peningkatan efisiensi proses perizinan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- Inovasi Pengawasan Partisipatif dan Digital
Melalui pemanfaatan kanal digital (aplikasi BPOM Mobile dan WALI), masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaporan produk bermasalah secara cepat
Dampaknya adalah peningkatan kecepatan tindak lanjut pengaduan masyarakat (response rate) serta penurunan waktu tanggap pengawasan terhadap laporan produk tidak memenuhi ketentuan (TMK).
- Inovasi Pembinaan Pelaku Usaha dan Edukasi Publik
Balai POM di Mamuju berpeluang memperkuat program Desk Registrasi Jemput Bola bagi UMKM.
Pendekatan inovatif ini meningkatkan jumlah pelaku usaha binaan yang patuh regulasi, sekaligus berkontribusi pada peningkatan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) karena masyarakat melihat perbaikan nyata pada kualitas layanan.

Dengan demikian, inovasi layanan berkelanjutan bukan hanya meningkatkan kepuasan publik, tetapi juga memperkuat efektivitas, akurasi, dan daya respons pengawasan obat dan makanan.

8) Kebijakan Kesehatan Nasional (Dinamika Kebijakan Kesehatan Global dan Perdagangan Bebas Dalam Harmonisasi Regulasi dan Peningkatan Daya Saing Produk Nasional)

Perkembangan kebijakan kesehatan nasional yang selaras dengan dinamika kebijakan kesehatan global dan sistem perdagangan bebas membuka peluang besar bagi Balai POM di Mamuju untuk memperkuat fungsi penindakan di bidang obat dan makanan. Di era harmonisasi regulasi antarnegara dan integrasi pasar ASEAN melalui skema seperti *ASEAN Economic Community* (AEC), arus masuk produk impor—baik legal maupun ilegal—semakin meningkat. Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan lembaga pengawas, termasuk Balai POM di Mamuju, dalam menjaga kedaulatan keamanan produk melalui penegakan hukum yang responsif, tegas, dan terintegrasi.

Harmonisasi standar mutu, keamanan, dan labelisasi produk sebagai bagian dari kebijakan global memberikan peluang bagi BPOM untuk memperkuat perannya dalam pengawasan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi nasional dan internasional. Dalam konteks penindakan, hal ini menjadi landasan untuk melakukan pengawasan berbasis risiko terhadap produk yang tidak memenuhi standar harmonisasi, baik dari sisi bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga pengemasan.

Lebih lanjut, keterbukaan pasar akibat perdagangan bebas berpotensi meningkatkan sirkulasi produk ilegal dan tidak terdaftar, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Hal ini menjadi peluang strategis bagi Balai POM di Mamuju untuk memperluas cakupan penindakan terhadap pelanggaran lintas batas, termasuk peningkatan kerja sama lintas sektor dengan instansi seperti Bea Cukai, Dinas Perdagangan, dan Kepolisian. Melalui sinergi ini, BPOM dapat memperkuat upaya

intelijen pengawasan, penyidikan, dan penegakan hukum terhadap produk yang tidak sesuai ketentuan dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Kebijakan kesehatan nasional yang menekankan pada peningkatan daya saing produk lokal juga memberikan peluang bagi BPOM untuk mengarahkan fungsi penindakan ke arah penegakan hukum yang mendukung produk nasional yang patuh regulasi dan melindungi pelaku usaha dalam negeri dari praktik perdagangan tidak sehat seperti pemalsuan, penyelundupan, dan distribusi produk tanpa izin edar. Penindakan yang tegas terhadap pelanggaran semacam ini berperan penting dalam menciptakan pasar domestik yang adil, sehat, dan kompetitif.

Dengan mengoptimalkan peluang dari dinamika kebijakan global dan perdagangan bebas, Balai POM di Mamuju dapat mengembangkan fungsi penindakan tidak hanya sebagai instrumen reaktif, tetapi sebagai alat strategis dalam menjaga integritas sistem kesehatan nasional, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperkuat ketahanan industri obat dan makanan yang sesuai standar.

Di tingkat nasional, arah kebijakan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029* menegaskan pentingnya ketahanan pangan yang aman, bergizi, dan berkelanjutan. Pemerintah juga memperkuat agenda Ketahanan Pangan Nasional melalui pengembangan *ekonomi hijau* dan *ekonomi sirkular*, yang berdampak langsung terhadap sektor produksi pangan olahan di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Barat.

Provinsi Sulawesi Barat, dengan potensi hasil pertanian dan perikanan yang melimpah (seperti kakao, kelapa, ikan, dan rumput laut), memiliki peluang besar dalam mengembangkan industri pangan olahan lokal yang berorientasi keberlanjutan.

Peluang ini menjadi signifikan bagi Balai POM di Mamuju karena fungsi pengawasan produk pangan olahan yang semakin luas dan

kompleks menuntut peningkatan kapasitas dan adaptasi pengawasan agar sejalan dengan dinamika pasar serta prinsip *sustainability*.

Produksi dan konsumsi pangan berkelanjutan menciptakan tantangan dan peluang baru bagi fungsi pengawasan Balai POM di Mamuju.

Kaitannya dapat dijelaskan melalui tiga dimensi strategis:

a. Pengawasan terhadap Produksi Pangan Olahan Berkelanjutan

- Penerapan prinsip *Good Manufacturing Practices (GMP)* dan *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)* harus disesuaikan dengan praktik produksi ramah lingkungan (*eco-friendly production*).
- Balai POM di Mamuju berperan penting dalam memastikan bahwa upaya pelaku usaha dalam mengadopsi bahan baku lokal, teknologi hemat energi, dan pengemasan ramah lingkungan tetap memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi.
- Dengan demikian, Balai POM di Mamuju menjadi mitra pengawasan dan fasilitator kepatuhan industri lokal agar produk berkelanjutan juga terjamin keamanannya.

b. Pengawasan Konsumsi dan Edukasi Publik

- Tren konsumsi pangan sehat dan alami membuka ruang bagi Balai POM di Mamuju untuk memperkuat edukasi masyarakat tentang keamanan pangan dan klaim gizi.
- Melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), Balai POM di Mamuju dapat meningkatkan literasi konsumen dalam memilih produk yang aman, bergizi, dan berkelanjutan.
- Hal ini secara langsung berkontribusi pada penurunan risiko konsumsi pangan tidak aman dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola makan sehat.

c. Pembinaan UMKM dan Penguatan Ekosistem Pangan Lokal

- Pelaku UMKM di sektor pangan olahan menjadi kunci dalam mewujudkan sistem produksi berkelanjutan.

- Balai POM di Mamuju dapat memanfaatkan peluang ini dengan memperluas program pembinaan dan sertifikasi pangan olahan, terutama yang memanfaatkan sumber daya lokal.
- Langkah ini mendorong daya saing produk daerah, mengurangi ketergantungan pada bahan impor, dan memperkuat ketahanan pangan lokal.

Dengan demikian, peluang ini tidak hanya memperluas ruang pengawasan BPOM, tetapi juga meningkatkan relevansi dan kontribusi strategis Balai POM di Mamuju dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

9) Kolaborasi Strategis dengan Stakeholder Baru

Dalam analisis kondisi eksternal organisasi Balai POM di Mamuju, salah satu komponen peluang (*opportunity*) yang memiliki prospek strategis dalam memperkuat efektivitas serta meningkatkan cakupan layanan pengawasan obat dan makanan adalah adanya peluang untuk membangun dan memperluas kolaborasi strategis dengan *stakeholder* baru. Seiring dengan semakin kompleksnya tantangan pengawasan di bidang obat dan makanan, dibutuhkan pendekatan yang lebih kolaboratif dan melibatkan berbagai pihak di luar mitra kerja konvensional, baik dari sektor pemerintah, swasta, akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil. Di wilayah Sulawesi Barat, perkembangan sektor ekonomi lokal, pertumbuhan UMKM, dan meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap isu-isu kesehatan dan keamanan pangan membuka ruang yang luas bagi Balai POM di Mamuju untuk menjalin kemitraan baru yang lebih beragam dan strategis.

Kolaborasi dengan stakeholder baru ini dapat mencakup berbagai bentuk kerja sama, mulai dari penyediaan data dan informasi, dukungan dalam kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat, hingga pelaksanaan pengawasan bersama di lapangan. Misalnya, kerja sama dengan perguruan tinggi lokal dapat dimanfaatkan untuk

mendukung kajian teknis, inovasi pengawasan, dan pelatihan berbasis akademik; sementara itu, kolaborasi dengan organisasi masyarakat atau komunitas lokal dapat memperkuat jejaring informasi dan mempercepat deteksi dini terhadap produk berisiko yang beredar di masyarakat. Selain itu, kerja sama dengan pelaku usaha besar, asosiasi UMKM, atau lembaga pembiayaan juga dapat memberikan kontribusi dalam mendorong peningkatan kualitas produk lokal agar sesuai dengan standar keamanan dan mutu yang ditetapkan.

Peluang ini semakin relevan dengan berkembangnya ekosistem pemerintahan yang mendorong integrasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix, di mana pemerintah tidak lagi bekerja sendiri, melainkan bersinergi dengan dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media. Bagi Balai POM di Mamuju, membangun kolaborasi strategis dengan stakeholder baru tidak hanya memperluas jangkauan layanan pengawasan secara fisik dan fungsional, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan efektivitas komunikasi risiko, memperkuat legitimasi tindakan pengawasan, serta memperluas partisipasi aktif dalam mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli terhadap keamanan obat dan makanan.

Dengan terbukanya peluang kolaborasi ini, Balai POM di Mamuju dapat memposisikan diri sebagai institusi yang terbuka, adaptif, dan proaktif dalam menjawab tantangan pengawasan yang semakin dinamis. Oleh karena itu, kemampuan dalam menjalin dan mengelola kemitraan dengan stakeholder baru menjadi salah satu kunci untuk memperkuat sistem pengawasan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Kolaborasi dengan stakeholder baru dapat memberikan nilai tambah signifikan bagi institusi Balai POM di Mamuju seperti efisiensi sumber daya melalui berbagi data, fasilitas, dan tenaga ahli, Peningkatan efektivitas pengawasan dengan melibatkan jejaring lokal yang lebih dekat dengan masyarakat, Peningkatan literasi publik melalui

dukungan media dan lembaga pendidikan dalam kampanye keamanan obat dan makanan serta Penguatan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap peran BPOM sebagai otoritas pengawasan. Namun demikian, peluang ini juga menuntut adanya tata kelola kemitraan yang jelas agar kolaborasi yang dibangun bersama stakeholder baru tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan memberikan hasil nyata dan terukur salah satunya melalui pengembangan *Stakeholder Partnership Framework* oleh Balai POM di Mamuju. Framework atau kerangka kerja ini sebagai instrumen pengelolaan kemitraan lintas sektor. Framework ini diharapkan menjadi pedoman operasional yang memastikan kerja sama antar pemangku kepentingan berjalan secara sistematis, terencana, dan berorientasi pada hasil yang mendukung peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju.

Stakeholder Partnership Framework atau Kerangka kerja ini harus didesain untuk memastikan bahwa setiap kerja sama lintas sektor memiliki pengukuran yang jelas dimana terdapat indikator kinerja utama spesifik untuk setiap kemitraan, Keberlanjutan (*Sustainable*) dan Dampak Positif yang secara langsung berkontribusi pada tiga pilar utama BPOM yaitu peningkatan pengawasan, perlindungan konsumen, dan daya saing produk lokal. Dengan penerapan *Stakeholder Partnership Framework*, Balai POM di Mamuju akan memiliki dasar strategis untuk memastikan kolaborasi lintas sektor berjalan terukur, berkelanjutan, dan berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Langkah ini juga akan memperkuat posisi Balai POM di Mamuju sebagai institusi yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap tantangan pengawasan di era kolaboratif. Dari hasil kolaboratif yang dilakukan sampai tahun 2025 telah berhasil menciptakan 10 mitra strategis yang baru dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan dengan berbagai pelaksanaan kegiatan yang terencana dan diimplementasikan

secara kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama guna meningkatkan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan.

10) Produksi dan Konsumsi Pangan Olahan berkelanjutan

Perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan telah mendorong pelaku usaha, khususnya di sektor pangan, untuk berinovasi dalam menciptakan produk-produk olahan yang tidak hanya memenuhi standar mutu, tetapi juga ramah lingkungan dan berbasis pada bahan baku lokal yang lestari. Di wilayah Sulawesi Barat, fenomena ini terlihat dari semakin banyaknya pelaku usaha kecil dan menengah yang mulai mengembangkan produk pangan olahan berbahan dasar alami, tanpa bahan tambahan berbahaya, dan diproses secara higienis sesuai prinsip keamanan pangan.

Peluang ini memberikan ruang strategis bagi Balai POM di Mamuju untuk memperluas perannya dalam mendampingi dan mengawasi proses produksi pangan olahan yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Balai POM tidak hanya dapat melakukan pengawasan terhadap keamanan produk akhir, tetapi juga berperan aktif dalam proses edukasi, pembinaan teknis, serta advokasi kepada pelaku usaha agar proses produksinya memenuhi standar keamanan, sekaligus mendukung keberlanjutan dari sisi sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM menjadi bagian dari rantai nilai yang mendorong pertumbuhan industri pangan olahan yang sehat dan bertanggung jawab.

Lebih jauh, meningkatnya minat konsumen terhadap produk yang sehat, aman, dan diproduksi secara berkelanjutan juga mendorong pelaku usaha untuk memenuhi sertifikasi dan legalitas produk sesuai regulasi yang berlaku. Hal ini tentu menjadi peluang bagi Balai POM di Mamuju untuk memperluas cakupan layanannya dalam hal fasilitasi perizinan, *verifikasi* pemenuhan standar mutu, serta penerapan sistem keamanan pangan yang berbasis risiko. Dengan

adanya kesadaran kolektif terhadap pentingnya pangan yang aman dan berkelanjutan, pendekatan pengawasan yang dilakukan pun dapat diarahkan untuk lebih proaktif, edukatif, dan mendukung transformasi industri pangan ke arah yang lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, tren produksi dan konsumsi pangan olahan yang berkelanjutan bukan hanya mencerminkan perubahan sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi peluang penting bagi Balai POM di Mamuju untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, memperluas cakupan intervensi pengawasan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan.

1.2.4 Ancaman (*Threat*)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis Balai POM di Mamuju. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga BPOM dan UPT dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen "Threats" yang dapat mempengaruhi Balai POM di Mamuju dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang.

1) *E-commerce* dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan

Dalam era digital saat ini, kejahatan siber di bidang obat dan makanan menjadi salah satu ancaman nyata yang berdampak langsung terhadap efektivitas fungsi penindakan BPOM, termasuk di wilayah kerja Balai POM di Mamuju. Maraknya peredaran obat dan pangan ilegal melalui *platform e-commerce*, media sosial, dan layanan pesan instan menghadirkan tantangan baru yang kompleks dan sulit terdeteksi dengan pendekatan pengawasan konvensional.

Pelaku kejahatan memanfaatkan anonimitas, fleksibilitas *platform* digital, dan kurangnya regulasi khusus di ruang daring untuk mendistribusikan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar, mengandung bahan berbahaya, bahkan termasuk dalam golongan Obat-obat Tertentu (OOT) yang rawan disalahgunakan. Transaksi daring yang bersifat tertutup, tanpa tatap muka, serta sering melibatkan jasa pengiriman tidak resmi, menyebabkan kesulitan dalam pelacakan pelaku, bukti, dan jaringan distribusi.

Ancaman ini sangat relevan bagi Balai POM di Mamuju, mengingat wilayah Sulawesi Barat terdiri atas daerah pesisir dan kepulauan yang sebagian masyarakatnya telah mulai memanfaatkan platform digital dalam bertransaksi. Distribusi produk ilegal melalui jalur daring dapat menembus hingga ke pelosok tanpa kontrol distribusi fisik yang terdeteksi. Hal ini menciptakan “*blind spot*” dalam pengawasan distribusi, sekaligus meningkatkan potensi kerugian kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur digital, sumber daya SDM yang belum sepenuhnya terspesialisasi di bidang siber, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan kejahatan siber lintas sektor, menjadikan fungsi penindakan terhadap pelanggaran daring ini masih belum maksimal. Ketertinggalan regulasi dan perangkat hukum terkait pengawasan dan penindakan di ranah digital juga menjadi faktor penghambat dalam menjangkau pelaku kejahatan dengan prosedur yang sah dan akuntabel.

Jika tidak diantisipasi secara sistematis, kejahatan siber di bidang obat dan makanan akan terus berkembang, lebih cepat dibandingkan kemampuan intervensi hukum. Hal ini tidak hanya akan melemahkan efektivitas penindakan, tetapi juga merusak kredibilitas pengawasan pemerintah dan meningkatkan risiko bahaya kesehatan masyarakat secara luas.

Oleh karena itu, kejahatan siber harus dikenali sebagai ancaman strategis dalam pelaksanaan tugas penindakan Balai POM di

Mamuju, dan perlu direspons dengan pendekatan peningkatan kapasitas digital forensik, penguatan kerja sama lintas sektor (Polri, Kominfo, platform digital), serta pembentukan unit khusus pengawasan dan penindakan siber.

Perkembangan perdagangan elektronik (e-commerce) yang pesat di Sulawesi Barat membawa peluang sekaligus ancaman serius terhadap pengawasan obat dan makanan. Meningkatnya penjualan produk ilegal, termasuk obat tanpa izin edar dan Obat-obat Tertentu (OOT), melalui platform daring dan media sosial menjadi tantangan baru bagi Balai POM di Mamuju. Ancaman ini semakin kompleks karena pelaku memanfaatkan anonimitas dunia digital, sistem pembayaran elektronik lintas wilayah, dan distribusi produk tanpa rantai pasok yang jelas.

Sebagai respons strategis, Balai POM di Mamuju perlu mengembangkan sistem pengawasan digital berbasis intelijen (*cyber intelligence surveillance system*), yang mampu mendeteksi pola transaksi dan peredaran daring secara otomatis. Pembentukan *Cyber Surveillance Unit* di tingkat Balai dapat memperkuat kemampuan deteksi dini dan penindakan cepat terhadap pelanggaran di ranah digital.

Selain itu, integrasi sistem pelaporan masyarakat daring dengan platform nasional BPOM akan memperluas partisipasi publik. Sinergi dengan Polri, Kominfo, dan pengelola marketplace juga penting untuk memperkuat mekanisme *take down* produk ilegal secara efektif. Pendekatan ini menegaskan bahwa pengawasan digital tidak hanya sebatas patroli siber, tetapi menjadi strategi *intelligence-driven surveillance* yang terukur dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

2) Meningkatnya Risiko Serangan *Cyber* dan Kebocoran Data

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia digital menghadapi lonjakan signifikan dalam risiko serangan siber dan kebocoran data. Seiring

dengan pesatnya adopsi teknologi cloud, Internet of Things (IoT), serta sistem digital di sektor publik maupun swasta, permukaan serangan (attack surface) pun semakin luas. Ancaman seperti ransomware, phishing, malware canggih, dan eksploitasi kerentanan aplikasi kini menjadi tantangan serius yang tidak hanya menyerang perusahaan besar, tetapi juga organisasi skala menengah hingga individu. Teknik yang digunakan para pelaku siber juga mulai dari yang serangan konvensional hingga memanfaatkan teknik yang semakin canggih, termasuk serangan berbasis zero-day dan rekayasa sosial yang menargetkan kelemahan manusia dalam rantai keamanan.

Dampak dari serangan siber dapat mengakibatkan gangguan pada layanan publik BPOM. Hal ini juga dapat mengakibatkan tidak tercapainya target pemerintah dalam pelayanan. Dampak lain dari serangan ini adalah kebocoran data pribadi dan informasi sensitif. Data pelanggan, nomor kartu kredit, catatan kesehatan, hingga dokumen rahasia pelaku usaha telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan di pasar gelap (dark web). Insiden kebocoran data tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengancam reputasi kementerian/lembaga dan kepercayaan publik.

Meningkatnya pemanfaatan sistem digital dan aplikasi pengawasan di lingkungan BPOM membawa risiko baru berupa serangan siber, kebocoran data, dan akses ilegal terhadap informasi sensitif. Ancaman ini tidak hanya berdampak pada kerahasiaan data hasil pengawasan dan penyidikan, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap integritas lembaga.

Untuk memitigasi risiko tersebut, Balai POM di Mamuju perlu menerapkan kerangka *data governance* yang kuat, meliputi pengaturan hak akses, enkripsi data, pencatatan *audit log*, serta pelaksanaan *penetration test* secara berkala. Audit keamanan sistem informasi harus dilakukan minimal setiap tahun untuk menilai

kerentanan sistem terhadap potensi peretasan. Di sisi sumber daya manusia, penguatan literasi keamanan digital pegawai menjadi prioritas melalui pelatihan dan simulasi *cyber hygiene*.

Langkah mitigasi ini sejalan dengan penerapan SPBE dan dapat diarahkan menuju sertifikasi ISO 27001 tentang sistem manajemen keamanan informasi. Dengan demikian, risiko serangan siber dapat ditekan sekaligus memperkuat keandalan sistem pengawasan digital Balai POM di Mamuju.

3) Kondisi Geografis (Terdapat Wilayah yang Sulit Terjangkau)

Salah satu ancaman nyata yang dihadapi Balai POM di Mamuju dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan serta pelaksanaan edukasi kepada masyarakat adalah kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau. Kabupaten Mamuju dan wilayah kerja sekitarnya memiliki karakteristik geografis yang cukup menantang, dengan wilayah pegunungan, pesisir, serta daerah terpencil yang belum semuanya terhubung dengan infrastruktur jalan yang memadai. Ancaman ini menjadi kendala yang signifikan, baik dalam aspek teknis pelaksanaan pengawasan, efisiensi penggunaan anggaran, hingga ketercapaian program edukasi yang menyeluruh ke seluruh lapisan masyarakat.

Tidak semua daerah di wilayah pengawasan Balai POM di Mamuju dapat dijangkau dengan mudah. Banyak desa atau kecamatan berada di daerah terpencil yang hanya bisa ditempuh dengan waktu yang lama dan medan yang ekstrem, terutama saat musim hujan yang menyebabkan akses jalan rusak atau tertutup longsor. Hal ini berdampak pada keterbatasan mobilitas petugas pengawasan, keterlambatan distribusi informasi atau bahan edukasi, serta rendahnya intensitas pengawasan terhadap sarana distribusi pangan dan obat di wilayah tersebut. Akibatnya, terdapat potensi tingginya peredaran produk ilegal, kadaluwarsa, atau tidak memenuhi ketentuan di daerah-daerah yang jarang terjangkau.

Strategi adaptif diperlukan untuk mengurangi dampak dari keterbatasan geografis. Salah satunya adalah dengan menjalin kolaborasi erat bersama pemerintah daerah, puskesmas, aparat desa, dan kelompok masyarakat untuk membentuk jejaring pengawasan komunitas yang dapat melaporkan kondisi lapangan secara berkala. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, seperti penyebaran edukasi melalui media sosial dan grup WhatsApp lintas wilayah, juga dapat menjadi solusi antara dalam menyampaikan informasi meski secara tidak langsung. Inovasi layanan seperti *WALI (WhatsApp Lincah)* yang dikembangkan Balai POM di Mamuju pun menjadi sangat relevan sebagai bentuk layanan cepat yang tidak terbatas lokasi.

Balai POM di Mamuju dapat memperkuat pengawasan berbasis komunitas di daerah terpencil dengan dukungan kader pangan aman yang dibentuk melalui posyandu-posyandu yang ada dan memanfaatkan teknologi komunikasi daring dengan memanfaatkan aplikasi zoom meeting yaitu pengembangan dari BIYANKA menjadi Inovasi BIYANKA Online yang dapat diakses melalui daring.

4) Risiko Bencana Alam (Gempa Bumi dan Banjir)

Salah satu komponen ancaman yang perlu diantisipasi secara serius karena dapat mengganggu atau bahkan menghambat pencapaian tujuan strategis organisasi adalah risiko bencana alam, seperti gempa bumi dan banjir, yang cukup tinggi di wilayah Sulawesi Barat. Secara geografis, Mamuju dan sekitarnya berada pada kawasan yang rawan terhadap aktivitas tektonik dan hidrometeorologi, sehingga sering mengalami bencana alam yang bersifat mendadak dan merusak. Gempa bumi yang pernah terjadi dengan intensitas tinggi di wilayah ini menunjukkan bahwa infrastruktur, sistem pelayanan publik, dan aktivitas operasional Balai POM di Mamuju rentan terhadap gangguan serius apabila tidak disertai dengan sistem mitigasi risiko yang memadai.

Bencana alam seperti gempa dan banjir dapat menyebabkan terganggunya operasional pengawasan, distribusi informasi, serta aktivitas pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Gangguan ini dapat berupa kerusakan pada fasilitas kantor, laboratorium, atau sarana transportasi pengawasan, termasuk juga rusaknya sistem penyimpanan data atau keterbatasan akses terhadap jaringan komunikasi. Di saat yang bersamaan, kondisi pasca-bencana sering kali memperburuk risiko terhadap peredaran produk yang tidak memenuhi standar, seperti masuknya bantuan pangan atau obat yang tidak terjamin keamanannya, distribusi produk ilegal, serta lemahnya pengawasan pada jalur distribusi yang terdampak.

Bencana juga dapat memengaruhi jalannya kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi mitra pembinaan Balai POM di Mamuju. Ketika terjadi kerusakan pada fasilitas produksi mereka atau terputusnya jalur logistik, pelaku usaha cenderung fokus pada pemulihan ekonomi dasar dan mungkin mengabaikan aspek legalitas dan keamanan produk. Dalam situasi seperti ini, peran pengawasan menjadi semakin krusial, namun sering kali terkendala oleh keterbatasan mobilisasi sumber daya dan prioritas pemulihan pascabencana.

Ancaman dari risiko bencana alam ini juga berdampak pada pencapaian target kinerja dan efektivitas pelaksanaan program strategis, karena sebagian besar kegiatan pengawasan bersifat lapangan dan sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang stabil dan dapat dijangkau. Oleh karena itu, risiko bencana alam menjadi salah satu faktor eksternal yang dapat mengganggu keberlangsungan dan konsistensi pelaksanaan fungsi pengawasan Balai POM di Mamuju. Untuk itu, penting bagi organisasi untuk memiliki strategi manajemen risiko bencana yang terintegrasi dalam sistem kerja, termasuk dalam hal perlindungan aset, pengamanan data, pemulihan operasional, dan penguatan jejaring koordinasi lintas

sektor pada situasi darurat. Upaya ini diperlukan agar keberlanjutan layanan pengawasan tetap terjaga meskipun berada dalam kondisi krisis akibat bencana alam.

Untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik Balai POM di Mamuju perlu menetapkan Strategi Ketahanan Organisasi (*Organizational Resilience*) sebagai upaya sistematis untuk memastikan Balai POM di Mamuju tetap mampu menjalankan fungsi dan layanan utama meskipun terjadi gangguan besar bencana alam, seperti gempa bumi dan banjir yang berdampak pada gangguan infrastruktur. Balai POM di Mamuju harus menyusun Rencana *Business Continuity Plan (BCP)* untuk menjamin keberlanjutan Layanan Publik dan Laboratorium ketika terjadi bencana. Seperti:

a) Layanan Publik

- Menyusun prioritas layanan kritis, untuk sertifikasi, penerbitan izin edar, dan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
- Menetapkan mekanisme layanan darurat, termasuk sistem kerja *shift* dan lokasi alternatif pelayanan jika gedung kantor utama terdampak.
- Menyediakan saluran komunikasi cadangan, seperti hotline darurat dan platform daring untuk memastikan akses publik tetap berjalan.

b) Laboratorium

- Membangun SOP pengamanan peralatan dan bahan berbahaya, termasuk panduan penyimpanan aman saat bencana.
- Menetapkan laboratorium cadangan rujukan di wilayah lain seperti BBPOM di Makassar atau BPOM di Palu sebagai *backup facility* untuk memastikan layanan pengujian tidak terhenti.
- Menyediakan genset dan sumber daya energi alternatif guna menjaga kontinuitas uji laboratorium kritis.

c) Backup Data di BPOM *Cloud*

Untuk menjamin keamanan, integritas, dan ketersediaan data operasional, BPOM menerapkan sistem *backup* data terpusat Berbasis cloud (BPOM Cloud). Komponen utamanya meliputi:

- Replikasi Data Otomatis: Seluruh data operasional, termasuk hasil laboratorium, perizinan, dan administrasi, disalin secara otomatis ke pusat data BPOM
- Akses Lintas Lokasi: Unit kerja di daerah tetap dapat mengakses sistem utama meskipun terjadi gangguan lokal.
- Keamanan Berlapis: Diterapkan enkripsi dan kontrol akses sesuai standar keamanan informasi pemerintah.
- Pemulihan Cepat (*Disaster Data Recovery*): Sistem memungkinkan pemulihan data dalam waktu singkat jika terjadi kehilangan atau kerusakan data akibat bencana.

Strategi BCP Balai POM di Mamuju sejalan dengan Kebijakan Nasional *Disaster Risk Reduction* (DRR) sebagai strategi ketahanan organisasi diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020–2044

Hal ini tercermin dari adanya integrasi SWOT ke Daftar Risiko Balai POM di Mamuju. Implementasi strategi ketahanan organisasi dan BCP di Balai POM di Mamuju tidak hanya meningkatkan efektivitas internal, tetapi juga memperkuat posisi Balai POM di Mamuju sebagai UPT Badan POM yang adaptif dan sejalan dengan kebijakan nasional dalam mengurangi risiko bencana alam seperti gempa bumi dan banjir.

Keterbatasan akses transportasi darat, belum optimalnya jaringan komunikasi, serta ketergantungan pada kondisi cuaca menyebabkan

proses pengambilan sampel, inspeksi lapangan, dan tindak lanjut pengawasan sering menghadapi kendala logistik dan waktu.

Selain itu, beberapa daerah terpencil masih memiliki literasi keamanan pangan yang rendah, sehingga risiko peredaran obat dan makanan tidak memenuhi ketentuan (TMK) lebih tinggi.

Fakta ini diperkuat oleh laporan lapangan dan hasil monitoring tahunan BPOM yang menunjukkan bahwa distribusi pengawasan cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan (Mamuju dan sekitarnya), sementara daerah dengan akses terbatas relatif kurang terpantau secara rutin.

Ancaman kondisi geografis ini secara langsung memengaruhi efektivitas fungsi pengawasan Balai POM di Mamuju, baik pada aspek *pre-market* maupun *post-market*.

a. Pengawasan *Pre-Market*

- Pengawasan terhadap pelaku usaha baru atau yang belum berizin di daerah terpencil sulit dilakukan secara rutin karena keterbatasan akses fisik dan sumber daya.
- Akibatnya, masih terdapat pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin edar atau tanpa penerapan *Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)*.

b. Pengawasan *Post-Market*

- Kegiatan sampling produk di sarana distribusi, toko, dan pasar tradisional menjadi tidak merata.
- Kondisi ini berpotensi menimbulkan asimetri data pengawasan, di mana tingkat kepatuhan di daerah sulit dijangkau tidak terukur secara memadai.

c. Pembinaan dan Edukasi Masyarakat

- Pelaksanaan kegiatan *Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)* menjadi terbatas, sehingga pengetahuan masyarakat terkait keamanan obat dan makanan di wilayah tersebut masih rendah.

- Hal ini meningkatkan potensi penyalahgunaan obat tradisional, suplemen, atau pangan olahan rumahan tanpa standar keamanan.

Dengan demikian, kondisi geografis menjadi faktor pembatas struktural yang dapat menurunkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, serta memperluas risiko peredaran produk ilegal atau berbahaya di wilayah pinggiran.

5) Gratifikasi dan Konflik Kepentingan

Ancaman terkait penerimaan gratifikasi dan benturan kepentingan merupakan ancaman yang serius terhadap organisasi Balai POM di Mamuju dimana Balai POM di Mamuju yang telah berhasil meraih dan mempertahankan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan dilakukan audit internal secara periodik. Ketika terdapat terbukti pegawai menerima suap/gratifikasi maka ISO ini dapat dicabut. Proses bisnis yang paling sering menjadi titik kritis terkait suap/gratifikasi dan benturan kepentingan ini dapat terjadi pada beberapa hal antara lain:

- a) Pengadaan barang/jasa, sampling, sertifikasi, atau pemberian izin bisa menjadi momen rentan. Distributor atau pelaku usaha bisa memberi “hadiah” dengan harapan pelayanan atau keputusan yang menguntungkan.
- b) Tekanan sosial budaya lokal—di mana pemberian dianggap gestur sopan—menyulitkan penerapan prinsip penolakan dalam instansi. Jika ancaman terkait gratifikasi dan benturan kepentingan ini terjadi, maka akan dapat menyebabkan terjadinya beberapa hal berikut:
 - a) Mengikis kepercayaan publik terhadap integritas Balai POM di Mamuju
 - b) Risiko layanan yang tidak adil: distributor dengan koneksi bisa mendapat perlakuan istimewa

- c) Mengurangi efektivitas pengawasan pangan dan obat-obatan, yang seharusnya independen dan profesional

Untuk mencegah terjadinya gratifikasi dan benturan kepentingan ini terjadi, terdapat inovasi-inovasi/upaya yang telah dilakukan yakni :

- a) Inovasi Sipakainga Gratifikasi

Merupakan inovasi yang berhubungan dengan gratifikasi berupa sosialisasi kepada pihak eksternal terkait tolak gratifikasi yang dilaksanakan menggunakan berbagai media. Media penyampaian terkait tolak gratifikasi berupa sosialisasi di media sosial resmi Balai POM di Mamuju, Penyampaian langsung kepada pihak eksternal ketika ada kegiatan, penyampaian oleh pimpinan ketika memberikan sambutan pada berbagai acara yang melibatkan pihak eksternal, penulisan kalimat “petugas tidak diperkenankan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun” pada surat tugas, pencantuman logo tolak gratifikasi pada spanduk kegiatan maupun pop up di media *online*

- b) Inovasi Lapormaki’

Merupakan inovasi berupa saluran pelaporan oleh masyarakat yang terhubung langsung dengan Kepala Balai POM di Mamuju, saluran ini terjamin kerahasiaan terkait pelapor. Saluran pelaporan ini dapat berupa pengaduan masyarakat, WBS (whistle blowing system), maupun benturan kepentingan dari masyarakat. Penyampaian terkait inovasi ini telah dilakukan/disosialisasikan kepada pihak eksternal baik pada media sosial resmi Balai POM di Mamuju maupun penyampaian langsung kepada pihak eksternal ketika ada kegiatan

- c) Sosialisasi Secara Rutin Kepada Internal

Penguatan terkait pencegahan gratifikasi dan benturan kepentingan juga dilakukan kepada pihak internal berupa sosialisasi secara rutin yang dilaksanakan secara terjadwal. Sosialisasi terkait Gratifikasi dan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai Balai POM di Mamuju dilaksanakan, baik

dilakukan sendiri oleh tim kelompok kerja Penguatan Pengawasan maupun melibatkan inspektorat BPOM RI

d) Terdapat Tim Gratifikasi dan Benturan Kepentingan

Balai di Mamuju telah membentuk Tim khusus yang bertugas melakukan identifikasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan gratifikasi dan benturan kepentingan. Tim melakukan pelaporan secara periodik triwulanan dan pelaporannya juga dapat dilakukan oleh pegawai secara langsung di aplikasi Sang Integritas BPOM RI.

6) Isu dan pemberitaan bertonasi negatif mengenai BPOM di media dan media sosial, dapat mempengaruhi opini publik

Pemberitaan dan isu bertonasi negatif mengenai BPOM yang tersebar di media massa maupun media sosial menjadi ancaman serius terhadap citra dan kepercayaan publik. Opini publik yang terbentuk melalui media sangat berpengaruh terhadap legitimasi dan kredibilitas BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan. Di era digital saat ini, informasi menyebar dengan cepat dan sulit dikendalikan. Isu negatif baik yang berdasarkan fakta maupun yang bersifat hoax atau disinformasi dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan obat dan makanan maupun produk yang beredar di masyarakat.

Dalam era keterbukaan informasi dan perkembangan teknologi saat ini, satu pemberitaan tunggal bisa menjadi viral dan meluas, diperkuat oleh opini di media sosial, influencer, maupun tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh. Hal ini menjadi tantangan serius karena publik cenderung mempersepsikan informasi yang sering muncul sebagai kebenaran, terlepas dari validitasnya.

Untuk mengantisipasi dan mengelola ancaman ini, perlu dibangun strategi komunikasi yang komprehensif dan adaptif, termasuk penguatan monitoring dan evaluasi media, pengelolaan konten digital, peningkatan kapasitas humas atau public relations, serta penyusunan protokol manajemen krisis reputasi yang jelas dan

sistematis. Keterlibatan langsung pimpinan dalam merespons isu secara responsif juga menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas lembaga di mata publik.

Dalam menanggapi isu negatif yang muncul melalui media sosial perlu adanya respon cepat dari tim humas agar dapat segera melakukan koordinasi dan klarifikasi terkait isu negatif yang ada dan diperlukan juga pengembangan kompetensi terhadap petugas untuk dapat melakukan respon cepat dalam menanggapi isu negatif yang muncul melalui media sosial

7) Keterbatasan Sarana Pelaporan dan Pengawasan *Cyber*

Dalam menghadapi kompleksitas kejahatan di era digital, keterbatasan sarana pelaporan dan pengawasan siber menjadi salah satu ancaman signifikan terhadap efektivitas fungsi penindakan Balai POM di Mamuju. Meningkatnya peredaran produk obat dan makanan ilegal melalui platform digital seperti *e-commerce*, media sosial, dan aplikasi pesan instan tidak diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur pengawasan daring dan sistem pelaporan masyarakat yang memadai.

Saat ini, masih terbatasnya sistem pelaporan berbasis digital yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah terpencil di Sulawesi Barat, menyebabkan rendahnya deteksi dini terhadap peredaran produk ilegal secara daring. Masyarakat belum memiliki saluran yang efisien dan terpercaya untuk melaporkan temuan atau dugaan pelanggaran, sehingga banyak kasus yang tidak teridentifikasi pada tahap awal.

Di sisi pengawasan, keterbatasan perangkat teknologi, akses internet yang belum merata, serta minimnya sumber daya manusia dengan keahlian pengawasan digital, menghambat kemampuan Balai POM di Mamuju dalam melakukan patroli siber, pengumpulan barang bukti digital, dan pelacakan akun atau pelaku di ranah online. Tanpa dukungan sistem dan infrastruktur yang memadai, upaya

penindakan terhadap pelanggaran di ruang digital menjadi reaktif, lambat, dan memiliki keterbatasan dalam pembuktian hukum.

Ancaman ini semakin diperparah dengan tingginya volume transaksi digital dan kecepatan penyebaran informasi di dunia maya, yang menyebabkan distribusi produk ilegal bisa berlangsung sangat cepat dan masif, tanpa pengawasan yang memadai dari otoritas. Akibatnya, risiko terhadap kesehatan masyarakat meningkat, dan citra kelembagaan BPOM sebagai pelindung konsumen dapat terdampak negatif jika tidak mampu menjangkau dan menindak pelanggaran di ruang siber secara memadai.

Dengan demikian, keterbatasan sarana pelaporan dan pengawasan siber merupakan ancaman nyata bagi fungsi penindakan Balai POM di Mamuju, yang harus diantisipasi melalui penguatan infrastruktur digital pengawasan, pengembangan kanal pelaporan masyarakat berbasis teknologi informasi, pelatihan forensik digital bagi penyidik, serta kerja sama erat dengan lembaga yang memiliki otoritas pengawasan siber seperti Kominfo dan Kepolisian.

Perkembangan pesat transaksi daring di sektor obat dan makanan membawa tantangan baru bagi efektivitas pengawasan Balai POM di Mamuju. Salah satu ancaman strategis yang masih dihadapi adalah keterbatasan sarana pelaporan dan pengawasan siber, baik dari sisi infrastruktur digital, integrasi data, maupun mekanisme partisipasi publik. Kondisi ini menyebabkan banyak laporan masyarakat terkait penjualan obat ilegal, kosmetik berbahaya, atau penyalahgunaan Obat-obat Tertentu (OOT) secara daring belum dapat ditindaklanjuti secara cepat dan sistematis.

Saat ini, kanal pelaporan yang tersedia masih bersifat manual atau terfragmentasi misalnya melalui pengaduan langsung, surat elektronik, atau pesan media sosial tanpa sistem *tracking* dan *verification* otomatis. Akibatnya, validitas laporan sering memerlukan waktu lama untuk diverifikasi dan dikategorikan, sehingga efektivitas respon pengawasan menjadi terbatas.

Selain itu, belum adanya *cyber surveillance platform* lokal yang terintegrasi dengan sistem nasional BPOM menyebabkan pemantauan aktivitas daring (seperti marketplace atau media sosial) masih dilakukan secara reaktif, bukan berbasis intelijen digital.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Balai POM di Mamuju perlu turut memberikan masukan dan berkolaborasi dengan Pusdatin BPOM untuk mengembangkan platform yang memungkinkan *crowdsourced reporting* secara cepat, aman, dan mudah digunakan. Platform ini harus dilengkapi fitur *auto-filtering* kata kunci produk berisiko, integrasi sistem daerah dengan sistem pusat (*National Surveillance Dashboard*), serta mekanisme notifikasi bagi petugas pengawas.

Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM dalam *digital monitoring* dan analisis data daring agar proses pengawasan dapat dilakukan secara *real-time* dan berbasis bukti.

Strategi ini dapat diperkuat melalui kerja sama lintas sektor, seperti:

- Integrasi kanal pelaporan dengan Dinas Kominfo untuk sinkronisasi data siber lokal;
- Kolaborasi dengan platform *e-commerce* dan penyedia media sosial untuk *data sharing* dan mekanisme *take down* produk berisiko;
- Pelibatan masyarakat digital, komunitas muda, dan perguruan tinggi sebagai mitra pengawas partisipatif (*digital volunteer monitoring*)

Dengan langkah-langkah tersebut, keterbatasan sarana pelaporan dan pengawasan siber tidak hanya dapat diatasi, tetapi juga dapat dikonversi menjadi peluang untuk memperkuat sistem pengawasan berbasis intelijen digital di tingkat daerah.

Pendekatan ini sejalan dengan arah kebijakan BPOM dalam penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*

8) Tingginya penjualan OOT melalui Marketplace dan Media Sosial

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam aktivitas perdagangan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (OOT) melalui *platform market place* dan media sosial di wilayah Sulawesi Barat. Fenomena ini membawa tantangan baru bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berperan dalam menjaga keamanan, mutu, dan khasiat produk yang beredar di masyarakat.

Tingginya volume penjualan OOT secara daring berpotensi menjadi ancaman serius terhadap perlindungan kesehatan masyarakat. Produk-produk yang tidak memiliki izin edar, mengandung bahan berbahaya, dan dalam jangka waktu tertentu dapat merusak sistem saraf. Hal ini semakin diperparah oleh sifat perdagangan *online* yang bersifat anonim, tersebar luas, dan sulit dilacak, sehingga menyulitkan proses penelusuran dan penindakan oleh petugas.

Bagi tim penindakan Balai POM di Mamuju, hal ini menjadi tantangan strategis yang memerlukan penguatan upaya pengawasan berbasis digital, kerja sama lintas sektor, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal teknologi informasi dan intelijen siber. Tanpa langkah antisipatif dan responsif yang tepat, tingginya peredaran OOT ilegal melalui marketplace dan media sosial berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan pelaku usaha serta meningkatkan risiko keamanan terhadap konsumen di wilayah Sulawesi Barat.

Oleh karena itu, Balai POM di Mamuju perlu terus meningkatkan kegiatan patroli siber (*cyber patrol*), membangun kolaborasi dengan platform digital dan aparat penegak hukum, serta mengedukasi masyarakat agar lebih kritis dan cerdas dalam memilih produk obat dan obat tradisional yang aman dan legal. Ancaman ini harus dihadapi secara adaptif, inovatif, dan berkelanjutan demi menjaga kesehatan masyarakat dan menjamin perlindungan konsumen secara optimal.

Peredaran Obat-obat Tertentu (OOT) melalui platform marketplace dan media sosial seperti Facebook, TikTok Shop, dan Instagram masih

menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat di wilayah Mamuju. Modus penjualan yang terselubung, distribusi lintas wilayah, dan kurangnya pengawasan platform daring membuat upaya penindakan menjadi kompleks.

Untuk mengatasi hal ini, Balai POM di Mamuju perlu mengembangkan *digital watchlist* untuk memantau akun atau toko daring yang berisiko tinggi menjual OOT secara ilegal.

Langkah ini dikombinasikan dengan edukasi publik melalui kampanye “TOP GO” (Tolak penyalahgunaan OOT Ilegal), serta kolaborasi dengan penyedia platform digital dalam melakukan *take down* akun pelanggar dan pelaporan otomatis ke BPOM Pusat.

Sinergi antara upaya edukasi, pengawasan siber, dan penegakan hukum digital menjadi strategi kunci dalam menekan penjualan OOT daring yang mengancam kesehatan masyarakat dan kredibilitas sistem pengawasan nasional.

9) Perubahan Regulasi yang Sangat Dinamis

BPOM mengeluarkan Peraturan BPOM No. 4/2025 (ditetapkan 13 Feb 2025, diundangkan 20 Jan 2025) untuk memperketat manajemen dokumentasi hukum melalui JDIH. Hal ini berarti Balai POM di Mamuju harus mengikuti update tersebut secara langsung, mengubah sistem, SOP, pelaporan, dan integrasi ke portal nasional, dalam waktu singkat. Hal ini dapat membawa ancaman Jika implementasi terburu, terjadi ketidaksesuaian sistem atau kelalaian dokumen, bisa berujung sanksi administratif atau pengawasan ulang.

Inspeksi *pre-market* dan *post-market* yang dilakukan oleh BPOM merupakan mekanisme penting untuk memastikan keamanan dan mutu produk. Namun, bagi pelaku usaha, terutama UMKM dan industri lokal seperti di Mamuju, dinamika dan ketatnya proses ini juga membawa ancaman nyata jika tidak diantisipasi dengan baik.

Kedua tahapan tersebut merupakan pengawasan penting yang bertujuan menjaga keamanan, mutu, dan legalitas produk di pasar

Indonesia. Meskipun penting bagi perlindungan konsumen, keduanya juga membawa ancaman serius bagi pelaku usaha jika tidak dipersiapkan secara menyeluruh.

Dinamika regulasi di tingkat nasional, baik yang terkait dengan sistem pengawasan, perizinan, maupun pengelolaan SDM, menjadi tantangan bagi Balai POM di Mamuju. Perubahan kebijakan yang cepat berpotensi menyebabkan keterlambatan adaptasi di tingkat pelaksana daerah, sekaligus menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha lokal yang harus menyesuaikan kewajiban baru.

Untuk mengantisipasi hal ini, Balai POM di Mamuju menerapkan mekanisme *regulatory tracking* dan *regulatory briefing* secara berkala untuk memastikan setiap perubahan regulasi segera diadopsi ke dalam sistem pengawasan daerah. Sementara itu, bagi pelaku usaha, dilakukan pendampingan melalui forum konsultasi regulasi dan sosialisasi terpadu agar implementasi kebijakan berjalan seragam dan tidak menimbulkan resistensi. Pendekatan ini memastikan bahwa adaptasi regulasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi instrumen peningkatan kepatuhan dan efisiensi pelaksanaan kebijakan publik.

Perubahan regulasi yang cepat memengaruhi berbagai aspek pelaksanaan tugas Balai POM di Mamuju:

a) Risiko Ketidaksinkronan Implementasi di Lapangan

- Pergantian atau pembaruan regulasi sering kali terjadi sebelum tersedia pedoman teknis atau aplikasi sistem baru, menyebabkan kesenjangan pemahaman antarunit pelaksana
- Hal ini berdampak pada interpretasi berbeda dalam penegakan aturan, terutama dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi

b) Beban Adaptasi SDM dan Keterlambatan Sosialisasi

- Pegawai pengawas memerlukan waktu dan pelatihan untuk memahami regulasi baru, sementara pelaku usaha juga butuh pendampingan agar tidak salah menerapkan

- Keteringgalan dalam proses adaptasi berisiko pada penurunan efektivitas pengawasan dan peningkatan potensi pelanggaran administratif
- c) Tantangan Integrasi Data dan Sistem Digital
- Setiap perubahan regulasi sering diikuti oleh pembaruan sistem aplikasi (seperti e-sertifikasi, e- pengawasan BPOM, OSS, atau SIMPEL LPK)
 - Bila integrasi belum optimal, hal ini berpotensi menimbulkan duplikasi data, kesalahan input, dan keterlambatan pelaporan hasil pengawasan
- d) Risiko Ketidakpastian Bagi Pelaku Usaha
- Pelaku usaha sering menghadapi ketidakpastian dalam memenuhi kewajiban baru akibat perbedaan waktu sosialisasi atau perubahan teknis mendadak.
 - Hal ini dapat berdampak pada penurunan tingkat kepatuhan dan berpotensi menimbulkan konflik administratif dalam pengawasan.
- 10) Resistensi dan Kurangnya Kesadaran dari Pelaku Usaha
- Salah satu komponen ancaman yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis organisasi adalah adanya resistensi serta rendahnya tingkat kesadaran dari sebagian pelaku usaha terhadap pentingnya pemenuhan standar keamanan dan mutu produk obat dan makanan. Ancaman ini muncul sebagai konsekuensi dari masih terbatasnya pemahaman dan komitmen sebagian pelaku usaha, khususnya yang bergerak di sektor usaha mikro dan kecil, terhadap regulasi yang mengatur keamanan produk, tata cara produksi yang baik, serta pentingnya legalitas usaha dan produk. Dalam praktiknya, terdapat pelaku usaha yang cenderung mengabaikan prosedur perizinan, tidak melakukan pencantuman label sesuai ketentuan, atau kurang tertib terhadap

pengimplementasian dalam hal dokumentasi proses produksi (terkait SOP, dokumen produksi, dll).

Resistensi tersebut dapat bersumber dari berbagai faktor, seperti keterbatasan pendidikan dan informasi, kekhawatiran terhadap proses perizinan yang dianggap rumit dan memakan waktu, atau adanya anggapan bahwa pengawasan merupakan bentuk penghambatan terhadap usaha, bukan sebagai upaya perlindungan masyarakat. Dalam konteks wilayah kerja Balai POM di Mamuju yang mencakup daerah dengan tingkat pembangunan sosial dan ekonomi yang bervariasi, perbedaan persepsi ini menjadi tantangan tersendiri dalam membangun komunikasi yang efektif dan meyakinkan pelaku usaha agar patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Rendahnya kesadaran ini berdampak langsung pada peningkatan potensi pelanggaran di lapangan, seperti peredaran produk ilegal, produk tanpa izin edar, hingga praktik produksi yang tidak higienis atau tidak sesuai standar. Hal ini tidak hanya membahayakan kesehatan masyarakat, tetapi juga menambah beban kerja pengawasan bagi Balai POM, karena harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pembinaan dan penindakan di lapangan. Situasi ini semakin diperumit jika pelaku usaha bersikap pasif atau tidak kooperatif dalam proses pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Ancaman berupa resistensi dan kurangnya kesadaran ini juga dapat menghambat upaya peningkatan daya saing produk lokal, karena produk yang tidak memenuhi standar akan sulit bersaing di pasar yang lebih luas, terutama dalam konteks integrasi pasar nasional dan global yang menuntut kepatuhan terhadap regulasi keamanan pangan dan obat. Oleh karena itu, resistensi pelaku usaha dan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya aspek keamanan, mutu, dan legalitas menjadi faktor eksternal yang dapat melemahkan efektivitas pengawasan dan pencapaian sasaran strategis Balai POM di Mamuju. Menghadapi kondisi ini, diperlukan pendekatan

persuasif yang berkelanjutan, penguatan edukasi yang bersifat inklusif, serta sinergi dengan instansi lain dalam mendorong pembinaan dan pendampingan yang lebih terintegrasi bagi pelaku usaha di wilayah tersebut.

Salah satu tantangan signifikan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah Sulawesi Barat, khususnya di bawah koordinasi Balai POM di Mamuju, adalah rendahnya kesadaran dan adanya resistensi dari sebagian pelaku usaha terhadap regulasi dan standar keamanan produk.

Fenomena ini mencakup beberapa bentuk:

- Ketidakpatuhan administratif, seperti tidak memiliki izin edar, tidak memperbarui sertifikasi, atau tidak melaporkan perubahan formula.
- Resistensi terhadap pengawasan, misalnya keberatan saat dilakukan sampling, enggan dikunjungi petugas, atau menolak memberikan data lengkap.
- Kurangnya literasi regulasi dan keamanan pangan/obat, terutama di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).
- Mindset komersial jangka pendek, di mana pelaku usaha lebih fokus pada efisiensi biaya ketimbang kepatuhan standar mutu dan keamanan produk.

Berdasarkan hasil pengawasan lapangan Balai POM di Mamuju selama beberapa tahun terakhir, pelaku usaha kecil di sektor pangan olahan rumah tangga (PRT-PIRT) masih banyak yang belum memahami perbedaan antara izin edar lokal, sertifikasi halal, dan izin edar BPOM. Kondisi ini diperparah oleh persepsi bahwa pengawasan dianggap sebagai hambatan usaha, bukan instrumen perlindungan konsumen.

- 11) Maraknya penyebaran hoax terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Maraknya penyebaran hoax atau informasi yang tidak benar mengenai sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi salah satu ancaman yang sangat nyata tidak hanya bagi Balai POM di Mamuju selaku lembaga pengawas obat dan makanan, namun juga berbagai pihak termasuk konsumen, industri farmasi dan pangan, serta regulator. Hoax yang beredar seringkali berkaitan dengan isu keamanan produk, efek samping obat, kandungan bahan berbahaya, hingga isu konspirasi yang tidak berdasar. Penyebaran informasi ini biasanya terjadi secara masif melalui media sosial maupun berbagai platform digital lainnya dengan kecepatan yang sulit dikendalikan. Kondisi ini berpotensi menciptakan keresahan di tengah masyarakat, mengganggu stabilitas penjualan produk, serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap produk yang telah memiliki izin edar yang resmi.

Ancaman ini diperparah oleh tingkat literasi digital yang masih rendah di sebagian masyarakat, sehingga informasi yang belum tentu benar lebih mudah dipercaya dan disebarluaskan. Ketika hoax menyebar luas, masyarakat menjadi ragu akan keamanan, efikasi, atau kandungan produk yang sebenarnya sudah terjamin, bahkan bisa kehilangan kepercayaan pada BPOM. Ini juga berujung pada kerugian ekonomi yang besar bagi industri, di mana merek-merek ternama bisa mengalami penurunan penjualan drastis dan kerusakan reputasi yang membutuhkan waktu serta biaya besar untuk dipulihkan.

Ancaman hoax ini juga dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan masyarakat. Hoax bisa mendorong konsumsi produk ilegal, palsu, atau tidak terdaftar yang membahayakan kesehatan, mulai dari efek samping ringan hingga keracunan serius bahkan kematian. Selain itu, hoax yang meragukan vaksin atau obat-obatan esensial dapat menyebabkan penolakan terhadap pengobatan medis yang tepat, memicu wabah penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Hoax terkait obat-obatan dan pangan olahan tidak hanya

mengancam kesehatan masyarakat secara langsung, tetapi juga berisiko memicu panic buying, penolakan terhadap produk tertentu, atau bahkan penurunan produksi oleh industri terkait karena kehilangan kepercayaan konsumen.

Ancaman dari maraknya penyebaran hoax terkait sediaan farmasi dan pangan olahan ini bersifat multi-dimensi, meliputi aspek kesehatan, ekonomi, sosial, dan hukum. Dibutuhkan upaya kolaboratif dari pemerintah, industri, masyarakat, dan platform digital untuk mitigasi ancaman ini secara efektif. Selain itu, peningkatan kapasitas monitoring informasi dan literasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan keamanan dan mutu produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di tengah masyarakat.

Balai POM di Mamuju juga bersinergi erat dengan media media lokal dalam membangun literasi digital di masyarakat dengan melakukan peningkatan literasi digital kepada masyarakat dalam menangkal berita berita Hoaks terkait obat dan makanan yang beredar dimasyarakat. Sehingga kesadaran masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat melalui kanal resmi BPOM menjadi meningkat.

12) Ketergantungan Bahan Baku Impor Dalam Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Salah satu komponen ancaman yang signifikan dan dapat menghambat pencapaian tujuan strategis organisasi adalah masih tingginya ketergantungan pelaku industri, khususnya industri sediaan farmasi dan pangan olahan, terhadap bahan baku impor. Ketergantungan ini menimbulkan berbagai implikasi serius terhadap kelancaran proses produksi, stabilitas mutu produk, dan efektivitas pengawasan. Dalam praktiknya, sebagian besar bahan baku utama yang digunakan dalam formulasi sediaan farmasi, bahan tambahan pangan, serta bahan pendukung produksi lainnya berasal dari

negara lain, baik yang diperoleh melalui distributor besar maupun impor langsung oleh pelaku industri berskala menengah dan besar. Kondisi ini menjadi tantangan karena ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan baku impor sangat bergantung pada situasi global, termasuk faktor-faktor seperti kebijakan perdagangan internasional, fluktuasi nilai tukar, gangguan rantai pasok, serta kondisi geopolitik. Ketika terjadi hambatan impor, seperti keterlambatan pengiriman atau kenaikan harga yang tajam, produsen lokal akan mengalami kesulitan mempertahankan kelangsungan produksinya, yang pada akhirnya dapat mendorong mereka untuk mencari alternatif bahan baku yang belum tentu memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan. Dalam konteks pengawasan, situasi ini memperbesar potensi risiko peredaran produk yang tidak sesuai standar, baik karena bahan baku pengganti tidak memiliki jaminan mutu yang memadai, maupun karena produsen mengambil jalan pintas demi menekan biaya dan mempertahankan kelangsungan usaha.

Bagi Balai POM di Mamuju, ancaman ini menghadirkan tantangan besar dalam memastikan bahwa seluruh produk yang beredar tetap aman, bermutu, dan legal di tengah dinamika pasokan bahan baku yang tidak stabil. Pengawasan terhadap asal usul bahan baku menjadi lebih kompleks, terlebih ketika produsen kecil tidak memiliki dokumentasi yang lengkap atau tidak transparan dalam pelaporan penggunaan bahan. Ketergantungan pada bahan impor juga membuat proses verifikasi keaslian dan mutu bahan baku menjadi sulit dilakukan secara langsung, karena memerlukan rujukan pada sistem sertifikasi internasional yang mungkin tidak mudah diakses. Ancaman ini berpotensi menghambat pencapaian target strategis Balai POM dalam menjamin ketersediaan produk farmasi dan pangan olahan yang aman dan berkualitas, terutama jika tidak dibarengi dengan penguatan kebijakan substitusi bahan baku lokal atau peningkatan kemampuan industri dalam mengakses bahan yang sesuai standar. Oleh karena itu, meskipun faktor ini berada di luar

kendali langsung Balai POM, dampaknya terhadap rantai produksi dan pengawasan sangat nyata dan harus diantisipasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pembinaan kepada pelaku usaha terkait pemilihan bahan baku yang aman, serta penguatan sistem pelacakan bahan yang digunakan dalam produksi. Dengan demikian, ketergantungan terhadap bahan baku impor merupakan salah satu faktor eksternal yang secara nyata berpotensi mengganggu efektivitas pengawasan serta memperbesar risiko terhadap mutu dan keamanan produk yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju.

Ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor, terutama dalam sektor farmasi dan pangan olahan, masih sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian dan BPOM, lebih dari 85–90% bahan baku obat (API – Active Pharmaceutical Ingredients) dan sebagian besar bahan tambahan pangan serta *food ingredients* strategis masih diimpor dari negara seperti Tiongkok, India, dan beberapa negara Eropa.

Faktor ketergantungan ini menimbulkan kerentanan struktural, terutama terhadap:

- Fluktuasi harga dan pasokan global,
- Gangguan logistik dan geopolitik,
- Keterbatasan jaminan mutu bahan baku, serta
- Risiko kelangkaan produk dalam negeri ketika rantai pasok internasional terganggu (seperti yang terjadi pada pandemi COVID-19).

Di tingkat daerah, termasuk wilayah kerja Balai POM di Mamuju, fenomena ini berdampak langsung pada stabilitas distribusi dan ketersediaan obat serta pangan olahan. Industri kecil dan menengah (IKM) lokal di Sulawesi Barat sering kali mengalami keterlambatan produksi karena pasokan bahan baku impor yang tersendat. Hal ini juga memunculkan risiko masuknya bahan baku atau produk antara yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) ke wilayah pengawasan.

13) *Antimicrobial Resistance (AMR)*

Ancaman *antimicrobial resistance* (AMR) atau resistensi antimikroba merupakan masalah serius yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan sistem kesehatan sampai lini ekonomi. Bentuk ancaman AMR ini sangatlah kompleks dan juga beragam seperti:

- a) Kegagalan Pengobatan Infeksi, Meningkatnya Angka Kematian dan Lama Rawat Inap, akibat sudah banyak jenis Bakteri yang menunjukkan resistensi terhadap Antibiotik.
- b) Penggunaan Antibiotik yang Tidak Rasional, Tanpa Resep Dokter (self-medication).
- c) Kurangnya Kesadaran dan Edukasi

Pengetahuan masyarakat tentang bahaya resistensi antimikroba masih rendah. Hal ini terlihat dari respon masyarakat pada saat pengawasan dan masih tingginya permintaan dan penjualan antibiotik tanpa resep dokter. Melalui KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dan Bimtek ke Tenaga kesehatan dan/atau pemilik sarana pelayanan kefarmasian, harapan penurunan pembelian obat secara Self-Medication semakin berkurang, dan masyarakat lebih aware terhadap bahaya konsumsi obat tanpa konsultasi dan resep dokter

- d) Penggunaan Antibiotik dalam Peternakan dan Pertanian

Balai POM di Mamuju perlu memperkuat pengawasan distribusi antibiotik dan memperluas edukasi publik dalam kerangka *One Health Approach*. Pendekatan *One Health* dalam mencegah dan mengendalikan AMR menyatukan para pemangku kepentingan dari sektor terkait (pemerintah, profesi/akademisi, pelaku usaha dan masyarakat) untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam perancangan, implementasi dan pemantauan program, kebijakan, perundang-undangan dan penelitian untuk memitigasi AMR dan mencapai hasil kesehatan dan ekonomi yang lebih baik.

Selain itu, adanya Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba juga mendukung untuk mengatasi AMR dengan cara yang terprogram yang menempatkan masyarakat, kebutuhan mereka dan akses yang adil terhadap layanan kesehatan sebagai pusat dari respon AMR di masyarakat, di layanan primer, sekunder dan tersier, dan di tingkat nasional dan/atau sub nasional, WHO telah mengembangkan pendekatan yang berpusat pada masyarakat untuk mengatasi resistensi antimikroba dalam kesehatan manusia dan paket intervensi inti WHO untuk mendukung rencana aksi nasional. Hal ini berfokus pada pencegahan infeksi dan memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan untuk diagnosis berkualitas dan pengobatan yang tepat. Sebagai bagian penting dari respons AMR, negara-negara dapat mengintegrasikan paket inti intervensi AMR ke dalam rencana dan strategi nasional untuk cakupan kesehatan universal serta kesiapsiagaan dan respons darurat kesehatan. Tanpa penguatan peran BPOM sebagai garda depan pengawasan obat dan makanan, AMR dapat menjadi krisis kesehatan nasional yang memperlemah fondasi ketahanan sistem kesehatan dan pangan Indonesia.

14) Masih Tingginya Ketimpangan *Gender* di Berbagai Sektor

Berdasarkan data Global Inequality Index, Indonesia berada pada rangking 113 secara global dengan nilai ketidak timpangan sebesar 0,728. Index ini dibangun oleh dimensi kesehatan, pemberdayaan dan tenaga kerja. Berdasarkan data BPS (2024), Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sulawesi Barat tahun 2023 sebesar 0,494, turun 0,016 poin dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 0,510. Menurunnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sulawesi Barat dipengaruhi oleh perbaikan pada dimensi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan. Perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh perbaikan indikator perempuan melahirkan tidak di fasilitas kesehatan yang turun dari 13,1 persen tahun 2022 menjadi 11,0 persen pada tahun

2023 serta perbaikan indikator wanita pernah kawin yang melahirkan pertama kurang dari 20 tahun turun dari 36,6 persen tahun 2022 menjadi 32,9 persen pada tahun 2023. Perbaikan dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh perbaikan indikator pendidikan minimal SMA untuk perempuan yang meningkat lebih tinggi daripada laki-laki. Persentase perempuan meningkat 1,62 poin atau dari 32,75 persen tahun 2022 menjadi 34,37 persen pada tahun 2023, sedangkan persentase laki-laki hanya meningkat 1,33 poin atau meningkat dari 38,03 persen tahun 2022 menjadi 39,36 persen pada tahun 2023.

Dalam meningkatkan pengarusutamaan gender, Balai POM di Mamuju melakukan pendekatan perencanaan yang kongkrit yang tertuang dalam kerangka acuan kegiatan yang disusun dengan menerapkan prinsip prinsip pengarusutamaan gender sehingga dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang inklusif dan tidak diskriminatif serta adil bagi semua. Balai POM di Mamuju juga terus mengkampanyekan prinsip setara berdaya melalui media media dan kegiatan kegiatan KIE sehingga dapat menyebarkan prinsip setara berdaya melalui berbagai kanal media ataupun KIE.

Tabel 1.3 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

INTERNAL	EKSTERNAL
<i>Strengths</i> (Kekuatan)	<i>Opportunities</i> (Peluang)
1. SDM kompeten dan bersertifikasi	1. Dukungan yang kuat dari pemerintah daerah dan instansi pusat, media dan akademisi
2. Laboratorium terakreditasi ISO/IEC 17025: 2017	2. Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis
3. Kolaborasi dengan lintas sektor pusat dan daerah yang aktif	3. Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK)
4. Komunikasi internal yang solid	4. Tingginya Antusiasme Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Komitmen pimpinan yang kuat	5. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Jumlah Produk Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Sulawesi Barat
6. Pemanfaatan teknologi dan inovasi	6. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah
7. Komitmen kelembagaan yang kuat (Penerapan 2 ISO)	7. Inovasi layanan berkelanjutan (Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan)
8. Ekosistem edukasi dan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha yang kuat	

9. Kemampuan Adaptif dalam Mengikuti Dinamika Regulasi dan Inovasi Teknologi untuk Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk 10. Memiliki strategi dan saluran komunikasi publik eksternal dan internal yang dikelola dengan baik	8. Kebijakan kesehatan nasional (Dinamika Kebijakan Kesehatan Global dan Perdagangan Bebas dalam Harmonisasi Regulasi dan Peningkatan Daya Saing Produk Nasional) 9. Kolaborasi strategis dengan stakeholder baru 10. Produksi dan Konsumsi Pangan Olahan yang Berkelanjutan
<i>Weaknesses (Kelemahan)</i> 1. Kebijakan rotasi internal SDM belum dilaksanakan secara berkala 2. Transformasi digital belum optimal 3. Belum tersedianya gedung administrasi dan layanan publik 4. Sarana dan Prasarana Laboratorium Terbatas 5. Sistem TI belum terintegrasi optimal 6. Belum tersedianya Sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah / IPAL 7. Pengawasan yang belum menjangkau daerah terpencil 8. Belum maksimalnya KIE ke masyarakat terkait penyalahgunaan OOT	<i>Threats (Ancaman)</i> 1. Kejahatan siber di bidang obat dan makanan 2. Meningkatnya risiko serangan cyber dan kebocoran data 3. Kondisi geografis (terdapat wilayah yang sulit dijangkau) 4. Risiko bencana alam (gempa, banjir) 5. Gratifikasi dan konflik kepentingan 6. Isu dan pemberitaan bertonasi negatif mengenai BPOM di media dan media sosial dapat mempengaruhi opini publik 7. Keterbatasan sarana pelaporan & pengawasan siber 8. Tingginya penjualan OOT melalui market place dan media social 9. Perubahan regulasi yang sangat dinamis 10. Resistensi dan Kurangnya Kesadaran dari Pelaku Usaha 11. Maraknya penyebaran Hoax terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 12. Ketergantungan bahan baku impor dalam produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 13. <i>Antimicrobial Resistance (AMR)</i> 14. Masih tingginya ketimpangan gender di berbagai sektor

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

2.1 Visi Balai POM di Mamuju 2025-2029

Sebagai UPT yang bertanggung jawab atas pengawasan produk obat dan makanan di wilayah Sulawesi Barat, Balai POM di Mamuju telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan Balai POM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat di Wilayah Sulawesi Barat. Visi Balai POM di Mamuju disusun sama persis dengan Visi BPOM yang berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan Visi Balai POM di Mamuju untuk Renstra 2025-2029 yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi Balai POM di Mamuju dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi Balai POM di Mamuju untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi Balai POM di Mamuju.

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang

tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi Balai POM di Mamuju untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen Balai POM di Mamuju dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

2.2 Misi Balai POM di Mamuju

Dalam rangka mencapai visi tersebut, Balai POM di Mamuju telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi Balai POM di Mamuju disusun sama persis dengan Misi BPOM dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal

dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi Balai POM di Mamuju untuk mencapai visi Balai POM di Mamuju tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi

antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

2.3 Tujuan Balai POM di Mamuju

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, Balai POM di Mamuju telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi Balai POM di Mamuju sebagai pengawas obat dan makanan di Provinsi Sulawesi Barat. Berikut adalah tujuan Balai POM di Mamuju yang disusun sama persis dengan tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

- 1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

- 2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
- 4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
- 5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan Balai POM di Mamuju dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan Balai POM di Mamuju tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Provinsi Sulawesi Barat, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Indikator Tujuan Balai POM di Mamuju 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	27	28	29	30
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100	100	100	100	100
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	100	100	100	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	93	95	97	100

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	94	94,75	95,5	96,25
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	87	90
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,2	91,4	92,6	93,6	94,6
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	81	82	83	84
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	52	53	56	60,5	64
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	16,67	33,33	50	66,67	66,67
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	81	82	83	84
		Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,88	86,74	87,6	88,45	89,31

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8	14	15	16	17
		Jumlah desa pangan aman	3	6	6	7	7
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	2
3	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95	96	97	98	99
		Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	91	92	93	94
4	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16,92	33,85	52,31	75,38	100,00
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,6	4,65	4,7	4,75	4,8
		Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	86,05	86,1	86,15	86,2	86,25
		Nilai AKIP UPT BPOM	80,9	81	81,33	81,53	82
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,9	2,95	3	3,05	3,1

Tabel 2.1 di atas menggambarkan keterkaitan antara 5 (lima) tujuan strategis Balai POM di Mamuju dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai selama periode 2025–2029. Setiap indikator disusun

secara terukur dan realistis untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program prioritas di bidang pengawasan obat dan makanan. Peningkatan target dari tahun ke tahun mencerminkan upaya berkelanjutan dalam memperkuat sistem pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dukungan terhadap UMKM, penegakan hukum, serta penguatan tata kelola organisasi menuju pelayanan publik yang prima.

2.4 Sasaran Kegiatan Balai POM di Mamuju

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai POM di Mamuju, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai POM di Mamuju akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin

kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital,

menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat

melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- b. Nilai AKIP UPT BPOM
- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Setiap sasaran strategis ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa BPOM dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

Tabel 2.2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai POM di Mamuju periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> 2. <i>Persentase Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 2. <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		<i>dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> 3. Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029) 4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 6. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	3. <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 4. <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i> 5. <i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 6. <i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i> 7. <i>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 8. <i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 9. <i>Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 10. <i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 11. <i>Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan</i> 12. <i>Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar</i> 13. <i>Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT</i> 14. <i>Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			<i>sesuai Standar Kemampuan Laboratorium</i> 15. <i>Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman</i> 16. <i>Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)</i>
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi <i>Indikator:</i> <i>Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i>
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator:</i> <i>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i> 1. <i>Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i> 2. <i>Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i> 3. <i>Jumlah desa pangan aman</i> 4. <i>Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk	Layanan Publik UPT yang prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator:</i> 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Mamuju 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran strategis tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan Balai POM di Mamuju untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran kegiatan Balai POM di Mamuju sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Balai POM di Mamuju

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Masih beredarnya produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang mengandung bahan kimia obat atau bahan berbahaya	a. Pelaksanaan Pengawasan yang diprioritaskan penelusuran Obat Bahan Alam mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) b. Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam di fasilitas peredaran c. Bimtek kepada Pelaku Usaha	- Kelompok Kerja Fungsi Jabatan Pemeriksaan (a, b, c)

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Meningkatnya jumlah kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan (KP) di Provinsi Sulawesi Barat	a. Memastikan keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan SPPG, Bimtek terhadap Pengawas, dan dukungan Laboratorium untuk mendeteksi cemaran dan penanganan KLB-KP b. Koordinasi dengan SPPI terkait pengawasan SPPG, dan pelatihan terhadap Penjamah pangan di SPPG dan Penerima manfaat c. Koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM terkait dengan anggaran dalam pelaksanaan pengawasan MBG	- Kelompok Kerja Fungsi Jabatan Pemeriksaan (a, b) - Kelompok Kerja Fungsi Jabatan Pengujian (a) - Kepala Subbagian Tata Usaha (c)
		Rendahnya Tingkat kepatuhan pelaku usaha dan lintas sektor dalam menindaklanjuti rekomendasi/keputusan hasil pengawasan Balai POM di Mamuju	a. Pendampingan pelaku usaha berupa desk dan Bimtek b. Pendampingan oleh petugas BPOM baik melalui pengawasan <i>pre market</i> maupun <i>post market</i> c. Pelatihan peningkatan kompetensi dan pemahaman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) terkini pada pelaku usaha d. Pemberian sanksi sesuai ketentuan berupa peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara kegiatan, dan rekomendasi pencabutan izin.	- Kelompok Kerja Fungsi Jabatan Pemeriksaan (a, b, c, d)
		Tidak semua rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	a. Peningkatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemerintah daerah serta institusi lain di daerah terkait bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. b. Pertemuan advokasi dan Bimtek Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang	- Kelompok Kerja Fungsi Jabatan Pemeriksaan (a, b, c, d) - Kelompok Kerja Fungsi Jabatan Penyuluhan (a)

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			Pengawasan Obat dan Makanan di daerah c. Koordinasi bersama lintas sektor dan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan iklan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan d. Monitoring tindak lanjut kepada lintas sektor	
		Tingginya praktik penyaluran dan penyerahan antibiotika yang tidak sesuai ketentuan, baik oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang menyalurkan tanpa analisis kewajiban, maupun oleh fasilitas pelayanan kefarmasian, diperburuk oleh rendahnya literasi masyarakat. Hal ini berisiko menyebabkan peningkatan resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik yang tidak rasional, dan beban sistem kesehatan yang meningkat	a. Melakukan pencegahan melalui penguatan regulasi dan implementasi audit distribusi antibiotik oleh PBF, termasuk kewajiban analisis kewajiban permintaan, sesuai kapasitas layanan di fasilitas pelayanan kefarmasian dengan penekanan pada kewajiban resep dari tenaga medis b. Peningkatan literasi dan edukasi masyarakat dengan melakukan kampanye terkait penggunaan antibiotik yang bijak c. Intensifikasi advokasi dan koordinasi lintas sektor di daerah	- Kelompok Kerja Fungsi Jabatan Pemeriksaan (a, b, c) - Kelompok Kerja Fungsi Jabatan Penyuluhan (b)
		Kurangnya komponen peralatan laboratorium dalam memenuhi kebutuhan pengawasan	a. Melaksanakan regionalisasi laboratorium untuk mengurangi kesenjangan pemenuhan dalam pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Mamuju b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan SKL pada aspek standar peralatan laboratorium sesuai kelompok tier laboratorium pengujian c. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM terkait anggaran pemenuhan peralatan laboratorium	- Kelompok Kerja Fungsi Jabatan Pengujian (a, b) - Kepala Subbagian Tata Usaha (c)

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di wilayah Sulawesi Barat belum konsisten menerapkan CPPOB / cara produksi pangan olahan yang baik	a. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk peluang sarana produksi baru yang ada di daerah b. Bekerjasama dengan Lintas sektor terkait untuk pengembangan Sumber Daya Alam Pangan Fortifikasi c. Melakukan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi secara berkala setiap tahun	- - Kelompok Kerja Fungsi Jabatan Pemeriksaan (a, b, c)
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Amplifikasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah target pengawasan dan kelompok sasaran secara optimal	a. Pelaksanaan KIE di UPT sesuai Juknis KIE BPOM secara <i>offline</i> dan <i>online</i> ke seluruh pelosok wilayah pengawasan b. Pengisian Tools/Instrumen evaluasi pelaksanaan KIE c. Pembaruan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam Rangka KIE Sediaan Fasmasi dan Pangan Olahan sesuai Perkembangan Terkini d. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penyusunan dokumen kerjasama, penyusunan rencana aksi, serta monitoring dan evaluasi	- Kelompok Kerja Fungsi Jabatan Penyuluhan (a, b, c, d)
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Penerapan Cara Produksi yang baik tidak dilaksanakan secara konsisten dan sesuai ketentuan pada UMKM Obat Bahan Alam, Kosmetik dan UMK Pangan Olahan	a. Inovasi program pendampingan dan edukasi bagi UMKM OBA, Kosmetik, Pangan Olahan b. Pembentukan fasilitator pendampingan UMKM OBA, Kosmetik, Pangan Olahan c. Fasilitasi bimbingan keamanan dan mutu Obat Bahan Alam dalam pemenuhan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bertaha, Kosmetik dalam pemenuhan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) dan Pangan olahan dalam pemenuhan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP-CPPOB)	- Kelompok Kerja Fungsi Jabatan Pemeriksaan (a, b, c, d, e) - Kelompok Kerja Fungsi Jabatan Penyuluhan (e)

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			d. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap progress pendampingan UMK di balai e. Penandatanganan <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> dengan perguruan tinggi dan asosiasi untuk menjalin Kerjasama terkait dukungan kemandirian UMKM dalam menerapkan standar keamanan dan mutu	
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terhambatnya Proses Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	a. Koordinasi dan Pembangunan kesepahaman antara BPOM (PPNS), Kepolisian (Korwas PPNS), dan Kejaksaan Tinggi/Negeri (Jaksa Penuntut Umum) dalam Penanganan Perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan b. Peningkatan Kompetensi PPNS BPOM dalam Pelaksanaan Penyidikan Perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	- Kelompok Kerja Fungsi Jabatan Penindakan
		Perkembangan modus kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan lebih cepat dari adaptasi regulasi dan penindakan	Melakukan Penyempurnaan regulasi responsif terhadap modus kejahatan baru di Bidang Obat dan Makanan (adaptive regulation) Penerapan penindakan preventive & predictive (dari hulu- ke hilir)	- Kelompok Kerja Fungsi Jabatan Penindakan
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Lemahnya fungsi deteksi terhadap potensi dan/atau indikasi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, sehingga peluang peredaran produk illegal tidak segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti	a. Optimalisasi Dashboard Penindakan yang terintegrasi nasional b. Peningkatan kapasitas petugas cegah tangkal, intelijen dan siber c. Penguatan jejaring dan kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan fungsi deteksi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	- Kelompok Kerja Fungsi Jabatan Penindakan
		Ancaman siber di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan berkembang lebih cepat	a. Memperkuat koordinasi Balai POM di Mamuju dengan instansi dan mitra keamanan siber di Sulawesi Barat untuk mendorong pertukaran	a. Kelompok Kerja Fungsi Jabatan Penindakan (a)

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		dibanding teknologi BPOM	informasi ancaman dan penanganan insiden secara cepat dan terintegrasi b. Meningkatkan keamanan siber Balai POM di Mamuju melalui penggantian password berkala dan himbauan untuk tidak tautan yang tidak jelas sumber	b. Subbagian Tata Usaha (b)
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Pemberitaan terkait kinerja Balai POM di Mamuju dan BPOM di berbagai media, baik cetak, online, elektronik dan media sosial bertonasi negatif	Menyebarkan informasi kegiatan Balai POM di Mamuju kepada media dan lebih terbuka kepada media	Kelompok Kerja Fungsi Jabatan Penyuluhan
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Kurangnya kepatuhan terhadap tata kelola anggaran berisiko menurunkan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi serta menghambat peningkatan akuntabilitas Balai POM di Mamuju	a. Melaksanakan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai POM di Mamuju secara berkala b. Melaksanakan evaluasi Zona Integritas (ZI) Balai POM di Mamuju secara berkala c. Melakukan evaluasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) secara berkala d. Menindaklanjuti hasil evaluasi melalui penyusunan rencana aksi perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara terukur	- Tim SAKIP (a, d) - Tim Pembangunan ZI (b, d) - Subbagian Tata Usaha (c, d)
		Adanya penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang pegawai dalam pelaksanaan tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	a. Penerapan kebijakan antikorupsi, antara lain: Pengendalian gratifikasi, Penanganan, dan WBS/pengaduan Masyarakat b. Monitoring dan evaluasi pelaporan Benturan Kepentingan, WBS, Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi unit kerja c. Sosialisasi <i>Anti Fraud</i> d. Penguatan nilai-nilai anti penyuapan (SMAP) dalam kerangka kerja sistem manajemen pengawasan obat dan makanan e. Membekali petugas Pengawasan dengan surat	- Tim Pembangunan ZI (a, b, c, d, f) - Kelompok Kerja Fungsi Jabatan Pemeriksaan (f)

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			tugas dengan footer larangan gratifikasi	
		Adanya gangguan operasional dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana alam (gempa bumi dan banjir) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas pengawasan, pelayanan publik, serta pelaporan kinerja Unit Organisasi.	a. Mendaftarkan gedung kantor dalam asuransi b. Membuat dan memasang rambu jalur evakuasi serta titik kumpul aman di lingkungan kantor c. Memastikan ketahanan infrastruktur bangunan melalui audit bangunan d. Memastikan ketahanan sistem data dengan memanfaatkan penyimpanan cadangan di <i>backup cloud</i> seperti <i>simpan.pom.go.id</i>	Subbagian Tata Usaha (a, b, c, d)

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

- 1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG):** Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada

penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. **Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*:** Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.
3. **Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:** BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui

reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

- 4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
- 5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
- 6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik:** BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi

pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 2.3 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i>	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Sumber: Renstra BPOM 2025-2029, 2025

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025- 2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Mamuju

Arah kebijakan Balai POM di Mamuju disusun menyesuaikan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, sedangkan Strategi Balai POM di Mamuju disusun berdasarkan Analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT Balai POM di Mamuju, tetapi tetap memperhatikan dan sejalan dengan strategi BPOM.

Arah Kebijakan Balai POM di Mamuju yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM

4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Balai POM di Mamuju melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT dan tetap sejalan dengan strategi BPOM, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawas produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional

6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran
8. Memperkuat pengawasan dengan memperluas jangkauan pengawasan obat dan makanan hingga ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) serta daerah yang selama ini jarang terjangkau, sebagai bagian dari pelaksanaan pengawasan rutin yang lebih merata dan inklusif.

Tabel 2.4 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Mamuju

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT. 2. Memperkuat pengawasan dengan memperluas jangkauan pengawasan obat dan makanan hingga ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) serta daerah yang selama ini jarang terjangkau, sebagai bagian dari pelaksanaan pengawasan rutin yang lebih merata dan inklusif.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i>	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai POM di Mamuju juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Adapun kegiatan prioritas serta inisiatif strategis yang mendukung Arah Kebijakan dan Strategi tersebut, dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Dalam rangka mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai POM di Mamuju melaksanakan kegiatan “Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia”. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Mamuju mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

2. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai (gaji) serta pemeliharaan rutin dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Balai POM di Mamuju.

Dalam rangka mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai POM di Mamuju melaksanakan kegiatan "Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" serta "Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM". Kegiatan pengawasan yang dilakukan mencakup pre-market dan post-market terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun, dalam

pelaksanaannya, pengawasan *pre-market* dilakukan dalam batas kewenangan tertentu dan tidak mencakup penyusunan standar.

Selain pengawasan, Balai POM di Mamuju juga melaksanakan layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta advokasi dan kerja sama lintas sektor. Sebagai satuan kerja di daerah, Balai POM di Mamuju tidak hanya berperan dalam pelaksanaan tugas teknis pengawasan, tetapi juga menjalankan fungsi manajerial sebagai bagian dari upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Mamuju untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan Balai POM di Mamuju dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran strategis yang mencerminkan visi Balai POM di Mamuju, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Balai POM di Mamuju selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama Balai POM di Mamuju, yaitu memastikan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, seluruh unit kerja di Balai POM di Mamuju diharapkan menjadikan matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Tabel 4.1 Matriks Kerangka Kinerja Balai POM di Mamuju 2025-2029

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	27	28	29	30

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100	100	100	100	100
		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	-	100	100	100	100
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	93	95	97	100
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	94,00	94,75	95,50	96,25
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	87	90
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,2	91,4	92,6	93,6	94,6
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	81	82	83	84
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	52	53	56	60,50	64
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	16,67	33,33	50,00	66,67	66,67
		16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	81	82	83	84
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	17	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya efektivitas KIE	18	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,88	86,74	87,60	88,45	89,31

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		19	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8	14	15	16	17
		20	Jumlah desa pangan aman	3	6	6	7	7
		21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	2
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	22	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16,92	33,85	52,31	75,38	100,00
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95	96	97	98	99
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	24	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	91	92	93	94
7	Layanan Publik UPT yang Prima	25	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,60	4,65	4,70	4,75	4,80
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	26	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	86,05	86,10	86,15	86,20	86,25
		27	Nilai AKIP UPT BPOM	80,90	81,00	81,33	81,53	82,00
		28	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		29	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,90	2,95	3,00	3,05	3,10

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Balai POM di Mamuju 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
3165-Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	12.489,1	33.758,6	53.145,1	55.010,0	53.600,3
6384-Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	6.312,2	6.453,7	6.454,7	6.455,7	6.456,7
TOTAL	18.801,3	40.212,3	59.599,8	61.465,7	60.057,0

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Balai POM di Mamuju 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	18.801,3	40.212,3	59.599,8	61.465,7	60.057,0
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-	-	-	-	-
TOTAL	18.801,3	40.212,3	59.599,8	61.465,7	60.057,0

BAB V

PENUTUP

Renstra Balai POM di Mamuju 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Renstra Balai POM di Mamuju 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di lingkungan Balai POM di Mamuju baik untuk perencanaan menengah dan tahunan.

Renstra Balai POM di Mamuju Tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi seluruh pegawai Balai POM di Mamuju sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

KEPALA BALAI POM DI MAMUJU

Ttd

BURHAM SIDOBEJO

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Mamuju Tahun 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit
									(Dalam Juta Rupiah)					Organisasi
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksana
Balai POM di Mamuju								18.801,3	40.212,3	59.599,8	61.465,7	60.057,0	Balai POM di Mamuju	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								12.489,1	33.758,6	53.145,1	55.010,0	53.600,3		
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT													
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Mamuju	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00						
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Balai POM di Mamuju	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00						
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Mamuju	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00						
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Balai POM di Mamuju	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Mamuju	85,00	87,00	89,00	92,00	95,00						
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Balai POM di Mamuju	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Mamuju	-	100,00	100,00	100,00	100,00						
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Mamuju	90,00	93,00	95,00	97,00	100,00						
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Mamuju	93,25	94,00	94,75	95,50	96,25						
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Mamuju	80,00	82,00	84,00	87,00	90,00						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Balai POM di Mamuju	90,20	91,40	92,60	93,60	94,60						
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Balai POM di Mamuju	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00						
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Balai POM di Mamuju	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Balai POM di Mamuju	52,00	53,00	56,00	60,50	64,00						
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Balai POM di Mamuju	16,67	33,33	50,00	66,67	66,67						
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Mamuju	-	82,00	83,00	84,00	85,00						
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		Balai POM di Mamuju	45	45	45	45	45						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Balai POM di Mamuju	105	105	105	105	110						
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	Balai POM di Mamuju	317	320	336	353	372						
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Balai POM di Mamuju	27	26	29	31	34						
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Balai POM di Mamuju	111	125	136	147	157						
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM	Balai POM di Mamuju	144	144	144	144	144						
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	Balai POM di Mamuju	1	1	1	1	1						
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Balai POM di Mamuju	1	1	1	1	1						
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Balai POM di Mamuju	1	1	1	1	1						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		Balai POM di Mamuju	338	338	338	338	338						
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi													
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Mamuju	100	100	100	100	100						
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT		Balai POM di Mamuju	1	1	1	1	1						
	Meningkatnya efektivitas KIE													
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Balai POM di Mamuju	85,88	86,74	87,60	88,45	89,31						
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Balai POM di Mamuju	8,00	14,00	15,00	16,00	17,00						
	3	Jumlah desa pangan aman	Balai POM di Mamuju	3,00	6,00	6,00	7,00	7,00						
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Balai POM di Mamuju	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00						

[illegible]

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Balai POM di Mamuju	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00						
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan		Balai POM di Mamuju	2	2	2	3	3						
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Balai POM di Mamuju	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00						
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		Balai POM di Mamuju	14	14	15	15	15						
	Layanan Publik UPT yang prima													
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Balai POM di Mamuju	4,60	4,65	4,70	4,75	4,80						
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		Balai POM di Mamuju	70	92	96	101	105						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
	2025	2026		2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal													
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Balai POM di Mamuju	86,05	86,10	86,15	86,20	86,25						
	2	Nilai AKIP UPT BPOM	Balai POM di Mamuju	80,90	81,00	81,33	81,53	82,00						
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Balai POM di Mamuju	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00						
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Balai POM di Mamuju	2,90	2,95	3,00	3,05	3,10						
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		Balai POM di Mamuju	1	1	1	1	1						
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		Balai POM di Mamuju	1	1	1	1	1						
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		Balai POM di Mamuju	1	1	1	1	1						
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM									6.312,2	6.453,7	6.454,7	6.455,7	6.456,7	
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		Balai POM di Mamuju	1	1	1	1	1						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Balai POM di Mamuju	1	1	1	1	1						

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI MAMUJU,

Ttd.

BURHAM SIDOBEJO